



# PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pendidikan Agama Islam

Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag  
Editor, Meriana Pane, S.Ag., M.Pd.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

**Ketentuan Pidana  
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

## **PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

---

Pemulis : Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.  
Editor : Meriana Pane, S.Ag., M.Pd.  
Layout : Kiki Candra  
Desain Cover : Fahrudin

Diterbitkan Oleh:  
UN Raden Fatah Press  
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetakoleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp/Fax : 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail :noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Februari 2023  
15,5 x 23 cm  
vi, 198 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-623-250-369-4

**PENGANTAR  
PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.**

**Editor: Meriana Pane, S.Ag., M.Pd.**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

**Ketentuan Pidana  
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

---

## **PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

---

Penulis : Dr. Muhamad Fauzi, M.Ag.  
Editor : Meriana Pane, S.Ag., M.Pd.  
Layout : Kiki Candra  
Desain Cover : Fahrudin

Diterbitkan Oleh:

**UIN Raden Fatah Press**

Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetakoleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail :noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Februari 2023

15,5 x 23 cm

vi, 198 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-623-250-369-4

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulisan Buku Daras (buku bahan ajar) yang berjudul *PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI* ini dapat diselesaikan.

Buku ini disusun selain sebagai bahan perkuliahan bagi mahasiswa, juga dimaksudkan untuk mengembangkan keilmuan penulis sebagai tenaga edukatif (dosen) yang mengasuh Mata Kuliah Telaah dan Pengembangan Kurikulum PAI, sekaligus juga menjadi syarat akademik dan pegangan bagi penulis dalam melaksanakan tugas fungsional kuliah tersebut. Buku ini disusun berdasarkan topik-topik perkuliahan Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum PAI. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi buku pegangan bagi para mahasiswa keguruan yang mengambil mata kuliah tersebut.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah berjuang menyampaikan risalah *samawiyyat* kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Proses penyelesaian buku ini tidak lepas dari peran dan jasa banyak pihak, berkat dorongan dan dukungan mereka jugalah akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Atas semua bantuan dan jasa mereka, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga semuanya itu menjadi amal ibadah jariyah yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya penulis hanya berharap semoga buku ini bermanfaat.

Palembang, 12 November 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

### **BAB I PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM**

A. Pengertian Kurikulum .....	1
B. Peranan dan Fungsi Kurikulum .....	10
C. Hakikat Pengembangan Kurikulum .....	17
D. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum .....	20
E. Evaluasi Kurikulum .....	26
F. Filsafat Pendidikan dan Kurikulum .....	31
G. Kurikulum Pendidikan Islam .....	32
H. Perkembangan Kurikulum di Indonesia .....	37

### **BAB II ASAS, PENDEKATAN, PRINSIP, PROSES PENGEMBANGAN KURIKULUM**

A. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum .....	41
1. Asas Filosofis .....	42
2. Asas Sosiol dan Budaya .....	47
3. Asas Psikologis .....	51
4. Asas Organisatoris .....	54
5. Asas Perkembangan Ipteks .....	54
B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum .....	55
C. Pendekatan-Pendekatan Pengembangan Kurikulum .....	59
D. Proses Pengembangan Kurikulum .....	61

### **BAB III PENGEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN KURIKULUM**

A. Pengembangan Komponen Tujuan .....	71
B. Pengembangan Komponen Materi .....	75
C. Pengembangan Komponen Strategi dan Media .....	87
D. Pengembangan Komponen Evaluasi .....	88

<b>BAB IV DESAIN, ORGANISASI DAN JENIS KURIKULUM</b>	
A. Desain Kurikulum .....	99
B. Organisasi Kurikulum .....	107
C. Jenis Kurikulum .....	110
<b>BAB V KURIKULUM INTI (<i>CORE CURRICULUM</i>), MUATAN LOKAL (MULOK), DAN KURIKULUM TERSEMBUNYI (<i>HIDDEN CURRICULUM</i>)</b>	
A. Kurikulum Inti ( <i>Core Curriculum</i> .....	117
B. Kurikulum Tersembunyi ( <i>The Hidden Curriculum</i> ).....	122
C. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal .....	122
<b>BAB VI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)</b>	
A. Pengertian dan Filosofi KBK.....	127
B. Karakteristik KBK .....	131
C. Prinsip-Prinsip Pengembangan KBK.....	136
<b>BAB VII KURIKULUM TINGKAT SATUAN (KTSP)</b>	
A. Pengertian KTSP .....	141
B. Karakteristik KTSP.....	144
C. Landasan Formal Pengembangan KTSP .....	146
D. Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP .....	150
E. Implementasi dan Pengembangan KTSP.....	154
F. Pengembangan Silabus dan RPP .....	165
<b>BAB VIII KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN</b>	
A. Hubungan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran .....	171
B. Peranan Guru dalam Penerapan Kurikulum .....	174
C. Pengembangan Kurikulum dalam Kegiatan Pembelajaran.....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>197</b>



# **BABI**

## **PENGANTAR PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Bab ini merupakan bagian pengantar ke arah studi pengembangan kurikulum. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta menerapkan nilai-nilai praktis-operasionalnya dalam dunia pendidikan sekolah tentang beberapa pokok bahasan penting berikut ini: definisi kurikulum; peranan dan fungsi kurikulum; hakikat pengembangan kurikulum; faktor-faktor mempengaruhi pengembangan kurikulum; langkah-langkah pengembangan kurikulum; evaluasi kurikulum, kurikulum dan filsafat pendidikan, dan kurikulum pendidikan Islam.

### **A. Definisi Kurikulum**

Pada hakikatnya kurikulum dapat dikaji berdasarkan tingkatan-tingkatan pendidikan. Pada tingkatan *pertama*, kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian tujuan pendidikan yang menggambarkan berbagai kemampuan (pengetahuan dan keterampilan), nilai dan sikap yang harus dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik dari suatu satuan jenjang pendidikan. Pada tingkatan *kedua*, kurikulum diartikan sebagai kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari oleh para siswa untuk menguasai serangkaian kemampuan, nilai dan sikap, yang secara institusional harus dikuasai oleh para siswa setelah selesai mempelajarinya. Pada tingkatan *ketiga*, kurikulum diartikan sebagai garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih untuk dijadikan objek belajar. Selanjutnya pada tingkatan *keempat*, kurikulum adalah panduan dan buku pelajaran yang disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran. Pada tingkatan *terakhir*, kurikulum diartikan sebagai bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh para siswa, termasuk di dalamnya berbagai jenis,

bentuk, kegiatan dan instrumen evaluasi yang digunakan sebagai bagian terpadu dari strategi pembelajaran yang direncanakan untuk dialami para siswa (Soedijarto, 1990: 10). Pengertian kurikulum tersebut di atas sudah mencakup semua aspek atau komponen yang ada di dalam kurikulum itu sendiri. Menurut Suciati, dkk (2007: 3), bila ditelusuri lebih jauh istilah kurikulum mempunyai beberapa macam arti, antara lain: 1) kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran, 2) kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah, 3) kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa.

Dalam pembahasan ini, perlu juga ditinjau kurikulum dalam pengertian etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah). Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa secara etimologis (cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal usul kata) kata kurikulum<sup>1</sup> berasal dari bahasa Latin *curere*, yang kemudian berubah menjadi kata benda *curriculum* atau *curicula*, yang berarti jarak tempuh lari. Kata kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lalu. Kata kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam kamus *Webster* tahun 1856. Pada tahun itu kata kurikulum digunakan dalam bidang olah raga atletik, yang diartikan sebagai suatu jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh seorang pelari atau suatu alat yang membawa seseorang dari *start* sampai *finish*. Menurut Ahmad Tafsir (1994: 53) penggunaan istilah kurikulum dalam dunia pendidikan baru populer sejak tahun 1955 juga dalam kamus *Webster*. Dalam kamus tersebut kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat tertentu dan sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan (*department*).

---

<sup>1</sup> Lihat S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 2; Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 1; Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, h. 3; dan Webster, *Webster's New Word Dictionary Of American Language*, College, The World Publishing Company, 1964, h. 361-362.

Bila ditinjau dari segi terminologi, definisi kurikulum mengalami interpretasi yang beragam dari para ahli pendidikan, terutama dalam pandangan mereka yang berkompeten membicarakan tentang kurikulum. Perbedaan penafsiran itu, menurut Subandijah (1993: 1) lebih disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan latar belakang pendidikan mereka. Pemikiran manusia memang tidak selalu sama. Sebab ia tidak lepas dari subjektivitas dan latar belakang sosial-pendidikan serta kompetensi keilmuan orang yang mendefinisikannya. Berdasarkan pendapat para ahli kurikulum, definisi kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi dua pengertian, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan kurikulum dalam arti luas.

Banyak sekali definisi kurikulum yang telah dikemukakan para ahli kurikulum, sebagaimana yang dikutip Suparlan (2008) berikut ini:

1. *In The Curriculum, the first textbook published on the subject, in 1918, John Franklin Bobbitt said that, the curriculum is a social engineering arena. Per his cultural presumptions and social definitions, his curricular formulation has two notable features: (i) that scientific experts would best be qualified to and justified in designing curricula based upon their expert knowledge of what qualities are desirable in adult members of society, and which experiences would generate said qualities; and (ii) curriculum defined as the deeds-experiences the student ought to have to become the adult he or she ought become.*
2. *Hence, he defined the curriculum as an ideal, rather than as the concrete reality of the deeds and experiences that form people to who and what they are.*
3. *Contemporary views of curriculum reject these features of Bobbitt's postulates, but retain the basis of curriculum as the course of experience(s) that forms human beings in to persons. Personal formation via curricula is studied at the personal level and at the group level, i.e. cultures and societies (e.g. professional formation, academic discipline via historical*

experience). *The formation of a group is reciprocal, with the formation of its individual participants.*

4. *Although it formally appeared in Bobbitt's definition, curriculum as a course of formative experience also pervades John Dewey's work (who disagreed with Bobbitt on important matters). Although Bobbitt's and Dewey's idealistic understanding of "curriculum" is different from current, restricted uses of the word, curriculum writers and researchers generally share it as common, substantive understanding of curriculum.*
5. *In formal education or schooling (cf. education), a **curriculum** is the set of courses, course work, and content offered at a school or university. A curriculum may be partly or entirely determined by an external, authoritative body (i.e. the National Curriculum for England in English schools). In the U.S., each state, with the individual school districts, establishes the curricula taught. Each state, however, builds its curriculum with great participation of national academic subject groups selected by the United States Department of Education, e.g. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) for mathematical instruction. In Australia each state's Education Department establishes curricula. UNESCO's International Bureau of Education has the primary mission of studying curricula and their implementation worldwide.*
6. *Curriculum means two things: (i) the range of courses from which students choose what subject matters to study, and (ii) a specific learning program. In the latter case, the curriculum collectively describes the teaching, learning, and assessment materials available for a given course of study.*
7. Edward A. Krug mendefinisikan kurikulum sebagai berikut. "A curriculum consists of the means used to achieve or carry out given purposes of schooling".

Pengertian kurikulum mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Engkoswara, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia telah merumuskan

perkembangan pengertian kurikulum tersebut dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1.  $K = \text{-----}$ , artinya kurikulum adalah **jarak** yang harus ditempuh oleh pelari.
2.  $K = \Sigma MP$ , artinya kurikulum adalah sejumlah **mata pelajaran** yang harus ditempuh oleh peserta didik.
3.  $K = \Sigma MP + KK$ , artinya kurikulum adalah sejumlah **mata pelajaran** dan **kegiatan-kegiatan** yang telah direncanakan sekolah yang harus ditempuh oleh peserta didik.
4.  $K = \Sigma MP + KK + SS + TP$ , artinya kurikulum adalah sejumlah **mata pelajaran** dan **kegiatan-kegiatan** dan **segala sesuatu** yang yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan **tujuan pendidikan** yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah.

Kurikulum merupakan instrumen yang sangat penting dan fundamental untuk merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Tapi kurikulum tidak dapat berdiri sendiri, ia berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, seperti guru/dosen dan sarana prasarana yang ada di sekolah.

### ***1. Kurikulum dalam Arti Sempit (Tradisional-Konvensional)***

Memahami definisi kurikulum sangat penting artinya bagi seorang guru atau calon guru, sebab hal tersebut akan berpengaruh terhadap paradigma berpikir (*mindset*) seorang guru atau calon guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas dan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap kualitas hasil belajar yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Kurikulum dalam pengertian sempit atau pandangan lama (tradisional) diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh oleh siswa atau mahasiswa untuk mendapatkan ijazah atau naik

tingkat.<sup>2</sup> Dalam pengertian ini, kurikulum dipahami hanya sebatas sejumlah mata pelajaran (bidang studi) atau materi pelajaran (bidang studi) saja. Definisi kurikulum secara tradisional ini masih tetap dianut di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari definisi kurikulum yang terdapat di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional --selanjutnya dalam buku ini disingkat UUSPN-- No. 2 Tahun 1989 yang lama Bab I Pasal (1), “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar” (UU RI No. 2 TH. 1989: 3). Rumusan ini tidak jauh berbeda dengan rumusan definisi kurikulum dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yaitu: “*kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.*” (UU RI No. 20 TH. 2003: 4).

Mendefinisikan dan memahami konsep kurikulum secara tradisional seperti di atas, tampaknya mempunyai implikasi yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Menurut Nunan (1988: 5), kurikulum dalam pengertian tradisional cenderung berpusat pada guru (*teacher centered*), di mana guru lebih mendominasi proses kegiatan pembelajaran, demikian pula yang sering terjadi dalam praktik-praktik pendidikan di sekolah. Pemahaman seperti ini tidak memberi ruang gerak yang luas untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, sebab kurikulum hanya dipahami secara formal, terbatas pada buku teks/GBPP kurikulum mata pelajaran dan hanya dalam lingkup proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru<sup>3</sup> sebagai pengampu

---

<sup>2</sup> Definisi ini dapat dilihat dalam Cater V. Good, *Dictionary of Education*, Mc. Graw-Hill Book Company Inc., New York, 1959: 113, Abdullah Idi, 1999: 4, S. Nasution, 1994: 3.

<sup>3</sup> Dalam konteks pendidikan nasional, yang disebut sebagai guru adalah tenaga pengajar atau tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, membimbing dan melatih peserta didik. Lihat UUSPN No. 2 Th. 1989 Bab I pasal (1) dan Bab VII pasal (27), bandingkan dengan UUSPN No. 20 Th. 2003, Bab I pasal (1) dan

mata pelajaran mempunyai wewenang yang sangat dominan terhadap proses pembelajaran, sedangkan siswa hanyalah menjadi objek yang pasif. Padahal idealnya, siswa merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri.

Implikasi lain dari paradigma pemahaman konsep kurikulum dalam arti tradisional ini adalah bahan pelajaran yang disajikan berpusat pada mata pelajaran belaka (*subject matter centered*) dan proses pembelajaran terpusat pada guru (*teacher centered*) dan kondisi kelas sangat didominasi oleh guru sebagaimana dikemukakan oleh Nunan di atas. Dengan kata lain, pola pembelajaran lebih mengarah pada paradigma pembelajaran yang bersifat *paedagogi*, yaitu pendekatan pendidikan dan pembelajaran untuk anak kecil, dalam hal ini anak didik “disuapi” dengan berbagai macam pengetahuan yang ia sendiri tidak mengerti apa manfaatnya bagi kehidupannya. Konsekuensi berikutnya, pengembangan potensi anak didik hanya diarahkan pada pengembangan intelektualnya saja (*cognitive domain*). Sebab guru terjebak dalam proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang bersifat formalitas, tidak mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bersifat filosofis dan komprehensif, lebih-lebih dalam konteks mata pelajaran pendidikan nilai atau pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang lebih menekankan internalisasi nilai-nilai agar terbentuk karakter atau kepribadian yang baik bagi peserta didik,

---

Bab XI pasal (39-44), lihat juga UU RI. No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen. Proses pendidikannya berlangsung formal dan berada di dalam kelas. Berbeda dengan pengertian guru dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Terminologi yang dipakai dalam perspektif ini adalah pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam membimbing perkembangan anak didik menuju kedewasaan dan kesempurnaan. Proses pendidikannya bisa berlangsung kapan dan di mana saja, baik secara formal, informal maupun nonformal. Menurut Abuddin Nata (1997), berdasarkan informasi Al-Qur'an yang menjadi pendidik secara garis besarnya ada empat, yaitu : Allah Swt; para Nabi; kedua orang tua, dan orang lain. Lihat Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 62-67. Pemahaman terhadap kedua istilah di atas, guru dan pendidik, memiliki pengaruh dan kesan tersendiri dalam proses kegiatan pendidikan, terutama mengenai masalah tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing perkembangan jiwa anak didik.

seperti Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah dan lain-lain.

## **2. Kurikulum dalam Arti Luas (Modern)**

Dalam pandangan baru atau pengertian modern, kurikulum tidak hanya sebatas sejumlah mata pelajaran (*courses*) yang diajarkan di sekolah, tetapi juga meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah (Hamalik, 2007: 4). Dalam pengertian ini, kurikulum adalah mencakup segala usaha sekolah, baik kegiatan intra maupun ekstra kurikuler sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum meliputi seluruh program kegiatan pendidikan di sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik.<sup>4</sup> Dalam pengertian ini, menurut William B. Ragan (1955: 3) kurikulum adalah seluruh usaha sekolah untuk merangsang anak didik belajar baik di dalam kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Senada dengan definisi kurikulum yang dikemukakan oleh Harold Albery (1946: 10), yaitu seluruh aktifitas yang dilakukan sekolah untuk para pelajar harus dipandang sebagai kurikulum.

Selain definisi di atas, masih banyak lagi definisi kurikulum lainnya. Tapi menurut S. Nasution (1994: 10) definisi kurikulum yang lebih populer adalah definisi kurikulum yang mirip dengan dikemukakan oleh Harold Albery di atas, yaitu *the curriculum of school is all the experiences that pupils have under the guidance of the school*. Dengan kata lain, secara singkat pengertian kurikulum dalam arti luas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi anak didik secara maksimal guna

---

<sup>4</sup> Secara Umum UUSPN No. 2 Th. 1989 menggunakan istilah “peserta didik” untuk menyebut anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dengan perincian khusus sebagai berikut: peserta didik tingkat pendidikan dasar dan menengah disebut pelajar, murid atau siswa; dan pada tingkat pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Peserta didik pada jalur luar sekolah disebut warga belajar. Bandingkan dengan UUSPN No. 20 Th. 2003, Bab V pasal (12) tentang peserta didik. Sedangkan peserta didik dalam terminologi pendidikan Islam disebut anak didik. Secara filosofis dan pedagogis beberapa istilah tersebut memiliki efek psikologis tersendiri dalam proses pembelajaran.

mencapai tujuan pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kurikulum dalam pengertian modern ini tampaknya lebih berpusat pada siswa (*student centered*).

Dengan demikian, kurikulum dalam pengertian yang terakhir ini tidak hanya berupa bidang studi atau GBPP dan kegiatan belajar siswa saja, tetapi meliputi segala aktivitas yang mempengaruhi pembentukan kepribadian siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di dalam kata kurikulum itu, menurut S. Nasution meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode belajar mengajar, evaluasi, tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, waktu belajar, jumlah ruang, pilihan mata pelajaran, keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, kemauan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang yang melayani dan dilayani sekolah, dan pegawai administrasi. Penjelasan yang dikemukakan terakhir ini tampaknya lebih realistis dan operasional, dibandingkan dengan definisi kurikulum yang dikemukakan sebelumnya, yang terkesan sangat abstraktif, idealistik dan teoritik.

Namun demikian, secara filosofis penyusunan kurikulum harus tetap berangkat dari pemikiran-pemikiran tentang hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia dan kondisi masyarakat, serta harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Pemikiran-pemikiran filosofis tentang beberapa hal tersebut harus termuat dalam sebuah kurikulum pendidikan.

Kedua pengertian kurikulum yang telah di-kemukakan tersebut hendaknya dipahami secara komprehensif dan holistik, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan substansinya, sehingga dalam tataran teknis-operasional pengembangannya tidak terjebak ke dalam proses pembelajaran<sup>5</sup> yang formalistik dan

---

<sup>5</sup>Dalam tulisan ini selanjutnya menggunakan istilah “pembelajaran” bukan “proses belajar mengajar”. Sebab menurut J. Drost (2000) istilah proses belajar mengajar tidak ada di seluruh dunia. Yang ada ialah proses mengajar belajar (*teaching and learning*), sebab siswa harus diajar terlebih dahulu baru bisa belajar. Oleh karena itu, sekarang mulai dilazimkan menggunakan istilah pembelajaran, yang merupakan penggabungan dari istilah mengajar belajar, karena para pengajar hanya bisa menjadikan para pelajar belajar, tidak lebih dari

verbalistik sebagaimana yang telah dikemukakan. Bahkan, seorang guru sangat penting untuk memiliki konsep kurikulum dalam arti luas (*modern*) dan menerapkannya dalam proses pembelajaran, apalagi bidang studi (pelajaran) yang berkaitan dengan pendidikan nilai dan pembentukan karakter (*character building*) peserta didik, seperti Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila, Pendidikan sejarah, dan Pendidikan berbasis nilai lainnya.

## **B. Peranan dan Fungsi Kurikulum**

Di sini terlebih dahulu didefinisikan arti kata peranan dan fungsi. Peranan adalah tugas yang harus dimainkan atau dilakoni. Fungsi adalah kedudukan atau jabatan. Jadi, fungsi kurikulum adalah kedudukan kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan peranan kurikulum adalah tugas yang harus diemban oleh kurikulum dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum merupakan salah satu komponen utama (*core*) dalam dunia pendidikan. Sebab kurikulum berpengaruh langsung terhadap proses dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, peranan dan fungsi kurikulum sangat vital dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan jantung pendidikan (*the heart of education*).

### **1. Fungsi Kurikulum**

Fungsi kurikulum dapat dijelaskan dengan mengutip dan merangkum pendapat Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1986: 16-21) serta M. Ahmad, dkk., (1998: 100), sebagai berikut:

- a. *Fungsi kurikulum sebagai alat mencapai tujuan pendidikan*  
Kurikulum pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika suatu tujuan pendidikan belum

---

itu (Baca J. Drost, "Pengembangan Karier Seorang Pengajar", Artikel dalam *Kompas* 26 Januari 2000). Dengan kata lain, pembelajaran merupakan usaha menjadikan orang lain belajar. Pendapat ini tampaknya merujuk pada fenomena di sekolah, terutama di dalam kelas yang menunjukkan bahwa siswa baru belajar kalau guru mengajar, itu pun kalau materi pelajarannya menarik perhatian mereka.

tercapai, maka hal yang pertama harus ditinjau adalah kurikulumnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan diperlukan kurikulum yang efektif dan efisien. Tujuan pendidikan yang akan dicapai tersebut disusun secara berjenjang (hierarkis) mulai dari tujuan pendidikan yang bersifat nasional (makro), tujuan akhir dan jangka panjang, sampai tujuan instruksional (mikro), dan tujuan proses pembelajaran suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu di kelas.

*b. Fungsi kurikulum bagi perkembangan siswa.*

Dalam hal ini kurikulum harus mampu berfungsi melayani pengembangan potensi siswa. Perbedaan-perbedaan individu siswa di sekolah harus menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan pelayanan. Aneka ragam latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi siswa harus mendapat perhatian, bimbingan, dan pendidikan sesuai dengan potensi masing-masing. Pelayanan program sekolah berkaitan dengan penempatan murid dalam kelompok belajar, kelompok rekreasi, kelompok ekstrakurikuler, kelompok latihan khusus, hendaknya disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosiologis siswa tersebut. Sebab kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat pada dasarnya akan mendorong para siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, materi dan pengalaman belajar yang diprogramkan dalam kurikulum diharapkan bisa mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Berbagai materi yang diprogramkan diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam proses dan hasil belajar siswa. Pengalaman belajar inilah yang selanjutnya berguna dan bermakna bagi pengembangan potensi mereka di kemudian hari. Dengan demikian, rancangan kurikulum sangat penting artinya bagi pembentukan karakter dan pembinaan mental peserta didik agar mereka dapat mandiri dalam mengembangkan kehidupan pribadinya dan berkarya di masyarakat.

*c. Fungsi kurikulum bagi para pendidik*

Bagi guru atau pendidik, kurikulum memiliki fungsi penting sebagai berikut:

- 1) Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa.
- 2) Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dalam menyerap sejumlah pengetahuan yang telah dipelajari.
- 3) Pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

*d. Fungsi kurikulum bagi pimpinan dan pembina sekolah*

Kepala sekolah adalah administrator dan supervisor di sekolah. Artinya, seorang pimpinan atau kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan administrasi sekolah yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seorang kepala sekolah dan pembina sekolah harus merujuk pada kurikulum. Oleh karena itu, fungsi kurikulum bagi pimpinan dan pembina sekolah adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar agar lebih efektif dan kondusif.
- 2) Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi belajar yang menunjang situasi belajar siswa ke arah lebih baik.
- 3) Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas kependidikan mereka.
- 4) Sebagai seorang administrator maka kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum pada tahap selanjutnya.
- 5) Sebagai acuan bagi pelaksanaan evaluasi agar proses pembelajaran dapat terlaksana lebih baik.

*e. Fungsi kurikulum bagi orang tua siswa*

Kurikulum memiliki fungsi yang amat besar bagi orang tua siswa, yakni agar mereka dapat berperan serta dalam

membantu sekolah melakukan pembinaan terhadap putra-putri mereka. Dengan mengacu pada kurikulum sekolah tempat anak-anak mereka dibina, maka orang tua dapat memantau perkembangan informasi yang diserap anak-anak mereka. Bantuan orang tua dapat juga berupa konsultasi langsung dengan pihak sekolah mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi siswa.

*f. Fungsi kurikulum bagi tingkat pendidikan di atas dan di bawah*

Keberadaan kurikulum pada tingkat sekolah yang lebih rendah sangat berkaitan dengan upaya perancangan kurikulum pada tingkat pendidikan selanjutnya. Pengelola sekolah tingkat SLTA misalnya, akan mengacu pada rumusan kurikulum pada tingkat SLTP dalam merancang kurikulumnya. Dengan kata lain, kesinambungan dan keterkaitan antara kedua tingkatan pendidikan tadi dari sisi korelasi keilmuan harus sinergis dalam rumusan kurikulum. Paling tidak ada dua fungsi dapat dikemukakan sebagai keterkaitan antara kurikulum tingkat atas dan tingkat rendah:

1) Sebagai pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan.

Dengan mengetahui kurikulum yang digunakan oleh suatu sekolah tertentu, sekolah pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengadakan penyesuaian dalam perancangan kurikulumnya. Artinya bila sebagian dari kurikulum sekolah tersebut telah diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, maka sekolah dapat meninjau kembali perlu atau tidaknya bagian tertentu dari kurikulum tersebut untuk dilanjutkan.

2) Penyiapan tenaga guru

Jika suatu sekolah berfungsi menyiapkan tenaga guru untuk mengajar pada tingkat sekolah di bawahnya, maka amat perlu sekolah mengetahui kurikulum yang diajarkan di sekolah tingkat di bawahnya. Pengetahuan ini mencakup tentang isi materi (*content*), susunan dan

metodologi pembelajaran. Misalnya, bila pada kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) telah diperkenalkan pelajaran teologi, maka pembelajaran teologi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) hendaknya di-sesuaikan dengan pendekatan yang berlaku di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Demikian juga untuk kasus pembelajaran Hadits. Misalnya, jika metode *takhrij al-hadits* telah diperkenalkan di Madrasah Aliyah (MA) maka di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) juga perlu mengintensifkan metode *takhrij*, demikian seterusnya.

g. *Fungsi kurikulum bagi sekolah*

Bagi sekolah kurikulum dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran, misalnya telah ditentukan macam-macam bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan atau materi pelajaran untuk setiap semester, sumber bahan belajar, metode pembelajaran, alat dan media pembelajaran yang diperlukan. Di samping itu, kurikulum juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis program, cara penyelenggaraan, strategi pelaksanaan, penanggung jawab, sarana dan prasarana dan sebagainya.

h. *Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pihak pengguna lulusan (stakeholder)*<sup>6</sup>

Bagi para pengguna lulusan (user), kurikulum berfungsi memberikan kontribusi dalam merencanakan program pendidikan sekolah. Di samping itu, masyarakat dalam hal ini dunia usaha/dunia industri dan dunia kerja (Dudiker)), dapat mengacu pada kurikulum yang ditetapkan lembaga pendidikan untuk kepentingan memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran konstruktif dalam penyempurnaan program

---

<sup>6</sup> Kata *stakeholder* dipahami sebagai pihak-pihak pemangku kepentingan yaitu: (1) kepala sekolah, (2) guru, (3) tenaga administrasi, (4) pengawas sekolah, dan (5) komite sekolah dan orang tua siswa, serta (6) dinas pendidikan.

pendidikan di sekolah agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja (*link and match*). Pada umumnya para lulusan sekolah dipersiapkan untuk terjun di masyarakat dan bekerja sesuai dengan keterampilan profesi dan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat (*social need*). Untuk keperluan itu dibutuhkan kerja sama dan kesepakatan/keepakatan (*consensus*) antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritik, atau saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di sekolah (M. Ahmad, dkk, 1998: 100). Oleh karena itu, relevansi antara program kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja harus benar-benar diusahakan.

*i. Fungsi kurikulum bagi penulis*

Para penulis yang berminat menulis buku pelajaran tentu harus merujuk pada kurikulum dalam menentukan pokok-pokok dan sub-sub bahasan buku pelajaran yang akan ditulis.

## **2. Peranan Kurikulum**

Pada dasarnya, kurikulum merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial-budaya suatu masyarakat. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan, mengkonservasikan, dan menafsirkan warisan nilai-nilai sosial-budaya tersebut kepada generasi muda. Bahkan kurikulum juga dapat berperan dalam mengkritisi dan mengevaluasi nilai-nilai tersebut, apakah masih relevan atau tidak untuk diwariskan kepada generasi muda dalam menghadapi kehidupan masa kini dan akan datang. Dalam konteks ini, kurikulum memiliki peranan meliputi: Peranan konservatif, Peranan kreatif, Peranan kritis dan evaluatif (M. Ahmad, dkk, 1998: 109).

*a. Peranan Konservatif*

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya dan turut menciptakan/memproduksi budaya (Sukmadinata, 2005: 33). Kebudayaan ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku, bahkan kebudayaan terwujud dan dibentuk dari perilaku manusia. Kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban dan tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak atau tindakan dilarang dan diizinkan. Semua kebudayaan yang sudah membudaya itu harus ditransmisikan/diwariskan kepada anak didik selaku generasi penerus. Oleh karena itu, semua hal itu menjadi tanggung jawab kurikulum dalam menafsirkan dan mewariskan nilai-nilai budaya yang mengandung makna dalam membina perilaku anak didik. Sekolah sebagai lembaga sosial sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku anak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi, kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang telah ada dan mapan perlu untuk ditransmisikan dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Misalnya nilai-nilai agama Islam harus dimuat dalam kurikulum sekolah karena nilai-nilai agama tersebut harus diwariskan kepada generasi umat manusia.

*b. Peranan Kreatif*

Dalam hal ini kurikulum diharuskan mampu melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif. Ini artinya kurikulum harus mendesain pengalaman belajar yang bersumber dari masyarakat dan disusun dalam bentuk mata pelajaran yang akan disajikan pada anak didik. Upaya ini dapat membantu mengembangkan semua potensi yang ada pada anak didik. Dengan demikian, kurikulum diharapkan dapat membawa para siswa menuju masyarakat yang berbudaya. Ini berarti, bahwa kurikulum harus mendorong

dan membuat para siswa berkembang daya kreatif dan inovatifnya. Sesuatu yang belum ada dan penting bagi peserta didik perlu untuk diakomodasikan dan diadaptasikan dalam kurikulum.

c. *Peranan Kritis dan Evaluatif*

Sekolah sebagai pusat transmisi nilai-nilai sosial-budaya berperan penting dalam mewariskan norma-norma budaya masyarakat. Selanjutnya, memilih unsur-unsur kebudayaan dan klasifikasinya, kemudian dievaluasi untuk dijadikan bahan-bahan pengalaman belajar yang didesain menjadi mata pelajaran. Karena itu, kurikulum amat berperan aktif sebagai kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis di mana nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi disisihkan dan nilai-nilai sosial yang masih relevan ditata untuk diorganisasikan menjadi bentuk pengalaman belajar yang mampu mengembangkan sikap kritis anak didik ke arah pembentukan pribadi yang sesuai dengan realita kehidupan di masyarakat. Jadi, kurikulum adalah alat untuk menilai dan sekaligus memperbaiki serta mengevaluasi nilai-nilai sosial-budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

### **C. Hakikat Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajari atau membelajarkannya (Wina Sanjaya, 2008: 31).

Terminologi pengembangan (*development*) menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut berlaku bagi

pengembangan kurikulum.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, jika beberapa orang tenaga kependidikan ataupun guru duduk bersama untuk membicarakan dan membahas tujuan yang hendak dicapai, bahan (materi) apa yang perlu dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana mengatur proses pembelajarannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis, dan bagaimana cara untuk mengetahui apakah semua tahap dan proses itu berjalan dan berhasil secara efektif setelah dilaksanakan, maka kegiatan seperti inilah yang disebut merancang kurikulum atau pengembangan kurikulum (Moh. Said, 2002: 104). Dengan kata lain, secara makro pengembangan kurikulum meliputi kegiatan me-rencanakan konsep kurikulum (kurikulum teoritis, *ideal-conceptual curriculum*, *written/document curriculum*), melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum teoritis yang sudah tersusun dalam praktik pembelajaran di sekolah (*actual curriculum*, *curriculum implementation*), dan mengevaluasi konsep, proses

---

<sup>7</sup> Ada empat aktivitas berkaitan dengan kurikulum ini. *Pertama*, pengembangan kurikulum yaitu suatu proses perencanaan yang menghasilkan kurikulum yang lebih baik dengan berdasarkan pada hasil-hasil penilaian dan penelitian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi pembelajaran yang lebih baik. *Kedua*, perubahan kurikulum adalah kegiatan yang sengaja dilakukan apabila salah satu atau beberapa komponen kurikulum dalam waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi perlu diperbaiki atau diubah, terutama pada aspek filosofi dan model pembelajarannya. *Ketiga*, pembinaan kurikulum, yaitu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku dengan maksud untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ideal atau potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. *Keempat*, penyempurnaan kurikulum, yaitu upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana prasarana pendukungnya, selain itu juga memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Lihat Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 38-39. Lihat juga S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 251-252, dan Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.33-34.

pelaksanaan atau penerapan, dan hasil yang dicapai atau efektifitas kurikulum tersebut. Kegiatan terakhir ini dapat dipandang sebagai evaluasi kurikulum.

Pengembangan ataupun perancangan kurikulum dapat dikatakan sebagai upaya atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau tim untuk menterjemahkan teori-teori pendidikan menjadi suatu program pembelajaran yang sistematis untuk diterapkan pada suatu sistem sekolah. Dalam sebuah kurikulum tergambar berbagai jenis ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan masa lampau dan masa kini dengan orientasi masa akan datang dalam bentuk garis-garis besar program pembelajaran yang teratur dan sistematis untuk dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah (*Wina Sanjaya, ibid*). Dengan demikian, pengembangan kurikulum merupakan upaya mengarahkan kurikulum yang berlaku ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang bersifat positif yang datang dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan peserta didik dapat menghadapi dan beradaptasi dengan masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, responsif, dan aplikatif. Pengembangan kurikulum harus diarahkan kepada hal-hal kehidupan jangka pendek dan jangka panjang (Dakir, 2004: 84).

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia

pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti : politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Adapun yang dikembangkan dari kurikulum tersebut adalah komponen-komponen kurikulum yang meliputi: komponen-komponen tujuan, materi atau isi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Misalnya kurikulum PAI di sekolah umum yang dikembangkan adalah komponen-komponen kurikulum PAI tersebut. Jadi, pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pengembangan komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, mengaitkan antar komponen kurikulum, yang mencakup tujuan, bahan atau materi, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar dan lain-lain, agar menghasilkan dokumen kurikulum yang lebih baik dengan mempertimbangkan falsafah bangsa, kebutuhan dan perubahan masyarakat, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (*dudiker*), kondisi psikologis dan karakteristik peserta didik serta perkembangan ipteks dan globalisasi.

#### **D. Faktor-Faktor Mempengaruhi Perubahan dan Pengembangan Kurikulum**

Proses pengembangan kurikulum sangat di-pengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam lembaga pendidikan. Adapun faktor-faktor mempengaruhi proses pengembangan kurikulum antara lain (Muhaimin, et. al., 2008: 24-26):

1. Visi dan misi lembaga pendidikan.

Visi lembaga pendidikan merupakan arah lembaga pendidikan jangka panjang. Sedangkan, misi merupakan tindakan atau program yang harus dilakukan lembaga pendidikan untuk dapat mencapai visi itu.

2. Faktor idealisme yang dimiliki oleh pemimpin lembaga pendidikan.

Seorang pemimpin dari organisasi apa pun akan memiliki kewenangan dan pengaruh yang cukup tinggi dalam

kepemimpinannya. Konsep idealisme yang dianut oleh seorang pemimpin akan memengaruhi berbagai perencanaan dan kebijakan pada suatu lembaga termasuk dalam kurikulum.

3. Adanya kebutuhan dari *stakeholder* lembaga pendidikan tersebut.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kegiatan utama menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, maka lembaga pendidikan harus selalu melihat tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan oleh pihak-pihak penggunaanya (*stakeholder*).

4. Ketersediaan sumber daya juga mempengaruhi kurikulum yang akan dikembangkan di sekolah atau madrasah. Ada dua sumber daya sekolah, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, seperti tanah, bangunan, anggaran, peralatan, dan berbagai alat teknologi yang ada di madrasah dan sekolah.

5. Faktor karakteristik siswa.

Karakteristik siswa dapat ditinjau dari segi usia, kondisi ekonomi, pendidikan yang sudah dialami, ataupun kondisi sosial keluarga. Berbagai kondisi tersebut merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum sebagai ide atau konsep (*ideal-conceptual curriculum*).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, Menurut Sukmadinata (2000: 58) kurikulum yang dikembangkan di sekolah paling tidak harus mengacu pada perkembangan yang terjadi di perguruan tinggi dan masyarakat serta sistem nilai yang berkembang. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum dan pengembangan ilmu kejuruan yang dikembangkan di perguruan tinggi kejuruan. Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) amat mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan kejuruan dari para guru yang dihasilkannya.

Selain perguruan tinggi, pengembangan kurikulum juga penting memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah berada. Menurut Ivan Illich (2000) akan sangat berbahaya jika kurikulum sekolah tidak memperhatikan perkembangan sosial kemasyarakatan. Sekolah akan cenderung menjadi penjajah dan mengalienasi siswa dari realitas masyarakat dan alam lingkungannya. Akibatnya, siswa menjadi gagap dan bingung berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat-nya. Sekolah sebaiknya melayani aspirasi masyarakat, memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal.

Selanjutnya, sistem nilai juga menjadi sangat penting dipahami ketika akan mengembangkan kurikulum sekolah. Semua masyarakat selalu memiliki sistem nilainya sendiri, baik sistem nilai sosial, moral, agama, budaya dan sebagainya. Sistem nilai yang akan diteruskan dan dikembangkan oleh sekolah perlu dirumuskan secara arif dan bijaksana. Masyarakat juga selalu mempunyai sistem nilai yang berbeda, sehingga formulasi sistem nilai yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum juga harus dikaji secara komprehensif.

Ada lima hal yang penting diperhatikan oleh seorang guru ketika akan mentransformasikan nilai kepada siswa.

1. Guru harus memahami varian konsep nilai yang berkembang di masyarakat.
2. Guru harus memiliki sikap demokratis, etis dan moral.
3. Guru berusaha menjadikan dirinya sebagai *uswah hasanah* dalam hal pelaksanaan nilai sehingga patut ditiru oleh siswa.
4. Guru harus menghormati dan menghargai konsep nilai lainnya.
5. Keragaman budaya dan sistem nilai harus diterima guru dengan lapang dada dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti salah satu sistem nilai tertentu.

Konsep nilai yang berkembang di masyarakat mesti diapresiasi dalam kurikulum agar bangunan kurikulum sekolah tidak mengalienasi siswa dari masyarakat dan sistem nilainya sendiri.

Di samping beberapa faktor yang telah diuraikan, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penyusunan kurikulum, yaitu sebagai berikut :

### **1) *Filsafat pendidikan***

Suatu sistem pendidikan senantiasa harus berdasarkan dan bertitik tolak dari pandangan hidup (ideologi) dari masyarakat tertentu. Pandangan hidup itu pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pandangan hidup itulah suatu sistem pendidikan disusun. Dalam konteks negara Indonesia berpijak pada pandangan hidup filsafat Pancasila. Berdasarkan pandangan hidup ini pula selanjutnya dirumuskan tujuan pendidikan nasional yang pada gilirannya menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pendidikan bersifat institusional dan tujuan kurikuler. Karena itu secara filosofis, tujuan pendidikan setiap negara berbeda-beda tergantung pada ideologi apa yang dianut oleh negara tersebut.

### **2) *Kemasyarakatan***

Setiap masyarakat memiliki kebutuhan, tuntutan, permasalahan, dan aspirasi sendiri-sendiri. Faktor itu harus jadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Sekolah dan masyarakat adalah dua institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pendidikan dan kurikulum sekolah harus senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tuntutan dan kemungkinan yang bakal terjadi pada masyarakat dan generasi mendatang harus telah diperhitungkan oleh dunia pendidikan. Sebab masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka

pendidikan dan kurikulum senantiasa merespon perubahan dan perkembangan itu.

### **3) *Pertumbuhan dan perkembangan siswa***

Para ahli pendidikan dan psikologi memandang siswa sebagai manusia potensial yang sedang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu umumnya melalui tahapan-tahapan psikologis yang hampir sama bagi setiap orang. Dalam hal ini, anak memiliki kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Faktor-faktor tersebut harus menjadi pertimbangan mendasar dalam penyusunan kurikulum. Kebutuhan siswa meliputi kebutuhan fundamental, kebutuhan sosial, kebutuhan material (jasmani) dan kebutuhan spiritual (ruhani). Berdasarkan perbedaan dan kesamaan dalam kebutuhan dan minat para siswa, maka kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan siswa itu.

### **4) *Proses belajar***

Kurikulum disusun berdasarkan proses belajar yang terjadi pada diri siswa (*child-centered*). Berbagai pandangan tentang masalah ini telah banyak dikemukakan. Dalam dunia psikologi kita mengenal berbagai aliran (teori-teori belajar) yang memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang pendidikan atau proses belajar. Karena setiap aliran itu sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahannya, maka para ahli mencoba menarik berbagai prinsip belajar yang secara umum dapat disepakati bersama. Prinsip-prinsip belajar itulah yang menjadi landasan pokok dalam penyusunan kurikulum sekolah.

### **5) *Perkembangan ipteks***

Perkembangan ipteks juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama bagi pengembangan kurikulum PAI, misalnya dampak negatif kemajuan teknologi informasi (ICT), seperti internet, telepon seluler (*handphone*) yang

memuat film-film dan gambar-gambar porno dan tindak kekerasan sangat berpengaruh bagi perkembangan moral peserta didik. Dalam hal ini kurikulum PAI harus memuat materi-materi yang dapat menangkal dampak negatif perkembangan ipteks tersebut.

#### **6) *Political will* (kemauan politik pemerintah)**

Kemauan politik (*political will*) pemerintah juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah di bidang pendidikan. Contoh pada Era Orde Baru seluruh kurikulum satuan pendidikan wajib memuat nilai-nilai pendidikan pengamalan dan penghayatan Pancasila (P-4). Pada Era Reformasi, kurikulum satuan pendidikan secara tersirat wajib memuat nilai-nilai pendidikan *civic education*, yang memuat nilai-nilai pendidikan demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender.

### **6. Globalisasi**

Perkembangan global juga ikut mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum hendaknya dirancang untuk merespon dampak positif dan negatif perkembangan global tersebut, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan globalisasi.

Jika dalam perancangan kurikulum dipengaruhi beberapa faktor di atas, maka dalam implementasinya, kurikulum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- a. Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan penjelasannya bagi pengguna di lapangan.
- b. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti kegiatan sosialisasi melalui kegiatan diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya dan kegiatan-

kegiatan yang dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan implementasi kurikulum di lapangan.

- c. Karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran (E. Mulyasa, 2005: 93-95).

## **E. Evaluasi Kurikulum**

Kurikulum merupakan bagian integral dari seluruh proses pendidikan, sedangkan evaluasi itu sendiri merupakan dasar untuk menilai kemajuan (*progres*) ke arah tujuan-tujuan kurikulum. Dengan kata lain, tercapai tidaknya tujuan-tujuan kurikulum tercermin di dalam hasil-hasil penilaian terhadap pencapaian hasil belajar dan perubahan-perubahan tingkah laku pada siswa. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti suatu kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, bagian-bagian mana yang harus dan perlu disempurnakan. Evaluasi kurikulum secara umum meliputi evaluasi konsep dokumen kurikulum dan evaluasi kegiatan implementasi kurikulum (Wina Sanjaya, 2008: 342).

Banyak ahli yang telah menyumbangkan pemikirannya tentang pengertian evaluasi kurikulum, antara lain :

- a. Menurut: Stephen Wisman dan Douglas Pidgeon dalam bukunya "*Curriculum Evaluation*" menyatakan bahwa, evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Menurut: Morrison dalam bukunya "*The School Curriculum*" menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data analisis secara sistematis, yang bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta memperbaiki metode pendidikan.
- c. Di dalam buku "*Curriculum Planning and Development*", dinyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai

kinerja pelaksanaan suatu kurikulum, yang di dalamnya terdapat tiga makna, antara lain :

1. Evaluasi tidak akan terjadi kecuali untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan.
3. Evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu (Oemar Hamalik, 2007: 253-254).

Dalam teori dan praktik pendidikan, evaluasi kurikulum merupakan suatu bidang yang berkembang dengan cepat, termasuk evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berkaitan erat dengan hal-hal berikut :

*a. Evaluasi kurikulum dan sistem pendidikan.*

Sebagai suatu bagian dari sistem evaluasi pendidikan di sekolah, secara fungsional evaluasi kurikulum juga merupakan bagian dari sistem kurikulum yang memiliki tiga fungsi, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi efek sistem kurikulum. Evaluasi kurikulum minimal berfokus pada empat bidang yaitu, evaluasi terhadap penggunaan kurikulum, desain kurikulum, hasil belajar siswa, dan sistem kurikulum.

*b. Evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum.*

Pengembangan kurikulum adalah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi. Evaluasi terhadap penyusunan dan perencanaan kurikulum sangat sulit dan rumit serta tidak memiliki kriteria. Untuk mengembangkan fungsi dan makna evaluasi kurikulum terhadap pengembangan kurikulum, ada empat keadaan yang harus dihindari, yaitu :

1. Apabila dalam desain kurikulum sama sekali tidak terdapat rancangan evaluasi, maka evaluasi tidak perlu dilaksanakan.
2. Apabila dalam proses evaluasi terjadi penyimpangan tujuan evaluasi.

3. Apabila tidak menghiraukan kesimpulan dan penilaian evaluasi yang telah ada.
4. Evaluasi sering kali digunakan sebagai alat untuk menilai peserta didik, yang justru sebenarnya harus menimbulkan kepercayaan diri pada peserta didik.

Sedangkan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut :

1. *Tujuan tertentu*, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik.
2. *Bersifat objektif*, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat, yang diperoleh melalui instrumen yang andal.
3. *Bersifat komprehensif*, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup dan komponen kurikulum.
4. *Kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan*. Di mana pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak pengawas yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penilik, orangtua bahkan siswa itu sendiri.
5. *Efisien*, artinya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang harus seimbang dengan hasil evaluasi dan materil.
6. *Berkesinambungan*, artinya peran guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk mengadakan perbaikan kurikulum baik itu dalam pelaksanaan, permasalahan dan keberhasilan kurikulum.

Di dalam teori evaluasi mengandung kerja konseptual bagi pengembangan strategi evaluasi. Oleh karena itu, perumusan konsep yang tepat akan menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Adapun strategi-strategi yang digunakan dalam evaluasi kurikulum yang dikembangkan di dalam pendidikan sebagai berikut :

1. Mutu program bergantung pada mutu keputusan yang dibuat.
2. Mutu keputusan bergantung pada kemampuan manajer untuk mengidentifikasi berbagai alternatif yang terdapat dalam berbagai situasi keputusan, melalui berbagai pertimbangan yang seksama.
3. Dalam pembuatan keputusan yang seksama, dibutuhkan informasi yang tepat dan dipercaya.
4. Pengadaan informasi tersebut memerlukan alat yang sistematis.
5. Proses pengadaan informasi yang erat hubungannya dengan konsep evaluasi yang digunakan.

Strategi yang digunakan dalam evaluasi kurikulum pendidikan berdasarkan asumsi di atas secara jelas memandang evaluasi sebagai alat analisis dalam upaya perbaikan program, dimana tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan.

Ada empat langkah evaluasi kurikulum yang berfokus pada tujuan, antara lain :

1. *Evaluasi awal* yaitu, melalui evaluasi internal yang dilaksanakan oleh pengembang kurikulum yang berhubungan dengan model desain kurikulum yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengembangan kurikulum. Kemudian, melalui evaluasi eksternal yang dilaksanakan oleh pihak lain selain pengembang kurikulum, dengan cara tes dan observasi.
2. *Evaluasi formatif* adalah proses ketika pengembang kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Evaluasi ini juga dituntut agar dilaksanakan sejak awal dan sepanjang proses pengembangan kurikulum
3. *Evaluasi sumatif* yaitu, evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa kurikulum dan diadakan setelah

pelaksanaan kurikulum untuk memeriksa efisiensi secara keseluruhan.

4. *Evaluasi jangka panjang*. Artinya evaluasi ini digunakan dengan teknik numerik dan menghasilkan kesimpulan berupa data yang diperlukan guru dan administrasi pendidikan (Oemar Hamalik, 2007: 261-262).

Dari keempat langkah evaluasi kurikulum di atas, maka rencana evaluasi kurikulum yang menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk sejumlah metode dan teknik yang sering dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Evaluasi juga tidak hanya menggunakan satu atau dua metode saja, melainkan menggunakan berbagai metode evaluasi secara terpadu. Rencana evaluasi tersebut terdiri atas beberapa komponen berikut:

1. Penentuan garis besar evaluasi dengan cara, identifikasi tingkat pembuatan keputusan, proyek situasi keputusan bagi setiap tingkat pembuatan keputusan dengan menetapkan lokasi, fokus, waktu, dan komposisi alternatifnya.
2. Pengumpulan informasi dengan cara, spesifikasi sumber-sumber informasi yang akan dikumpulkan, spesifikasi instrumen dan metode pengumpulan informasi yang diperlukan, spesifikasi kondisi dan informasi untuk dikumpulkan.
3. Organisasi informasi dengan cara, spesifikasi format informasi yang akan dikumpulkan, spesifikasi alat pengorganisasian, dan penyimpanan informasi.
4. Analisis informasi dengan cara, spesifikasi prosedur analisis yang akan dilaksanakan dan spesifikasi alat untuk melaksanakan analisis.
5. Pelaporan informasi dengan cara, penentuan pihak penerima laporan informasi, spesifikasi alat penyedia informasi pada penerima informasi, spesifikasi format laporan informasi, dan jadwal pelaporan informasi.

6. Administrasi evaluasi dengan cara, rangkuman jadwal evaluasi, penentuan staf dan berbagai tuntunan sumber, serta spesifikasi dalam melaksanakan evaluasi, dan penilaian kemampuan desain evaluasi guna menyediakan informasi *valid, reliable, credible*, dan sesuai dengan waktu yang tersedia (Oemar Hamalik, 2007: 260-261).

Dengan demikian, agar evaluasi dapat berjalan seimbang dan terus-menerus terhadap perubahan kurikulum, maka kegiatan evaluasi harus mempunyai prosedur-prosedur dan komponen-komponen, antara lain: evaluasi kebutuhan (*need*), di mana pada evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana, evaluasi masukan (*input*) yang melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Evaluasi proses (*process*), yaitu sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Evaluasi produk (*output*), yaitu evaluasi yang berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program di antaranya mengenai pencapaian tujuan pendidikan atau hasil belajar.

## **F. Filsafat Pendidikan dan Kurikulum**

Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Sebab tujuan merupakan komponen sentral bagi komponen-komponen lainnya. Tujuan mendasar kurikulum harus merujuk kepada tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan dalam kurikulum pendidikan paling tidak didasari oleh dua hal mendasar. *Pertama*, harus mempertimbangkan perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. *Kedua*, harus didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Dalam hal ini filsafat pendidikanlah yang memberi dasar dan corak serta arah tujuan pendidikan itu.

Filsafat pendidikan adalah filsafat yang bergerak di lapangan pendidikan yang mempelajari proses kehidupan dan alternatif

proses pendidikan dalam pembentukan watak. Objek kajiannya meliputi: (1) nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar pendidikan dan pandangan hidup; (2) pandangan tentang manusia sebagai peserta didik; (3) tujuan pendidikan; (4) sistem dan praktek pendidikan (teori pendidikan); (5) bahan pendidikan (Yahya Qahar, 1983: 104).

Kurikulum merupakan sarana riil untuk mengakomodasi pemikiran-pemikiran filsafat pendidikan Islam. Atau pemikiran-pemikiran filsafat itu tertuang dalam sebuah kurikulum dan tentunya dalam mencapai tujuan yang dirumuskan melalui pemikiran filsafat tadi. Filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran-pemikiran yang mendasar untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dan memilih materi yang terbaik serta mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar operasional lainnya (Langgulung, 1988: 6-12), termasuk kurikulum itu sendiri.

Sebagai dasar paling fundamental dari sebuah perancangan konsep, asas filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dalam merumuskan konsep kurikulum pendidikan. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam nuansa falsafah, yang dalam konteks modern dipahami sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman kehidupan manusia sehingga diharapkan dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis. Menurut S. Nasution, sekurang-kurangnya ada tiga dimensi kefilosafatan yang harus dipertimbangkan ketika akan merancang kurikulum, antara lain adalah falsafah negara, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai salah satu cabang dari kajian filsafat berusaha mengkaji masalah-masalah pendidikan, di mana secara filosofis kurikulum merupakan alat pemasukan (*instrumental input*) sebagai sarana mewujudkan proses kegiatan pendidikan dan berarti pula sarana mencapai tujuan pendidikan. Di sinilah kemudian dapat dilihat kaitan antara kurikulum pendidikan dengan falsafah pendidikan, di mana perbedaan paham juga mempengaruhi perbedaan falsafah pendidikan itu.

## G. Kurikulum Pendidikan Islam

Dalam beberapa kamus bahasa Arab istilah kurikulum diterjemahkan dengan kata *manhaj*, yang di dalamnya memuat seperangkat rencana pengajaran dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan (Al-Khouly, tt: 103).

Menurut Al-Syaibani (1979: 478) kata *manhaj* tersebut mengandung arti jalan yang terang, atau jalan yang dilalui oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Dalam pendidikan, jalan yang terang tersebut adalah jalan yang ditempuh oleh para pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kurikulum merupakan bagian dari sarana pendidikan untuk mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik. Keduanya sama-sama terlibat “belajar” dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan pengertian kurikulum sebagaimana yang telah diuraikan di bagian awal bab ini, kurikulum pendidikan Islam sebenarnya merupakan segenap program pendidikan yang dibangun berdasarkan konsep Islam. Kurikulum pendidikan Islam secara ideal bertitik tolak dari tujuan ideal pendidikan Islam itu sendiri (Abdullah Idi, 1999: 16). Tujuan umum pendidikan Islam adalah seperti yang tersimpul dalam surat Az-Zariat ayat 56, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT dalam arti yang luas. Artinya tujuan pendidikan Islam, secara filosofis tidak bisa terlepas dari hakikat tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan penciptaan manusia di atas (Jalal, 1977: 79) Menurut Syahminan Zaini tujuan pendidikan Islam memang identik dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini (Zaini, 1986: 4).

Hal tersebut di atas, senada dengan penjelasan Hasan Langgulung, menurutnya membicarakan tujuan pendidikan Islam berarti membicarakan tujuan hidup, sebab menurutnya tujuan hidup ini sebagaimana yang tercermin dalam (Q. S. 6: 162) yang berbunyi sebagai berikut: Katakanlah : “*sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam*”.

Oleh karena itu, lanjut Langgulung pembicaraan tentang tujuan pendidikan Islam mengharuskan kita membicarakan tentang sifat-sifat manusia dalam pandangan Islam pula, sebab pada manusia itulah tertanam cita-cita yang ingin dicapai melalui pendidikan. Dengan kata lain, manusia yang bagaimana yang ingin dibentuk melalui pendidikan Islam itu (Langgulung, 1995: 33).

Dengan demikian, tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah menyiapkan dan menumbuhkan serta membina manusia takwa sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam hal ini, menurut Arifin adalah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada sang Khaliknya dengan sikap dan kepribadian yang bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupannya untuk mencari keridhaan-Nya (H.M Arifin, 1993: 237).

Berdasarkan tujuan pendidikan Islam di atas, penyusunan kurikulum pendidikan Islam, menurut An-Nahlawi (1995: 196-199) juga harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu,:

1. Kurikulum pendidikan Islam harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia yang bertujuan untuk mensucikan dan memelihara dirinya dari penyimpangan guna menjaga kesucian fitrahnya itu.
2. Kurikulum pendidikan Islam harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental, memurnikan ketauhidan dan ketaatan beribadah hanya kepada Allah SWT.
3. Kurikulum pendidikan Islam harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dalam karakteristik, usia, tingkat pemahaman, jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dicanangkan dalam kurikulum.
4. Aplikatif, kegiatan dan contoh, atau muatan kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan perkembangan masyarakat yang realistik, terutama menyangkut

masalah kehidupan, dan harus bertitik tolak dari keislaman yang ideal, seperti bangga menjadi umat Islam dan lain-lain.

5. Sistem kurikulum pendidikan Islam harus terbebas dari kontradiksi, mengacu pada kesatuan Islam, dan selaras dengan integritas psikologis yang telah Allah SWT ciptakan untuk manusia, serta selaras dengan kesatuan pengalaman yang hendak diberikan kepada anak didik, baik yang berhubungan dengan sunnah, kaedah, sistem maupun realitas alam semesta.
6. Kurikulum pendidikan Islam harus bersifat realistik, sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan negara yang akan menerapkannya serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan negara itu sendiri.

Di samping itu, menurut al-Syaibani (1979: 486) kurikulum pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Kurikulum pendidikan Islam menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Agama dan akhlak ini diambil dari al-Qur'an dan Hadits serta keteladanan dari para tokoh yang shaleh terdahulu.
2. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan pengembangan seluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal dan ruhani.
3. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan ruhani.
4. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan seni, seperti seni ukir, pahat, tulisan indah, gambar atau lukisan dan sejenisnya.
5. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom* = kearifan lokal).
6. Kurikulum pendidikan Islam harus memuat metode yang elastis, sehingga dapat diadaptasikan ke dalam

berbagai kondisi dan lingkungan di mana kurikulum itu diterapkan.

7. Kurikulum pendidikan Islam harus memuat unsur-unsur yang sesuai dengan berbagai tingkatan usia anak serta memuat dan memperhatikan segi perilaku islami yang bersifat aktivitas langsung, seperti: berjihad dan dakwah Islam, serta membangun masyarakat muslim dalam lingkungan persekolahan sehingga dapat mewujudkan ajaran-ajaran Islam dan syi'arnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Di samping beberapa karakteristik yang telah diuraikan di atas, dalam penyusunan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam harus memuat nilai-nilai yang wajib diserap oleh anak didik, yaitu: nilai-nilai *ilahiyyah* yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran yang absolut dan universal, abadi dan bersifat futuristik (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 187). Dengan kata lain, yang menjadi pokok dari materi kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Dengan berintikan nilai-nilai tauhid tersebut diharapkan mereka senantiasa terbimbing ke arah dan kondisi yang sejalan dengan hakikat penciptaannya, sebagai hamba Allah SWT (Usman Said dan Jalaluddin, 1994: 48). Sebab tauhid berisikan nilai-nilai fundamental yang mendasari seluruh aspek kehidupan manusia.

Sehubungan dengan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam di atas, Muhammad Fadhil Al-Jamaly memperincikan sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin dan Usman Said (1994: 48), merumuskan sebagai berikut: (1) larangan mempersekutukan Allah; (2) berbuat baik kepada kedua orang tua; (3) memelihara, mendidik dan membimbing anak sebagai tanggung jawab terhadap amanat Allah; (4) menjauhi perbuatan keji dalam sikap lahir dan bathin; (5) menjauhi permusuhan, tindakan munkar dan makar; (6) menyantuni anak yatim dan memelihara hartanya; (7) tidak melakukan perbuatan di luar kemampuan; (8) berlaku jujur dan

adil; (9) menepati janji dan menunaikan perintah Allah; (10) berpegang teguh pada ketentuan hukum Allah.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam memuat aspek-aspek yang ideal dan esensial -spiritual dan moral- di samping aspek-aspek lain yang mendorong semangat untuk berjihad dan berdakwah guna mewujudkan “masyarakat dan individu madani”, yaitu masyarakat dan individu yang memiliki integritas spiritual dan moral, serta integritas intelektual dan sosial. Aspek spiritual dan moral harus menjadi aspek yang fundamental dalam muatan kurikulum pendidikan Islam. Sebab keagungan masyarakat di era nabi Muhammad SAW dan para sahabat besar yang menjadi rujukan bagi pembangunan masyarakat madani hanyalah terletak pada ketinggian moral dan kebaktian amal sosialnya.

## H. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap rentang waktu 5 – 10 tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kurikulum yang pernah diberlakukan secara nasional di Indonesia dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut<sup>6</sup>:

*Tabel Kronologis Perkembangan Kurikulum di Indonesia*

Tahun	Kurikulum	Keterangan
1947	Rencana Pelajaran 1947	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.</li><li>• Istilah kurikulum masih belum digunakan. Sementara istilah yang digunakan adalah Rencana Pelajaran</li></ul>

---

<sup>6</sup> Lihat Abdullah Idi, Kunandar, Suparlan, Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.33-34.

1954	Rencana Pelajaran 1954	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran 1947.</li> </ul>
1968	Kurikulum 1968 SR 16 mp, SMP 17 mp, SMA 18 mp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, dan beberapa cabang ilmu sosial mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (<i>Social Studies</i>). Beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, dan sebagainya mengalami fusi menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains.</li> </ul>
1975	Kurikulum 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat rinci.</li> </ul>
1984	Kurikulum 1984, 1975-1984 SD 11 mp, SMP 12 mp, SMA 15 mp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975</li> </ul>
1994	Kurikulum 1994, 1994 sd.1999 suplemen 1994 penyesuaian materi pelajaran ppkn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984</li> </ul>
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini</li> </ul>
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KBK sering disebut sebagai jiwa KTSP, karena KTSP sesungguhnya filosofinya sama dengan KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).</li> </ul>
2013	Kurikulum 2013	: kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP 2006, penyempurnaan terutama pada proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
2022	Kurikulum 2022	: kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah kurikulum merdeka belajar dengan lebih menekankan pada minat, bakat, dan konteks satuan pendidikan.

### **Pertanyaan dan Tugas**

1. Jelaskan definisi kurikulum dalam arti sempit dan luas serta implikasi pemahaman dan penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran!
2. Jelaskan fungsi dan peranan kurikulum dalam dunia pendidikan!
3. Jelaskan hakikat pengembangan kurikulum dan ruang lingkupnya!
4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum!
5. Jelaskan pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum!
6. Jelaskan prinsip-prinsip dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam!
7. Jelaskan fungsi dan hubungan filsafat pendidikan terhadap kurikulum!
8. Jelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia !



## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, PENDEKATAN, DAN PROSES PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Bab ini memaparkan tentang asas-asas dan prinsip-prinsip dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Hal ini penting untuk diketahui dan dipahami agar dapat menghasilkan konsep kurikulum yang baik dan berdaya guna bagi pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa calon guru diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai praktis dari beberapa pokok bahasan tersebut dalam dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran, terutama pada pengembangan kurikulum tingkat sekolah dan proses pembelajaran di kelas.

#### **A. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum**

Asas berarti dasar, landasan, sandaran, kerangka utama pijakan sesuatu. Dalam hal ini dapat dimaknai sebagai dasar, landasan, sandaran, kerangka utama dalam perancangan dan pengembangan kurikulum. Secara teoritis-filosofis penyusunan sebuah kurikulum idealnya berdasarkan pada asas-asas dan orientasi tertentu. Perbedaan ideologi, falsafah hidup dan sosial-budaya (*social-cultural*) serta agama yang dianut oleh suatu bangsa akan memberikan corak dan orientasi tersendiri dalam penyusunan kurikulum pendidikannya. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, berdasarkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian mendalam. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam membangun sebuah gedung, jika landasan bangunan sebuah gedung tersebut tidak kokoh, maka yang akan ambruk adalah gedung itu sendiri. Demikian juga dengan landasan pendidikan, khususnya jika landasan yang menjadi fondasi bangunan kurikulum itu lemah, maka yang akan ambruk adalah manusia (siswanya) sebagai *output* dari pendidikan itu (Sukmadinata, 2000: 38). Hal ini menunjukkan pentingnya pemikiran filsafat pendidikan sebagai landasan mengembangkan kurikulum.

Oleh karena itu, ada beberapa landasan utama yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum pendidikan. Asas-asas tersebut seperti yang dikemukakan oleh S. Nasution (1994: 11-14) meliputi asas filosofis, sosiologis, psikologis dan organisatoris. Selain empat asas tersebut Sukmadinata menambahkan satu lagi, yaitu asas perkembangan ilmu dan teknologi (Sukmadinata, 2000: 38).

Berikut ini diuraikan mengenai beberapa landasan penyusunan kurikulum tersebut.

### **1. Asas Filosofis**

Asas filosofis merupakan asas pemberi arah ke mana pendidikan suatu negara harus berlabuh. Jika dikaitkan dengan sumber daya manusia (SDM), manusia Indonesia yang bagaimana yang ingin dibentuk. Sekolah bertujuan mendidik siswa menjadi manusia yang “baik”. Kriteria dan ukuran “baik” pada hakikatnya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia ini, baik negara terbelakang (*under developing countries*), maupun negara berkembang (*developing countries*), negara-negara maju (*developed countries*) memiliki falsafah atau pandangan ideal tentang pendidikannya. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi falsafah<sup>1</sup> dan dasar pendidikannya adalah Pancasila

---

<sup>1</sup> Menurut Henderson (1959) dalam Burhanuddin Salam, filsafat dapat berarti sebagai pendirian hidup, sebagai pandangan hidup (ideologi), sebagaimana Falsafah Pancasila di atas. Pandangan hidup adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dunianya yang menjadi panduan untuk meraih kehidupan yang bermakna. Cara pandang tersebut berfungsi sebagai sarana untuk merespon dan menerangkan permasalahan eksistensial kehidupan seperti, Tuhan, manusia, dan dunia (alam semesta/kosmologi), tentang waktu, pandangan tentang nasib dan usaha, pandangan tentang manusia, pandangan tentang hantu, dan pandangan tentang leluhur. Setiap masyarakat pasti memiliki pandangan hidupnya sendiri-sendiri. Selain itu, Burhanuddin Salam menambahkan ada filsafat sebagai metode berpikir kritis, logis, sistematis dan mendalam, filsafat sebagai suatu rumpun *problem*, filsafat sebagai sistem pemikiran, filsafat sebagai aliran atau teori.

dan UUD 1945.<sup>2</sup> Pancasila harus dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa, maka berarti Pancasila ditempatkan pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua pihak perlu menggali kembali dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Salah satunya adalah membahas masalah-masalah di bidang pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Dalam bidang pendidikan, filsafat antara lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang : apakah hakikat manusia, terutama hakikat anak didik dan sifat-sifatnya, apakah sumber kebenaran dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pegangan hidup, apa yang baik dan yang buruk itu, apa hidup yang baik, apa yang sebaiknya diajarkan kepada anak didik, apa peranan sekolah dalam masyarakat, apa peran guru dalam proses belajar mengajar, dan lain-lain (Nasution, 1994: 22).

Semua pertanyaan itu ditelaah dengan menggunakan cara kerja atau prinsip-prinsip filsafat, yang kemudian dinamakan filsafat pendidikan yang merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan bertugas memberikan arah dan metodologi dalam penyelenggaraan praktik-praktik pendidikan.

---

Lihat burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, Rineka Cipta, 1997, hlm. 33-37. Dalam konteks pendidikan mungkin lebih tepat digunakan filsafat sebagai metode untuk mencari solusi dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan serta menentukan arah pendidikan.

<sup>2</sup> Dalam UUSPN No. 2 Th. 1989 Bab I pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; selanjutnya dalam bab II pasal 2 juga disinyalir bahwa " Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Hal ini juga ditegaskan dalam UUSPN No. 20 Th. 2003 pada bab dan pasal yang sama.

Perbedaan falsafah hidup dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam merumuskan tujuan pendidikan, sekaligus juga program pembelajarannya, bahkan mungkin juga berbeda dalam hal strategi atau proses pembelajaran dan penilaiannya. Pendidikan di negara otokratis akan berbeda dengan pendidikan di negara demokratis, pendidikan di negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Budha akan berlainan dengan pendidikan yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam atau Kristen, dan seterusnya. Dengan kata lain, pendidikan di negara yang agamis berbeda dengan pendidikan di negara yang sekularis.

Dalam realitas masyarakatnya yang amat plural seperti Indonesia, keberadaan falsafah Pancasila harus dijadikan kerangka utama (*mainstream*) dalam merumuskan tujuan dan menyusun kurikulum pendidikannya. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan yang termuat dalam kurikulum berkaitan erat dengan falsafah bangsa dan negara, terutama dalam hal menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formalnya (Nasution, 1994: 12). Dalam hal ini, asas filosofis berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pemikiran filsafat pendidikan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum. Dalam hal ini pemikiran filsafat pendidikan sangat berpengaruh dalam menentukan corak dan model kurikulum yang akan dikembangkan.

Ada beberapa aliran pemikiran filsafat pendidikan yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum.

*Pertama*, **Aliran Progressivisme** --terkadang disebut **Pragmatisme**-- memiliki pandangan hidup yang bersifat bebas dan fleksibel, dinamis, dan bersikap terbuka (*open minded*). Dengan demikian, aliran ini menolak segala bentuk otoritarianisme dan absolutisme. Oleh karena itu, Progressivisme berpendapat bahwa manusia dengan kekuatan-kekuatan alamiahnya (*natural potency*) yang

dibawanya sejak lahir mampu untuk mengatasi semua persoalan hidup dan kehidupannya. Tetapi kekuatan-kekuatan itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Dalam bidang pendidikan aliran ini memiliki pandangan sebagai berikut, yaitu: tujuan umum pendidikannya adalah membentuk masyarakat yang demokratis. Isi program pendidikannya lebih mengutamakan bidang studi yang berguna dan langsung dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat (Zuhairini, et. al.,1995: 23-24). Muatan kurikulum pembelajarannya mengarah pada pengembangan minat, intelektual dan keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan dan realitas kehidupan masyarakat, disusun secara terintegrasi (*integrated curriculum*) dengan metode pembelajaran lebih menekankan pada praktek di lapangan (Noor Syam, 1986: 253), dengan memberi pengalaman-pengalaman paraktis-empiris kepada peserta didik.

**Kedua, Aliran Esensialisme.** Aliran Essensialisme merupakan perpaduan ide-ide filsafat Idealisme dan Realisme. Oleh karena itu, pandangannya tentang pendidikan diwarnai dan dipengaruhi oleh kedua aliran filsafat tersebut. Menurut aliran Esensialisme pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai kebudayaan lama yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, nilai-nilai budaya warisan sejarah masa lampau yang telah teruji kebaikan-kebaikannya oleh segala zaman. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam ajaran para filosof yang agung (Noor Syam, 1986: 261). Dengan demikian, pandangan pendidikannya lebih bersifat humanis dan bertujuan membentuk pribadi yang dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Zuhairini, et. al.,1995: 25).

**Ketiga, Aliran Perennialisme.** Pandangannya tentang pendidikan hampir mirip dengan Essensialisme, yaitu lebih berpegang pada nilai-nilai kebudayaan masa silam, yang bersifat ideal dan universal, kekal dan abadi. Menurut pandangan aliran ini pendidikan diarahkan untuk mengatasi krisis yang melanda masyarakat modern sekarang ini, pendidikan perlu mengkaji kembali kejayaan kebudayaan dan

peradaban masa lampau. Dalam pandangan Perennialisme tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif dalam semua aspek kehidupan (Zuhairini, et. al.,1995: 27).

Asas-asas filsafat Perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai dua sayap. *Pertama*, Perennialisme teologis yang bersumber pada ajaran gereja Katolik Thomas Aquinas. *Kedua*, Perennialisme sekuler yang berpegang pada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles (Noor Syam, 1986: 297).

*Keempat*, aliran filsafat pendidikan lebih radikal yaitu **Aliran Eksistensialisme**. Aliran ini tidak menghendaki aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuknya. Mereka menolak bentuk-bentuk pendidikan yang ada sekarang (Zuhairini, et. al.,1995: 31). Yang mereka inginkan adalah “pendidikan pembebasan”, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Ivan Illich, Paulo Freire dan para pengikut mereka lainnya. Tujuan pendidikannya adalah mengembangkan eksistensi dan potensi yang dimiliki oleh pribadi manusia bersama kebebasannya. Oleh karena itu, pendidikannya lebih berpusat pada manusia itu sendiri dengan memberikan kebebasan pendidikan yang seluas-luasnya. Selain empat aliran filsafat pendidikan yang telah dikemukakan masih ada beberapa aliran lagi yang tidak sempat dikemukakan dalam tulisan ini.<sup>3</sup> Beberapa aliran filsafat pendidikan tersebut

---

<sup>3</sup> Untuk penjelasan yang lebih akurat dan mendalam tentang beberapa aliran filsafat pendidikan di atas, baca Salman Ali, *Lima Aliran Filsafat Pendidikan Populer masa Kini dan Filsafat Pendidikan Islam Menurut Al-Qur'an*, dalam Ringkasan Hasil Penelitian IAIN 1983/1984, Dirjen Binbaga Islam Depag. RI, Jakarta, 1986; Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992; Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, Kota Kembang, Yogyakarta, 1986; Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986, Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik: Dasar-dasar Ilmu Mendidik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Sedangkan untuk melihat perbandingan antara aliran filsafat pendidikan Barat populer tersebut dengan filsafat pendidikan Islam, baca Salman Ali, , *Lima Aliran Filsafat pendidikan Populer Masa Kini dan Filsafat*

sangat berpengaruh terhadap corak, jenis, dan model kurikulum yang akan dikembangkan. Sebab perancangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pendidikan yang dianut oleh tim pengembang kurikulum. Hal ini selanjutnya menentukan arah program pendidikan dan pembelajaran yang akan dikembangkan.

Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Ada empat fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan; (2) filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; (3) filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan; (4) melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan.

## **2. Asas Sosiol-Budaya (*Social-Culture*)**

Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristiknya dan kekayaan budayanya, menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kebudayaan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum pendidikan pada masyarakat agraris atau industri, modern atau tradisional, daerah pegunungan atau pantai, kota metropolitan atau daerah pariwisata, masing-masing harus berbeda ciri khas muatan kurikulumnya agar sesuai dan relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam merancang kurikulum tidak boleh mengabaikan tiga sifat penting yang ada dalam pendidikan. *Pertama*, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal itu disebabkan

---

*Pendidikan Islam Menurut Al-Qur'an dalam Ringkasan Hasil Penelitian LAIN 1983/1984 (Pendidikan Islam di Indonesia)*, Dirjen Binbaga Islam, Depag. RI., Jakarta, 1986, hlm. 19-57.

karena pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan harapan masyarakat. Karena tujuan pendidikan mengandung nilai, maka isi pendidikan harus memuat nilai-nilai dan proses pendidikan itu juga harus bersifat membina dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. *Kedua*, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai warga maupun sebagai karyawan. Tuntutan sosial merupakan harapan orang dewasa agar anak mampu bertingkah laku, berbuat dan hidup dengan baik dalam berbagai situasi di lingkungan masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain-lain (Sukmadinata, 2000: 58-59). Perkembangan, perubahan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan menuntut kurikulum pendidikan agar dapat melayani, mengadaptasi, dan mengakomodasi sekaligus mengantisipasi tuntutan dan perubahan itu.

Di samping itu, setiap lingkungan masyarakat memiliki sistem sosial budaya yang berbeda. Sistem sosial budaya ini mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat, antara anggota dan lembaga, serta antara lembaga dan lembaga. Salah satu aspek yang cukup penting dalam sistem sosial budaya tersebut adalah tatanan nilai-nilai. Tatanan nilai merupakan seperangkat ketentuan, peraturan, hukum, moral yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, budaya, kehidupan politik, maupun

dari segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga selalu berkembang, dan mungkin pada suatu saat perkembangan begitu drastis, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan bahkan konflik. Konflik nilai bisa juga diakibatkan karena adanya perbedaan sudut pandang, adanya variasi sumber-sumber nilai tersebut (Sukmadinata, 2000: 59).

Berkaitan dengan hal di atas, asas sosiologis diperlukan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat tersebut (*the legitimate demands of society*). Dalam hal ini, kurikulum pendidikan memegang peran penting dalam mengakomodasi semua aspirasi dan inspirasi yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam hal ini kita sering menemukan kesulitan mengenai bentuk-bentuk kebudayaan macam apa yang patut disampaikan serta ke arah mana proses sosialisasinya, dan bentuk masyarakat yang bagaimana yang ingin direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini tidak mudah untuk dikaji, sebab bila dilihat dari aspek sosial-budaya tuntutan kehidupan masyarakat itu sangat kompleks. Sebab di dalamnya terdapat tata kehidupan yang beraneka ragam, kepentingan antar individu berbeda-beda, dan masyarakat itu sendiri selalu mengalami perubahan dan perkembangan (Abu Ahmadi dan Uhbiyati, 1991: 225).

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat pluralis dari aspek sosial-budaya (*social-culture*). Dalam menanggapi perbedaan kondisi geografis dan sosial-budaya yang pluralis tersebut, tampaknya memang sangat urgen diberlakukannya penerapan otonomi daerah dan otonomi pendidikan, terutama dalam menentukan kurikulumnya. Dengan kata lain, dalam konteks ini selain harus ada kurikulum secara nasional, juga harus ada muatan kurikulum pengembangan potensi daerah, kurikulum muatan lokal (mulok). Dengan demikian, potensi dan aspirasi daerah secara geografis dan sosio-kultural dapat

terakomodasi dan terapresiasi. Dalam konteks ini, menurut Hasim (2001) tampaknya diperlukan paradigma pendidikan yang berwawasan multikultural, yang di dalamnya memuat unsur-unsur toleransi dan fleksibilitas. Dengan demikian, anak bangsa ini memiliki sikap yang mampu menghargai pendapat, pandangan, dan kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri; serta diharapkan anak bangsa memiliki keluwesan sikap, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan varian latar belakang budaya, bahasa, dan agama sebagai realita tak terbantahkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam hal ini, fungsi kurikulum adalah memberikan informasi dan pemahaman tentang nilai-nilai budaya bangsa agar tetap terpelihara hubungan yang harmonis sehingga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga.

Selain beberapa hal di atas, pengaruh per-kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sering menyebabkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat menjadi berkembang dan berubah, sehinggauntutannya dari masa ke masa tidak selalu sama (Ali, 1989: 12-13). Bahkan perubahan masyarakat sendiri seringkali lebih cepat daripada prediksi dan antisipasi dunia pendidikan. Oleh karena itu, para penyusun atau pengembang kurikulum (*curriculum developers*) hendaknya mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal berikut: 1) mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, dan lain-lain; 2) menganalisis masyarakat di mana sekolah berada; 3) menganalisis syarat dan tuntutan terhadap dunia kerja; dan 4) menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat (Abdullah Idi, 1999: 64). Selain itu, para pemikir dan pengembang kurikulum pendidikan harus mampu membuat prediksi-prediksi jangka panjang dan jauh ke depan serta menangkap arah kecenderungan tuntutan, kebutuhan, dan perubahan masyarakat di masa akan datang (futuristik)

agar produk pendidikan tetap relevan dengan tuntutan kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan ini, kurikulum dianggap sebagai rekonstruksi sosial. Berkaitan dengan hal ini, menurut S. Nasution terdapat dua aliran, yaitu aliran bersifat *adaptif* dan *reformatif*. Aliran pertama menginginkan agar individu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang dengan harapan agar ia mampu mempertahankan hidupnya dalam dunia yang serba dinamis dan tidak stabil itu. Untuk itu, kurikulum perlu dikembangkan berdasarkan pada masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik yang berkembang sekarang agar peserta didik lebih mampu menghadapinya nanti. Aliran kedua disebut "*futureologist*", yang melihat kemungkinan bagi manusia untuk mengadakan pilihan tentang masyarakat yang akan dibentuk, masyarakat yang ideal (S. Nasution, 1993: 24-25). Asas sosiologis inilah tampaknya yang selalu menuntut perubahan dan perbaikan kurikulum. Sebab itu, kurikulum harus bersifat adaptif dan antisipatoris.

### **3. Asas Psikologis**

Untuk menyusun sebuah kurikulum juga harus dipertimbangkan aspek psikologis anak didik. Dalam hal ini, asas psikologis berperan memberikan berbagai prinsip-prinsip tentang perkembangan fisik dan psikologis anak didik dalam berbagai aspeknya, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat diserap dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tingkat perkembangan dan pendidikannya (S. Nasution, 1994: 11-14). Tingkat perkembangan tersebut berkaitan dengan bakat-bakat jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individu anak didik, minat dan kecakapannya. Aspek-aspek keilmuan (pelajaran) dan keterampilan yang dikembangkan harus sesuai dengan urutan psikologisnya dan kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Ada dua bidang psikologi yang mendasari penyusunan dan pengembangan kurikulum. *Pertama*, psikologi anak atau psikologi perkembangan. Dalam hal ini, teori-teori dan periodisasi tentang perkembangan anak harus dikuasai. Setiap anak mengalami dan memiliki tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, mental, dan spiritual yang berbeda, serta berbeda pula dalam cara belajarnya.

Perbedaan karakteristik dan kondisi psikologis<sup>4</sup> tersebut disebabkan karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial-budaya, juga karena faktor-faktor pembawaan sejak lahir. Kondisi ini pun berbeda pula bergantung pada konteks, peranan, dan status seorang individu di antara individu-individu lainnya. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik dan tingkat pendidikannya. Interaksi pendidikan di sekolah berbeda dengan di luar sekolah, interaksi antara siswa dan guru pada jenjang sekolah dasar berbeda dengan jenjang sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas (Sukmadinata, 2000: 45). Perbedaan-perbedaan tersebut sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.

*Kedua*, psikologi belajar. Dalam hal ini penguasaan terhadap teori-teori belajar dan pembelajaran dan psikologi belajar sangat diperlukan. Menurut pandangan psikologi belajar pada dasarnya anak-anak itu dapat dididik, dibelajarkan, dan diberikan sejumlah materi pelajaran dan pengetahuan. Selain itu, pada dasarnya anak-anak itu dapat mengubah sikapnya, dan dapat menerima norma-norma, serta dapat mempelajari

---

<sup>4</sup> Menurut Sukmadinata yang dimaksud dengan kondisi psikologis tersebut adalah karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 45.

keterampilan-keterampilan. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan-kemampuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kurikulum memberikan peluang belajar yang besar bagi anak didik, dan bagaimana menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan (*quantum learning*) sehingga dapat memberi hasil pembelajaran yang memuaskan. Ada beberapa aliran psikologi belajar<sup>5</sup> yang sering dijadikan landasan pengembangan kurikulum, yaitu: teori belajar psikologi klasik, teori belajar psikologi daya, teori belajar psikologi mental *stage*, teori belajar psikologi behavioristik, teori belajar psikologi Gestalt. Masing-masing teori tersebut memiliki pandangan berbeda tentang belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, teori-teori psikologi belajar tersebut sangat berperan dalam menentukan proses dan cara belajar yang akan dialami dan dilaksanakan peserta didik dalam kurikulum yang akan diterapkan. Asas psikologis ini berpengaruh terhadap penentuan bahan belajar, strategi dan pendekatan belajar dalam kurikulum.

Dalam memilih pengalaman belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, teori-teori kognitif, pengembangan emosional, dinamika kelompok, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model formasi sikap dan perubahan, dan mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman-pengalaman belajar. Untuk merencanakan suatu kurikulum, sangat penting memiliki teori bagaimana pembelajaran ditentukan dan bagaimana kondisi pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih efisien. Oleh karena itu, asas psikologis diperlukan dalam pengembangan kurikulum.

---

<sup>5</sup> Uraian lengkap dan aplikatif tentang aliran psikologi belajar ini, dapat dibaca dalam C. Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

#### **4. Asas Organisatoris**

Yang dimaksud dengan asas ini adalah pendekatan mengorganisasikan atau menyusun bahan pembelajaran dalam sebuah kurikulum, yaitu bagaimana mengorganisasikan bahan (materi) kurikulum itu agar anak didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, muatan kurikulum atau bahan pembelajaran diorganisasikan atau disusun secara berurutan (*sequence*) dan sistematis berdasarkan: topik, tema, kronologi, konsep, isu, dan logika. Misalnya materi bahan pembelajaran dalam kurikulum tersebut disusun dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkrit kepada yang abstrak, dan dari ranah (*domain*) tingkat rendah kepada tingkat tinggi, kognitif, afektif ataupun psikomotorik (Abdullah Idi, 1999: 74), serta tidak mengabaikan keterkaitan dan kesinambungan hubungan masing-masing aspek dan tingkatan yang telah disebutkan itu.

#### **5. Asas Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (ipteks)**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berfikir manusia telah membawa manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun demikian, segala kemajuan yang telah mampu diraih oleh umat manusia itu, bukan tanpa masalah. Pada kenyataannya terdapat berbagai efek negatif yang justru sangat mencemaskan manusia itu sendiri.

Pendidikan, selain dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan kondisi sosial-budaya masyarakat, juga mendapat pengaruh cukup besar dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, misalnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, baik yang berupa media massa/cetak maupun media elektronik, keduanya sangat berpengaruh (positif dan negatif) terhadap pendidikan. Begitu juga cara pandang masyarakat terhadap seni. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut muatan kurikulum pendidikan agar

lebih fleksibel dan akomodatif serta antisipatif. Sebab perkembangan ipteks sangat berpengaruh pula pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan persoalan-persoalan baru yang menuntut adanya pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan baru yang dikembangkan melalui pendidikan (Sukmadinata, 2000: 78). Oleh karena itu, perkembangan ipteks hendaknya juga menjadi dasar dan pertimbangan penting dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Dalam konteks PAI, setidaknya tujuan dan muatan materi kurikulum PAI harus mengantisipasi dan memfilter dampak negatif kemajuan ipteks tersebut.

## **B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa kurikulum dalam pandangan luas adalah lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Kurikulum adalah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Di dalam pendidikan, kegiatan dilakukan siswa yang dapat memberikan pengalaman belajar, atau dapat dianggap sebagai pengalaman belajar, seperti berkebun, olah raga, pramuka, dan pergaulan, selain mempelajari bidang studi, semuanya itu merupakan pengalaman belajar yang bermanfaat (Ahmad Tafsir, 1991: 52). Hal ini hendaknya dipandang sebagai kurikulum dalam arti luas. Paradigma ini penting dimiliki oleh guru atau mahasiswa calon guru agar tidak terjebak pada proses pembelajaran yang serba formalitas dan verbalistik.

Ketika sebuah kurikulum tidak berjalan dan tidak sesuai lagi dengan tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu usaha pengembangan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah, kebutuhan dunia material dan teknikal, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Secara terminologis, *prinsip* lazim diartikan sebagai “kaidah” yang menjiwai sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut prinsip pengembangan kurikulum berarti kaidah-kaidah yang menjiwai

penyusunan dan pengembangan kurikulum (Baego Ishak, 1998: 70). Dalam hal ini, prinsip merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang akan menjiwai suatu kurikulum.

Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang perlu dipahami, yaitu:

a. *Prinsip berorientasi pada tujuan.*

Prinsip ini maksudnya pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya tujuan pendidikan nasional. Prinsip berorientasi pada tujuan merupakan prinsip utama dan pertama dalam kerangka kurikulum.

b. *Prinsip pendidikan seumur hidup.*

Prinsip ini maksudnya sekolah tidak hanya memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pada saat peserta didik tamat dari sekolahnya, tetapi juga memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan dirinya sepanjang hidup.

c. *Prinsip relevansi.*

Prinsip relevansi maksudnya kurikulum harus menghasilkan kualifikasi *output* yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Artinya, lulusan pendidikan berguna secara fungsional bagi masyarakat. Di samping itu, kurikulum juga harus sesuai dengan lingkungan kehidupan peserta didik, relevan dengan kehidupan kekinian dan akan datang, dan relevan dengan perkembangan ipteks. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat *anticipatory*. Selain itu, kurikulum juga harus memiliki relevansi kuat antar komponen-komponennya. Prinsip relevansi pendidikan menunjuk kepada dasar pikiran bahwa pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik, serta serasi dengan arah pembangunan dan usaha pembaruan pendidikan di Indonesia.

d. *Prinsip efektivitas dan efisien.*

Prinsip ini maksudnya kurikulum harus efektif dalam kaitannya dengan proses kegiatan pembelajaran (mengajar guru dan belajar siswa) dan pencapaian tujuan pendidikan, serta harus efisien dalam kaitannya dengan biaya (*cost*), waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam proses dan pencapaian tujuan tersebut.

e. *Prinsip fleksibilitas.*

Maksudnya kurikulum tidak boleh kaku, mudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, kurikulum harus memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik dan guru dalam memilih program dan mengembangkan proses pembelajaran.

f. *Prinsip kesinambungan (kontinuitas).*

Prinsip ini maksudnya kurikulum harus memiliki hubungan dan kesinambungan dengan jenis dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan bidang studi yang lainnya (Subandijah, 1993: 48-54). Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam mengembangkan sebuah rancangan konsep kurikulum.

Selain prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut di atas, Baego Ishak (1998) mengemukakan dan menjelaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip integralitas (keterpaduan).

Prinsip ini berarti kurikulum yang dikembangkan tersebut berisi peluang untuk menghasilkan manusia seutuhnya, yang mengalami perkembangan jasmani dan ruhani secara harmonis. Begitu pula aspek jiwa berkembang secara harmonis, seperti pikiran, kemauan, perasaan (emosi) dan aspek kemampuan sosial.

2. Prinsip objektivitas.

Prinsip objektivitas ialah kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan tatanan kebenaran ilmiah, seperti: sesuai dengan teori-teori, prinsip-prinsip, teknik dan

prosedur yang diakui kebenarannya oleh ilmu kurikulum termasuk pengembangan kurikulum dan ilmu-ilmu bantu dalam pengembangan kurikulum, seperti Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi.

3. Prinsip sinkronisasi.

Prinsip Sinkronisasi berarti :

- a. Semua kegiatan dalam upaya pengembangan kurikulum harus seirama, searah dan saling menunjang untuk pencapaian tujuan.
- b. Kurikulum yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan kurikulum memberi peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kurikuler secara harmonis. Kegiatan-kegiatan belajar dari mata pelajaran yang berbeda hendaknya tidak saling menghambat melainkan saling menunjang.

4. Prinsip demokrasi.

Prinsip demokrasi dalam pengembangan kurikulum berarti :

- a. Kegiatan kurikulum dikelola secara bersama, melibatkan guru, administrator dan memberi kesempatan kepada orang tua, peserta didik dan masyarakat untuk mengemukakan saran-saran pendidikan.
- b. Hasil kegiatan pengembangan kurikulum memberi peluang bagi peserta didik untuk belajar hidup bersama berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghargai antara satu individu dengan individu lainnya.

Sementara itu, Oemar Hamalik (2005: 32) menambahkan dua prinsip lagi selain yang telah dikemukakan di atas, yaitu: *prinsip keseimbangan* dan *prinsip berorientasi mutu*. Prinsip keseimbangan maksudnya penyusunan kurikulum hendaknya memperhatikan secara proporsional dan fungsional antara program dan sub-program, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Adapun prinsip berorientasi mutu adalah pengembangan kurikulum hendaklah

berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan proses pembelajaran bermutu, sedangkan mutu pendidikan berarti berorientasi pada hasil (*out put*) pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kualitas kegiatan belajar mengajar, dan mutu sarana-prasarana (peralatan dan media).

Abdullah Idi (1999: 116) mengemukakan dalam pengembangan kurikulum prinsip-prinsip tersebut hendaknya dapat dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus, yaitu dengan cara mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai agar dapat dilakukan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlu usaha dan kerja yang sungguh-sungguh dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dasar di atas perlu dipertimbangkan agar kurikulum yang dirancang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain, hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah, kebutuhan dunia material dan teknikal, dan kebutuhan pembangunan nasional.

### **C. Pendekatan Pengembangan Kurikulum**

Penyusunan dan pengembangan kurikulum memerlukan pendekatan tertentu. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak (*starting point*) atau sudut pandang terhadap suatu proses hal tertentu. Pendekatan adalah upaya menerapkan strategi dan metode serta langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Pengertian ini bila dikaitkan dengan pendekatan pengembangan kurikulum berarti upaya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Pendekatan pengembangan kurikulum berarti titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum setidaknya diperlukan dalam beberapa hal penting, yaitu: mengembangkan muatan materi kurikulum, mengorganisir bahan materi kurikulum, pengalaman belajar, menentukan strategi dan pendekatan belajar, dan menentukan jenis kurikulum. Pendekatan

pengembangan kurikulum dapat pula dipahami sebagai titik tolak (*starting point*) asumsi atau sudut pandang dari mana seorang pengembang kurikulum akan memulai tugasnya mengembangkan sebuah kurikulum, baik dalam mengembangkan konsep dokumen kurikulum secara general-global berupa kurikulum nasional maupun konsep dokumen kurikulum secara spesial-lokal berupa bidang studi atau mata pelajaran lokal dan program pembelajaran.

Ada dua pendekatan yang sering dikemukakan oleh para ahli kurikulum dalam kegiatan pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran (H. M. Ahmad, 1997: 74). Pendekatan berorientasi pada tujuan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan: tujuan apa yang ingin dicapai, atau pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dirumuskan konsep tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan secara jelas dan operasional. Berdasarkan rumusan konsep tentang beberapa hal tersebut, kemudian ditetapkan materi dan kegiatan pembelajarannya. Pendekatan berorientasi pada tujuan menempatkan posisi rumusan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah pelaksanaan proses pembelajaran. Pendekatan ini menuntut guru memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan serta ketajaman dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau indikator hasil belajar yang ingin dicapai. Sedangkan pendekatan berorientasi pada bahan pelajaran berkaitan dengan pertanyaan: bahan apa yang akan diberikan atau diajarkan kepada peserta didik?

Menurut Hermana Somantrie (1993: 27), ada empat macam pendekatan yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) pendekatan akademis, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan mata pelajaran sesuai dengan konsep dasar dan batasan-batasan disiplin ilmu dari mata pelajaran tersebut; (2) pendekatan teknis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan bagaimana materi pelajaran disusun dan diatur secara rinci, logis, dan sistematis; (3) pendekatan individu, yaitu pendekatan yang

lebih menitikberatkan bagaimana anak didik dapat diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir dan keterampilan, dan pengembangan nilai-nilai pribadi. Prioritasnya adalah pengalaman belajar dengan memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan anak didik; (4) pendekatan sosial, yaitu pendekatan dengan memperhatikan kebutuhan, perubahan dan perkembangan masyarakat dalam mengembangkan program pendidikannya. Dalam praktiknya, penggunaan keempat pendekatan tersebut saling melengkapi.

#### **D. Proses Pengembangan Kurikulum**

Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama yaitu: pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional.

##### **1. Pedoman Kurikulum**

Pedoman kurikulum disusun untuk menentukan dalam garis besarnya yaitu: apa yang akan diajarkan, kepada siapa diajarkan, apa sebab diajarkan, dengan tujuan apa diajarkan, dan dalam urutan yang bagaimana diajarkan. Pedoman Kurikulum meliputi:

- a) Latar belakang, yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, raional bidang studi atau matakuliah, struktur organisasi bahan pelajaran.
- b) Silabus, yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci yang diberikan yakni scope (ruang lingkup) dan sequence nya (urutan penyajiannya)
- c) Desain Evaluasi, termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai:  
-bahan pelajaran (scope and sequence)  
-organisasi bahan dan strategi instruksionalnya

##### **2. Pedoman Instruksional**

Pedoman Intruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya

sebagai pembelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum.<sup>8</sup>

Proses pengembangan kurikulum secara makro (umum), kurikulum global-*general* atau kurikulum nasional (kurnas), dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

*Pertama*, tahap perencanaan, yaitu tahap melakukan identifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kurikulum seperti faktor sosiologis, historis, ideologis, psikologis, perkembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) dan hasil-hasil penelitian yang mendorong perubahan dan pengembangan kurikulum. Pada tahap ini juga meliputi tahap legitimasi, yaitu siapa saja yang akan melakukan tugas pengembangan kurikulum dan bagaimana jenis kurikulum yang akan dikembangkan.

*Kedua*, tahap pelaksanaan, yaitu tahap melaksanakan dan merumuskan konsep kurikulum.

*Ketiga*, tahap evaluasi, yaitu tahap mengevaluasi konsep kurikulum yang sudah disusun oleh tim pengembang kurikulum.

*Keempat*, tahap revisi dan penyempurnaan, yaitu merevisi konsep kurikulum yang telah dievaluasi untuk dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya. Setelah konsep kurikulum dianggap final, akan dilanjutkan dengan tahap sosialisasi dan uji coba serta penetapan dan pemberlakuan kurikulum tersebut.

Dengan demikian, proses pengembangan dan perancangan sebuah kurikulum bukanlah pekerjaan sekali jadi, melainkan berulang kali sehingga mencapai kesempurnaan. Demikian juga

---

<sup>8</sup> Informasi tentang **Proses Pengembangan Kurikulum**, "Kurikulum dan Pengajaran", Prof. Dr. S. Nasution M.A., Penerbit: Bumi Aksara

yang terjadi dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, kurikulum 2013, dan seterusnya.

Di samping itu, ada beberapa hal yang tidak dapat diabaikan ketika akan melakukan pengembangan kurikulum, yaitu langkah-langkah pengembangan seperti membuat distingsi antara langkah-langkah pengembangan kurikulum mikro (misalnya kurikulum mata pelajaran tertentu, yang berupa sejumlah materi pelajaran tersebut) dan langkah-langkah pengembangan kurikulum makro (kurikulum secara makro-global yang berupa sejumlah mata pelajaran).

Pada pengembangan kurikulum makro, penting sekali melakukan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh dari sisi historis, sosiologis, psikologis, dan keilmuan terhadap kurikulum dalam arti makro. Sedangkan pada pengembangan kurikulum mikro amat penting melakukan penterjemahan pengembangan kurikulum makrokospis ke dalam desain kurikulum mikro dalam bentuk rencana program pembelajaran (RPP) atau satuan acara perkuliahan (SAP). Desain kurikulum mikro ini dilakukan oleh para guru yang ada di sekolah/madrasah.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum makrok dapat dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Pahami faktor-faktor yang mendorong pembaruan kurikulum, yang terdiri dari faktor tujuan yang selalu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, psikologi, dan falsafah bangsa. Juga penting memahami hasil-hasil riset dan temuan penelitian. Hal lain yang harus dipertimbangkan juga adalah tekanan-tekanan, baik yang berasal dari kelompok penekan maupun dari pengujian-pengujian dari luar.
2. Memperhatikan kecenderungan pengembangan kurikulum dengan tingkat inovasi.
3. Mempertimbangkan tingkat difusi dan penyebaran pengetahuan dan pengertian tentang pengembangan kurikulum di luar lembaga-lembaga pengembangan

kurikulum. Hasil penelitian kependidikan di-sosialisasikan ke sekolah-sekolah sehingga mereka responsif terhadap arah pengembangan yang akan dilakukan.

4. Implementasi kurikulum yang telah diketahui sekolah-sekolah segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan para guru agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan pengembangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai penataran dan pelatihan untuk *mengup-grade* kemampuan guru.

5. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi.

Agar lebih jelas mengenai langkah-langkah di atas, coba perhatikan bagan model pengembangan kurikulum berikut seperti yang dikutip Wasty Soetopo (1989) sebagai berikut:

<b>Pandangan</b>	<b>Corak Instrumental</b>	<b>Corak Interaktif</b>	<b>Corak Individualis</b>
Pandangan tentang pengetahuan	Paket disiplin mata pelajaran	Problem penyelidikan inter-disiplin	Eksplorasi pribadi (penemuan tak terbatas)
Kategori tujuan yang paling ditekankan	Job atau Karier	Adjusment sosial	Kebahagiaan pribadi
Struktur materi	Materi yang sangat berstruktur	Materi yang berstruktur luwes	Materi tak berstruktur
Peranan guru di kelas	Mendominasi	Mengelola	Membantu
Strategi disseminasi	Guru sebagai penerima pasif	Guru sebagai peserta representatif	Guru sebagai developers
Teknik evaluasi	Tercapainya tujuan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya	Studi ekologis	Sejauhmana pencapaian peserta didik
Pandangan tentang kemanusiaan	Manusia sebagai benda (yang dapat dimanipulasi)	Manusia sebagai hewan sosial	Manusia sebagai individu yang unik
Pandangan tentang realitas internal	Terra firma (dunia riil)	Karung pasir (dunia yang berubah)	Terra incognita (dunia yang tak dapat diketahui)

Matrik di atas merupakan sebuah landasan yang dapat digunakan untuk menganalisis kurikulum pada lembaga-lembaga yang berbeda.

Dalam konteks pengembangan kurikulum secara mikro, kurikulum spesifik (*special*), yaitu kurikulum yang berupa program pengajaran atau bidang studi tertentu, seperti PAI, IPA, IPS, dan seterusnya, dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, merumuskan tujuan; *kedua*, menentukan dan menyeleksi isi atau muatan materi; *ketiga*, mengorganisasi isi dan proses kegiatan belajar; dan *keempat*, melaksanakan evaluasi (Moh. Said, 2002:108). Langkah-langkah tersebut secara lebih jelas dapat dipahami pada skema berikut:



Seperti dikemukakan Abdullah (1999), ada dua hal yang penting diperbincangkan ketika merumuskan *content* kurikulum. *Pertama*, kurikulum dipahami sebagai materi yang ditransfer pada proses pembelajaran. Materi itu tidak hanya berisi informasi yang faktual, tetapi juga meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap dan nilai.

*Kedua*, dalam proses pembelajaran dua elemen kurikulum, yaitu isi dan metodologi merupakan sebuah pola interaksi yang saling berkaitan. Isi akan semakin signifikan artinya jika ditransformasikan kepada siswa melalui metodologi yang tepat. Metode yang efektif akan selalu berhubungan dengan isi kurikulum.

Perancangan kurikulum harus selalu mem-perhatikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyeleksian materi mata pelajaran yang akan dirancang. Selain itu, proses

perancangan dengan mengikuti prinsip-prinsip sistematika analisis juga menjadi sangat urgen dipahami. Selanjutnya, sebuah kurikulum membutuhkan penyeleksian rasional terhadap perancangan yang akan dilakukan.

Menurut para ahli kurikulum, ada beberapa langkah pengembangan kurikulum, sebagian penulis buku kurikulum menyebutnya model pengembangan kurikulum. Menurut penulis istilah model kurang tepat digunakan dalam sub bahasan ini. Sebab istilah model mengandung muatan strategi, pendekatan, metode, teknik, taktik.<sup>9</sup> Sedangkan pendapat para ahli kurikulum tersebut lebih bersifat prosedural, seperti pendapat para ahli kurikulum berikut ini:

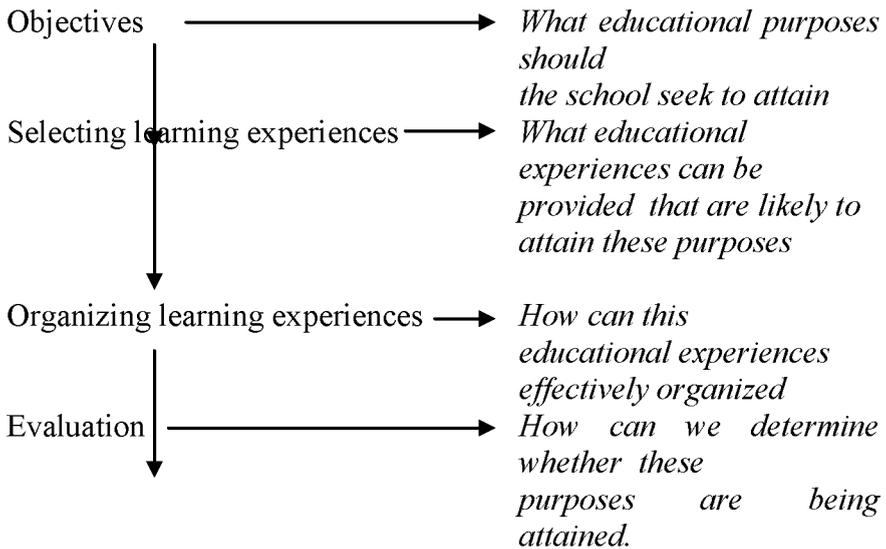
### 1. Model Ralp Tyler

Dalam *Basic Principles Curriculum and Instruction*, Tyler mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum membutuhkan analisis yang logis dan sistematis. Tyler menjelaskan pentingnya pendapat rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari sebuah lembaga pendidikan. Lebih lanjut Tyler mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan kurikulum, mereka perlu mengungkap-kan pertanyaan-pertanyaan, apa tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh institusi pendidikan? apa pengalaman pendidikan yang perlu dicapai dalam tujuan itu? bagaimana mengorganisasikan pengalaman itu secara efektif? bagaimana menentukan strategi pencapaian tujuan yang telah ditentukan berhasil atau belum?

---

<sup>9</sup> Pendekatan (*approach*) dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses suatu kegiatan tertentu. Strategi merupakan “*a plan of operation achieving something*” sedangkan metode adalah “*a way in achieving something*” (Wina Sanjaya, 2008). Jadi, metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Adapun teknik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model.

Lebih jelas model pengembangan kurikulum Tyler dapat dilihat pada skema berikut:



## 2. Model Hilda Taba

Dalam *Curriculum Development: Theory and Practice*, Taba mengungkapkan pendekatan pengembangan kurikulumnya dengan memodifikasi model yang ditawarkan Tyler. Menurut Taba, dalam pengembangan kurikulum perlu menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi dan individu pelajar.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kurikulum menurut Taba adalah sebagai berikut:

- a. Diagnosa kebutuhan
- b. Merumuskan pokok-pokok kajian
- c. Menyeleksi isi
- d. Pengorganisasian isi kurikulum
- e. Penyeleksian pengalaman belajar
- f. Pengorganisasian pengalaman belajar
- g. Penentuan metodologi dan evaluasi.

### **3. Model D.K Wheeler**

Dalam *Curriculum Process*, Wheeler menawarkan langkah-langkah pengembangan kurikulum sebagai berikut:

- a. Menyeleksi tujuan dan sasaran
- b. Menyeleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai sasaran.
- c. Menyeleksi isi melalui tipologi dari pengalaman yang dilakukan.
- d. Mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengalaman belajar dan isi kurikulum yang berkaitan dengan proses pembelajaran
- e. Mengevaluasi setiap fase dan memahami persoalan dan tujuan.

### **4. Model Audrey dan Howard Nichollas**

Dalam *Developing Curriculum: A Practical Guide*, Audrey dan Howard menegaskan betapa pentingnya analisis situasi dalam melakukan pengembangan kurikulum. Ada lima langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kurikulum;

- a. Analisis situasi
- b. Menyeleksi tujuan
- c. Menyeleksi dan mengorganisasikan isi
- d. Menyeleksi dan mengorganisasikan metodologi
- e. Melakukan evaluasi

### **5. Model Decker Walker**

Walker berpandangan bahwa para pengembang kurikulum ternyata belum mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan rasional dan memperhatikan elemen-elemen ketika melakukan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, langkah-langkah penting yang perlu ditempuh dalam melakukan pengembangan kurikulum adalah:

- a. Menentukan *platform* yang didasari dari berbagai nilai seperti keyakinan (*belief*), teori, konsep, pandangan dan tujuan tertentu.
- b. Menerapkan nilai-nilai tadi ke dalam bentuk yang lebih praktis.
- c. Melakukan desain kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya.

## 6. Model Malcolm Skilbeck

Pengembangan sebuah kurikulum menurut Skilbeck harus melalui langkah-langkah berikut:

- a. Analisis situasional
- b. Merumuskan tujuan
- c. Menyusun program
- d. Melakukan penafsiran dan implementasi
- e. Melakukan monitoring, umpan balik, *assessment* dan merancang ulang.

Skilbeck juga adalah salah seorang pendukung utama dari model *dynamic or interaction*. Menurut para pendukung model ini, terdapat kelebihan dari model *dynamic model*, di antaranya adalah model ini merupakan cara yang lebih realistis dalam melakukan program pengembangan kurikulum. Selain realistis, model ini menawarkan bagi para pengembang kurikulum sebuah cara yang lebih fleksibel. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan sebagai model refleksi realita dari pengembangan kurikulum.

Namun demikian, model ini juga terdapat beberapa kelemahan, di antaranya adalah kurang bersifat sistematis sehingga akan menimbulkan kebingungan.

## **Pertanyaan dan Tugas**

1. Jelaskan pengertian asas filosofis dan contoh aplikasinya dalam pengembangan kurikulum PAI!
2. Jelaskan pengertian asas sosiologis dan contoh aplikasinya dalam pengembangan kurikulum! dan mengapa asas sosiologis dipandang sebagai asas yang mendorong perubahan kurikulum PAI?
3. Jelaskan pengertian asas psikologis dan contoh aplikasinya dalam pengembangan kurikulum PAI!
4. Jelaskan pengertian asas organisatoris dan contoh aplikasinya dalam pengembangan kurikulum PAI!
5. Dilihat dari asas ipteks, jelaskan ke mana arah kurikulum PAI harus dikembangkan!
6. Sebutkan dan jelaskan beberapa prinsip pengembangan kurikulum dan contoh aplikasinya dalam pengembangan kurikulum!
7. Sebutkan dan jelaskan beberapa pendekatan pengembangan kurikulum!
8. Jelaskan langkah-langkah mengembangkan kurikulum!

### **BAB III**

## **PENGEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN KURIKULUM**

Bab ini membahas komponen-komponen kurikulum. Para ahli pendidikan hampir sepakat bahwa yang menjadi komponen pokok kurikulum adalah tujuan, materi, metode dan strategi (proses, sistem penyampaian dan media), dan evaluasi. Dalam menentukan komponen-komponen tersebut idealnya berdasarkan pemikiran-pemikiran bersifat filosofis, baik mengenai tujuan dan isi (materinya) maupun metode dan evaluasinya. Dengan mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami beberapa komponen kurikulum dan mampu mengembangkannya dalam proses pembelajaran. Beberapa komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik dan saling berkaitan. Berikut ini diuraikan secara singkat dari masing-masing komponen kurikulum tersebut.

Tyler (dalam Taba, 1962:442) mengatakan pentingnya mengenal komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur kurikulum. Herrick (dalam Taba, 1962:425) mengemukakan ada empat (4) komponen kurikulum yakni: tujuan (*objectives*), mata pelajaran (*subject matter*), metode dan organisasi (*method and organization*), dan evaluasi (*evaluation*). Nana Syaodih Sukmadinata (1988:425) mengemukakan empat komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian serta evaluasi.

#### **A. Pengembangan Komponen Tujuan**

Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum<sup>10</sup> adalah kekuatan-kekuatan fundamental yang peka sekali, karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya mempengaruhi bentuk

---

<sup>10</sup>eputar ***Komponen-komponen Kurikulum*** dapat baca buku Dimiyati dan no "Belajar dan Pembelajaran", Penerbit: Rineka Cipta

kurikulum, tetapi memberi arahan dan fokus untuk seluruh program pendidikan (Zais, 1976 :297). Komponen tujuan memuat arah yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Sebab tujuan merupakan komponen sentral bagi komponen-komponen lainnya. Dengan kata lain, penentuan substansi komponen kurikulum berikutnya bermuara pada komponen tujuan ini. Tujuan mendasar kurikulum harus merujuk kepada tujuan pendidikan nasional (TPN). Rumusan tujuan dalam kurikulum pendidikan paling tidak didasari oleh dua hal mendasar. *Pertama*, harus mempertimbangkan perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. *Kedua*, harus didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara (Sukmadinata, 2000: 103). Dalam hal ini, filsafat pendidikanlah yang memberi dasar dan corak serta arah tujuan pendidikan itu.

Di samping itu, rumusan tujuan universal kurikulum pendidikan harus bersifat komprehensif, yaitu mengandung aspek pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), dan keterampilan (psikomotor).<sup>1</sup> Dalam merumuskan tujuan pendidikan, termasuk di Indonesia umumnya masih mengacu kepada taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom et.al., yang kemudian lebih dikenal dengan istilah taksonomi tujuan Bloom, terutama mengenai tujuan institusional dan instruksional. Menurut Bloom, seperti dikutip oleh Asri Budiningsih (2005:95), tingkah laku manusia dikategorikan menjadi tiga ranah (matra, domain atau pembedaan), yaitu :

1. Ranah kognitif terdiri atas 6 (enam) tingkatan, yaitu:
  - a. Pengetahuan (*knowledge*): mengingat, menghafal, dan memahami.
  - b. Pemahaman (*comprehension*): menginterpretasi.

---

<sup>1</sup> Lihat David Kratwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram Massia, *Taxonomy of Education Objectives*, David McKay Company Inc., New York, 1974.

- c. Aplikasi (*aplication*): menggunakan konsep untuk memecahkan masalah.
  - d. Analisis (*analysis*): menjabarkan suatu konsep.
  - e. Sintesis (*Synthesis*): menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh.
  - f. Evaluasi (*evaluation*): membanding nilai-nilai, ide, metode, dan sebagainya.
2. Ranah afektif terdiri atas 5 (lima) tingkatan, yaitu:
- a. Penerimaan (*receiving*): ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu.
  - b. Respon (*responding*): aktif berpartisipasi.
  - c. Penghargaan (*appreciating*): menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu.
  - d. Organisasi (*organizing*): menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya.
  - e. Pengalaman (*practising*): menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya..
3. Ranah psikomotor terdiri 5 (lima) tahapan, yaitu:
- a. Tahap imitasi (*imitation*), menirukan gerak.
  - b. Tahap penggunaan (*using*), menggunakan konsep untuk melakukan gerak.
  - c. Tahap ketepatan (*accuracy*), melakukan gerak dengan benar.
  - d. Tahap perangkaian (*re-arrangement*), melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar.
  - e. Tahap naturalisasi (*naturalization*): melakukan gerak secara wajar.

Pada domain kognitif tujuan yang ingin dicapai mengarahkan pada pengembangan akal, intelektual anak didik; pada domain afektif tujuan yang ingin dicapai mengarah pada pembentukan dan pengembangan perasaan, sikap dan nilai-nilai bagi anak didik; sedangkan pada domain psikomotorik tujuan yang ingin dicapai mengarah pada pengembangan keterampilan jasmani anak didik

(Abdullah Idi, 1999: 12). Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan tiga aspek itu berkaitan juga dengan tujuan kelembagaan (*institusional*) (Subandijah, 1997: 4).

Ketiga ranah atau domain tujuan di atas harus termuat secara integral dalam rumusan tujuan pendidikan dan harus dicapai secara seimbang dan menyeluruh dalam kegiatan pembelajaran. Sebab jika tidak seimbang akan menghasilkan tingkah laku atau pribadi siswa yang tidak utuh (*split personality*). Namun dalam tahap-tahap pencapaiannya, mungkin harus diawali dengan pengetahuan atau memahami (kognitif), kemudian sikap atau menghayati (afektif), lalu berbuat atau mengamalkan (psikomotor), terutama pada pendidikan atau pelajaran umum, mungkin berbeda dengan pendidikan nilai atau pendidikan karakter seperti pendidikan agama, pencapaian aspek afektif lebih diprioritaskan. Sebab nilai-nilai bukan sekedar teori, melainkan lebih mengarah pada aplikasi dan harus mempribadi dalam diri peserta didik.

Dalam merumuskan tujuan pendidikan tersebut, secara hierarkis melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

1. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN).
2. Tujuan Institusional (TI).
3. Tujuan Kurikuler (TK).
4. Tujuan Instruksional, yang terdiri dari :
  - a. Tujuan Instruksional Umum (TIU), dan
  - b. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) (Subandijah, 1997: 5).

Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan institusional, merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan, misalnya tujuan institusional SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, Universitas/ Akademi/IAIN/STAIN. Secara institusional tiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan masing-masing, tergantung pada ciri khas lembaga pendidikan bersangkutan, yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kelembagaan mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik, penguasaan hasil pendidikan umum,

ketepatan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan tertentu, pemberian bekal untuk hidup di masyarakat, mendasari untuk melanjutkan studi tingkat berikutnya. Tujuan khusus mengarah kepada pengembangan aspek-aspek pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan.

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi. Tujuan instruksional adalah target yang harus dicapai melalui suatu mata pelajaran, biasanya dapat dilihat dalam GBPP dari suatu bidang studi. Yang terakhir ini, masih dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan khusus. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas lebih menekankan tujuan khusus. Sebab hal itu akan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan operasional serta terukur, sehingga mudah untuk mencapainya (Sukmadinata, 2000: 103). Dalam kurikulum KBK/KTSP tahun 2006 dikenal dengan istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) serta indikator-indikator hasil belajar.

## **B. Pengembangan Komponen Materi**

Fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi (materi/pengalaman belajar) agar keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai secara efektif dan supaya pengetahuan penting yang diinginkan pada jalur dan jenjangnya dapat disajikan secara efektif (Zais, 1976 : 322). Menurut Taba (1962 : 290), jika kurikulum merupakan suatu rencana untuk belajar maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Menurut pendapat Taba ini, materi dan pengalaman belajar dalam kurikulum diorganisasikan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan.

Komponen materi adalah materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen materi memuat pengalaman-pengalaman belajar yang akan diperoleh atau dialami siswa di sekolah. Materi yang dimaksud biasanya berupa bidang-bidang studi dan materinya yang diuraikan dalam bentuk topik atau pokok bahasan, misalnya: Matematika, IPA, IPS, Fiqh, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab, dan lain sebagainya. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang dan

jalur pendidikan yang ada, dan biasanya telah termuat atau tercantum dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan (Subandijah, 1997: 5). Materi pembelajaran tersebut disusun secara sistematis berdasarkan topik-topik dan sub-sub topik tertentu. Setiap topik atau sub topik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.

Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan.

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengertian thaharoh (bersuci), macam-macam hadats dan najis, dan cara mensucikan dari hadats dan najis, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi pengertian thaharoh (bersuci), macam-macam hadats dan najis, dan cara mensucikan dari hadats dan najis.

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya (Marno, 2011).

Menurut Sukmadinata (2000: 105-106), ada beberapa cara untuk menyusun rangkaian materi pembelajaran (*sequence of the subject matter*), yaitu :

1. Sekuens kronologis.

Untuk menyusun materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu, dapat menggunakan sekuens kronologis. Peristiwa-peristiwa sejarah, perkembangan historis suatu institusi, penemuan-penemuan ilmiah dan sebagainya dapat disusun berdasarkan sekuens kronologis.

2. Sekuens kausal.

Sekuens kausal masih berhubungan erat dengan sekuens kronologis. Siswa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari sesuatu yang menjadi sebab atau pendahulu, para siswa akan menemukan akibatnya. Menurut Rowntree (1974), sebagaimana yang dikutip oleh Sukmadinata sekuens kausal cocok untuk menyusun bahan pelajaran dalam bidang Meteorologi dan Geomorfologi.

3. Sekuens struktural.

Bagian-bagian materi pembelajaran suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu. Penyusunan sekuens materi pembelajaran bidang studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. Misalnya dalam Fisika tidak mungkin mengajarkan alat-alat optik, tanpa terlebih dahulu mengajarkan pemantulan dan pembiasan cahaya, dan pemantulan dan pembiasan cahaya tidak mungkin diajarkan tanpa terlebih dahulu mengajarkan masalah cahaya. Masalah cahaya, pemantulan-pemantulan, dan alat-alat optik tersusun secara struktural.

4. Sekuens logis dan psikologis.

Materi pembelajaran juga dapat disusun berdasarkan urutan logis. Menurut Rowntree, materi pembelajaran sekuens logis dimulai dari bagian menuju keseluruhan, dari yang sederhana kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuens psikologis sebaliknya dari keseluruhan kepada bagian, dari yang kompleks kepada yang sederhana. Menurut sekuens logis materi pelajaran disusun dari yang nyata kepada yang

abstrak, dari benda-benda kepada teori, dari fungsi kepada struktur, dari masalah bagaimana kepada masalah mengapa.

5. Sekuens spiral.

Menurut Sukmadinata sekuens spiral dikembangkan oleh Bruner (1960). Materi pembelajaran dipusatkan pada topik atau pokok bahan tertentu. Dari topik atau pokok tersebut adalah sesuatu yang populer dan sederhana, tetapi kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks.

6. Rangkaian ke belakang (*backward chaining*).

Pola ini dikembangkan oleh Thomas Gilbert (1962). Dalam sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan mundur ke belakang. Contoh, proses pemecahan masalah yang bersifat ilmiah, meliputi lima langkah, yaitu : (a) pembatasan masalah, (b) penyusunan hipotesis, (c) pengumpulan data, (d) pengujian hipotesis, (e) interpretasi hasil pengujian.

7. Sekuens berdasarkan hierarki belajar.

Model ini dikembangkan oleh Gagne (1965), dengan prosedur sebagai berikut: tujuan-tujuan khusus utama pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki itu menggambarkan urutan perilaku apa yang harus mula-mula dikuasai siswa, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir.

Berkenaan dengan pemilihan dan pengembangan bahan ajar ini, secara umum masalah dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan (*treatment*) terhadap materi pembelajaran, dan sebagainya. Termasuk masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar adalah guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa.

Menurut Marno (2011: 36-44) langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama: Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar**

1. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran.
2. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya.

**Kedua : Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran**

Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur (Reigeluth, 1987).

1. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya.
2. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakekat, inti isi.
3. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema.
4. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara pembuatan telur asin atau cara-cara pembuatan bel listrik.

5. Materi pembelajaran aspek afektif meliputi: pemberian respons, penerimaan (apresiasi), internalisasi, dan penilaian.
6. Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin.

**Ketiga: Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar**

Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi.

Berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-beda. Misalnya metode mengajarkan materi fakta atau hafalan adalah dengan menggunakan “jembatan keledai”, “*jembatan ingatan*” (*mnemonics*), sedangkan metode untuk mengajarkan prosedur adalah “demonstrasi”.

Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan

mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.

Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau psikomotorik. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran:

1. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya “ya” maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “fakta”.

**Contoh:**

Nama-nama ibu kota kabupaten, peristiwa sejarah dakwah Rasulullah, nama-nama Para rasul ulum azmi.

2. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya “ya” berarti materi yang harus diajarkan adalah “konsep”.

**Contoh :**

Seorang guru menunjukkan beberapa sifat-sifat yang ada pada diri manusia kemudian siswa diminta untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk sifat terpuji dan mana yang termasuk sifat tercela.

3. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu ? Bila “ya” maka materi yang harus diajarkan adalah “prosedur”.

**Contoh :**

Langkah-langkah mengkafani jenazah; langkah-langkah melakukan wudlu; langkah-langkah menjalankan ibadah haji, dan sebagainya.

4. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya “ya”, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori “prinsip”.

**Contoh :**

Hubungan antara orang yang berbuat baik kepada sesama manusia dengan kebahagiaan hidup. Jika kita berbuat baik dengan sesama manusia maka Allah akan membalas kebaikan anda dan anda akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

5. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek afektif, sikap, atau nilai.

**Contoh:**

Ali belajar rajin dan kerja keras. Karena dengan rajin dan kerja keras dia akan memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Ali memiliki sikap rajin dan kerja keras setelah di sekolah diajarkan pentingnya sifat rajin dan kerja keras.

6. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik.

**Contoh:**

Dalam pelajaran gerakan dalam solat, siswa diharapkan mampu melakukan gerakan-gerakan dalam solat dengan benar. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah gerakan-gerakan dalam solat.

**Keempat : Memilih sumber bahan ajar**

Setelah jenis materi ditentukan langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan sebagainya.

**Kelima : Penentuan Cakupan Dan Urutan Bahan Ajar**

Masalah cakupan atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan penyajian (*sequencing*) akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi pembelajaran.

**1. Penentuan cakupan bahan ajar**

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik, sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas maka masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda.

Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan

kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa. Sebagai contoh, materi tentang shalat diajarkan di SD, SLTP dan SMU, juga di perguruan tinggi, namun keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin luas cakupan aspek materi tentang shalat yang dipelajari dan semakin detail pula setiap aspek yang dipelajari.

Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan (*adequacy*). Kecukupan (*adequacy*) atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika suatu pelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada siswa di bidang rukun shalat, maka uraian materinya mencakup: (1) penguasaan atas konsep tentang rukun shalat; (2) menghafalkan doa-doa dalam shalat; dan selanjutnya (3) penerapan/mempraktikkan shalat berdasarkan rukun shalat yang benar.

Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

## **2. Penentuan urutan bahan ajar**

Urutan penyajian (*sequencing*) bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (*prerequisite*) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari. Siswa akan mengalami kesulitan membagi jika materi pengurangan belum dipelajari.

Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu: pendekatan prosedural, dan hierarkis.

a. Pendekatan prosedural.

Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya: langkah-langkah berwudlu, langkah-langkah menghilangkan kotoran najis berat.

b. Pendekatan hierarkis

Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.

***Contoh : Urutan Hierarkis (berjenjang)***

Agar siswa dapat menjalankan sholat dengan benar dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka pertama siswa harus mempelajari dan memahami dulu materi tentang thoharoh atau tata cara bersuci terutama yang berkaitan dengan cara berwudlu. Kemudian siswa mempelajari syarat dan rukun shalat dengan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya siswa mempraktikkan gerakan-gerakan shalat dengan benar secara tertib.

Di samping beberapa prinsip umum di atas, dalam mentelaah dan menganalisis serta mengembangkan materi kurikulum PAI di sekolah/madrasah ada beberapa pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan:

1. Karakteristik PAI sebagai pendidikan nilai

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang diarahkan untuk membentuk pribadi dan karakteristik peserta didik, yaitu pribadi yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia.

## 2. Pendekatan pengembangan materi

Pengembangan materi PAI dapat dilakukan dengan pendekatan berorientasi pada tujuan dan berorientasi pada materi itu sendiri. Dalam hal ini, secara filosofis dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan apa tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan dan pembelajaran PAI di sekolah/madrasah itu. Atau dapat juga dimulai dengan pertanyaan materi apa yang paling mendesak dan dibutuhkan peserta didik dari PAI tersebut.

## 3. Materi PAI disesuaikan dengan visi-misi institusi, tujuan pendidikan nasional, tujuan PAI di sekolah/ madrasah, dan SKKD yang ada dalam kurikulum nasional.

## 4. Pengetahuan awal siswa tentang PAI

Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi pengulangan materi yang sama berulang kali. Selain itu, agar ada kesinambungan (keberlanjutan) dalam tiap-tiap jenjang dan jenis pendidikan yang dilalui.

## 5. Bobot waktu yang dialokasikan juga menjadi pertimbangan penting.

Dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang terbatas, maka perlu mempertimbangkan materi yang menjadi prioritas untuk disajikan dalam kurikulum.

## 6. Materi disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik.

Dalam hal ini identifikasi materi yang mendesak dan dibutuhkan serta fungsional bagi siswa untuk kehidupannya dalam bidang PAI sesuai level sekolah dan perkembangan psikologis siswa, materi PAI yang sudah dan belum serta diperlukan untuk tiap tingkatan pendidikan.

## 7. Apa yang diharapkan masyarakat/orang tua dari PAI untuk anak mereka dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ipteks dan dunia global, lokal dan nasional.

## 8. Apa manfaat materi PAI bagi kehidupan siswa sepanjang hayat

9. Ruang lingkup (*scope*) PAI (relevansi, adekuasi, konsistensi)
10. Sequence (urutan) dan sistematika (keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan kesinambungan)
11. Mana materi yang menjadi pengulangan, penambahan, penekanan, pendalaman, dan pengembangan

### **C. Pengembang Komponen Strategi dan Media**

Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk memahami strateginya. Strategi menunjukkan pada suatu pendekatan (*approach*), metode (*method*)<sup>2</sup> dan peralatan mengajar (media) yang digunakan dalam proses pembelajaran. Strategi ini harus dipahami dan dikuasai oleh seorang guru, dan dalam pengaplikasiannya harus tepat dan akurat. Sebab dengan menggunakan strategi yang tepat dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Namun, penggunaan strategi tersebut sangat tergantung pada kompetensi (*competence*) seorang guru (Abdullah Idi, 1999: 15), yaitu kemampuan atau kecakapan dasar profesional seseorang dalam bidang keahliannya. Seorang guru harus menguasai ilmu didaktik dan metodik pembelajaran, memiliki kompetensi paedagogik yang memadai agar dapat menjadi guru profesional.

Media merupakan sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Media merupakan alat bantu yang memudahkan dalam menyampaikan materi kurikulum agar mudah dimengerti dan dikuasai serta dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang guru agar apa yang disampaikan kepada peserta didiknya dapat dimengerti dan diserap serta diterapkan oleh mereka. Ketepatan memilih media yang digunakan dapat merangsang siswa untuk belajar dan

---

<sup>2</sup> Untuk penjelasan yang lebih luas tentang metode pembelajaran ini, lihat Tayar Yusuf et. al., *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Dalam konteks pendidikan Islam lihat Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 204-297. Basyiruddin Usman, *Metode pembelajaran PAI*, Ciputat Press, Jakarta, 2005.

akan membantu kelancaran pencapaian tujuan pembelajaran (Subandijah, 1997: 5).

#### **D. Pengembangan Komponen Evaluasi**

Evaluasi adalah komponen keempat dari kurikulum. Evaluasi ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa (hasil dan proses) maupun efektifitas kurikulum dan pembelajaran. Zais (1976 : 378) mengemukakan evaluasi secara luas merupakan suatu usaha besar yang kompleks yang akan memberikan informasi dan data tentang perkembangan belajar siswa maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran, sehingga dapat dibuat keputusan-keputusan pembelajaran dan pendidikan secara tepat.

Dalam konteks ini tampaknya ada dua hal yang dievaluasi. *Pertama*, evaluasi untuk menilai sejauh mana hasil proses pembelajaran telah dicapai, mungkin lebih tepat disebut evaluasi hasil dan proses pembelajaran. Evaluasi ini biasanya berbentuk *tes sumatif* dan *tes formatif*.<sup>3</sup> *Kedua*, evaluasi yang diperlukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kurikulum, yang bisa disebut sebagai evaluasi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum ini berkaitan dengan komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, materi, metode dan media yang digunakan. Semua komponen ini akan menentukan bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektifitas serta keberhasilan suatu program pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum itu sendiri, baik yang berkenaan dengan alokasi waktu, materi, sarana/ prasarana, penggunaan metode, maupun tujuan pembelajaran. Evaluasi tidak hanya untuk memperlihatkan sejauh mana tingkat prestasi siswa, tetapi juga merupakan suatu sumber *input* bagi upaya perbaikan dan pembaruan suatu kurikulum. Penilaian dalam arti luas, tidak hanya dapat dilakukan oleh pendidik tetapi juga oleh kalangan masyarakat

---

<sup>3</sup> Untuk penjelasan yang lebih detail tentang bentuk, jenis dan teknis evaluasi proses dan hasil pembelajaran ini, lihat Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, H.M. Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, dan buku-buku Evaluasi Pendidikan lainnya.

luas (*stakeholder*) dan mereka memang memiliki wewenang dalam dunia pendidikan (Abdullah Idi, 1999: 16). Dengan kata lain, ada evaluasi pembelajaran dan ada evaluasi kurikulum. Ruang lingkup evaluasi kurikulum mencakup evaluasi konsep teks kurikulum (*ideal curriculum*), evaluasi proses pelaksanaan atau penerapan kurikulum (*actual curriculum*), dan evaluasi hasil pencapaian atau *out put* kurikulum. Hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan (*in put*) bagi perbaikan, bahkan mungkin juga perubahan kurikulum.

Berkaitan dengan evaluasi hasil belajar PAI secara umum meliputi tiga aspek sasaran yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor, sebagaimana diuraikan Junaidi (2011: 21-31) berikut ini:

### **1. Hasil Belajar Kognitif**

Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Menurut teori yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dkk., aspek kognitif ini terdiri dari enam jenjang atau tingkat, yaitu:

#### **a. Pengetahuan (mengetahui tentang hal-hal khusus, peristilahan, fakta-fakta khusus, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah)**

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata *knowledge* dalam taksonomi Bloom. Dalam istilah tersebut termasuk pula pengetahuan faktual di samping pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus, batasan, definisi, istilah, ayat Al-Quran atau Hadis tertentu, nama-nama tokoh, nama-nama kota. Dilihat dari segi proses belajar, istilah-istilah tersebut memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasainya sebagai dasar bagi pengetahuan atau pemahaman konsep-konsep lainnya.

#### **b. Pemahaman (mampu menterjemahkan, menafsirkan, menentukan, memperkirakan, mengartikan)**

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik siswa mampu memahami arti

atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini peserta didik tidak hanya hafal secara verbalistik, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Bukti seseorang itu memiliki kemampuan pemahaman misalnya mampu menjelaskan pengertian iman atau Islam dengan susunan kalimatnya sendiri berdasarkan yang telah dipelajarinya, memberi contoh lain tentang bacaan *mad thabi'i* dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

**c. Penerapan (mampu memecahkan masalah, membuat bagan/ grafik, menggunakan istilah atau konsep-konsep)**

Penerapan atau aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi. Mengulang-ulang menerapkannya pada situasi lama akan beralih menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan. Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi baru bila tetap terjadi proses pemecahan masalah. Kecuali itu, ada satu unsur lagi yang perlu masuk, yaitu abstraksi tersebut perlu berupa prinsip atau generalisasi, yakni sesuatu yang umum sifatnya untuk diterapkan pada situasi khusus. Contoh kemampuan aplikasi ini dalam mata pelajaran PAI misalnya peserta didik mampu menentukan ayat mana atau hadis mana untuk menjelaskan suatu fenomena atau suatu peristiwa. Contoh lain adalah siswa mampu menerapkan cara membaca bacaan *qalqalah sughra* maupun *kubra* ketika membaca ayat-ayat Al-Quran.

**d. Analisis (mampu mengenali kesalahan, membedakan, menganalisis unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip organisasi)**

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas (suatu kesatuan) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Analisis

merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis diharapkan seseorang peserta didik mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat memilahkan integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikanya. Bila kecakapan analisis telah dapat berkembang pada seseorang, maka ia akan dapat mengaplikasikannya pada situasi baru secara kreatif. Contoh dalam pembelajaran al-Qur'an-Hadits adalah siswa dapat mengenali bacaan *ghorib* dalam al-Qur'an beserta alasannya yang benar.

**e. Sintesis (mampu menghasilkan, menyusun kembali, merumuskan)**

Kemampuan sintesis adalah kemampuan untuk menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Kemampuan berpikir sintesis ini merupakan kebalikan dari kemampuan berpikir analisis. Berpikir berdasar pengetahuan hafalan, berpikir pemahaman, berpikir aplikasi, dan berpikir analisis dapat dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu tingkat lebih rendah daripada berpikir divergen. Dalam berpikir konvergen, pemecahan atau jawabannya akan sudah diketahui berdasarkan yang sudah dikenalnya.

Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam pendidikan. Seseorang yang kreatif sering menemukan atau menciptakan sesuatu. Kreativitas juga beroperasi dengan cara berpikir divergen. Dengan kemampuan sintesis, orang mungkin menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu, atau menemukan abstraksinya atau operasionalnya. Dalam pembelajaran Fiqh contoh kemampuan sintesis antara lain peserta didik mampu membuat kesimpulan dari uraian materi pelajaran "zakat"

yang baru saja didiskusikan, atau menarik hikmah dari materi "zakat".

**f. Evaluasi (mampu menilai berdasarkan norma tertentu, mempertimbangkan, memilih alternatif).**

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, materi, dan lain-lain. Dilihat dari segi tersebut maka dalam evaluasi perlu adanya suatu kriteria atau standar tertentu. Dalam tes esai, standar atau kriteria tersebut muncul dalam bentuk frase "menurut pendapat Saudara" atau "menurut teori tertentu". Frase yang pertama sukar diuji mutunya, setidaknya sukar diperbandingkan atau lingkupan variasi kriterianya sangat luas. Frase yang kedua lebih jelas standarnya. Untuk mempermudah mengetahui tingkat kemampuan evaluasi seseorang, item tesnya hendaklah menyebutkan kriterianya secara eksplisit. Dalam pembelajaran SKI, contoh kemampuan evaluasi ini antara lain peserta didik mampu menilai suatu pernyataan tertentu atau suatu situasi tertentu, misalnya menilai pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan bentuk pemerintahn Islam yang cukup ideal setelah masa Rasulullah.

**2. Hasil Belajar Afektif**

Hasil belajar afektif adalah hasil belajar yang berkaitan dengan minat, sikap dan nilai-nilai. Hasil belajar ini yang harus juga diperhatikan dalam pembelajaran Al-Quran-Hadis, bahkan jenis hasil belajar ini tidak kalah penting dibandingkan dengan jenis hasil belajar kognitif dan psikomotor. Sebagaimana kedua jenis hasil belajar sebelumnya, hasil belajar afektif ini juga terdiri dari beberapa tingkat/jenjang, yaitu:

**a. *Receiving* atau *Attending***

*Receiving* atau *Attending* yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan

lain-lain. Dalam tipe ini termasuk: kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. *Receiving* ini dapat diartikan pula sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Hasil belajar dalam tingkat ini berjenjang mulai dari kesadaran bahwa sesuatu itu ada, sampai kepada minat khusus dari pihak peserta didik. Dalam pembelajaran PAI, tingkat ini misalnya peserta didik segera masuk kelas begitu melihat bapak-ibu guru PAI datang. Kemudian mereka mempersiapkan hal-hal yang akan diperlukan untuk mengikuti proses pembelajaran, mau memperhatikan dengan baik penjelasan bapak/ibu gurunya, dan akhirnya bersedia untuk menerima nilai-nilai yang diajarkan kepadanya.

**b. *Responding***

*Responding* atau menanggapi mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi peserta didik. Pada tingkat ini peserta didik tidak hanya bersedia atau mau memperhatikan penjelasan guru PAI, juga bersedia menerima suatu nilai tertentu, dan sudah memberikan reaksi secara lebih aktif. Dalam pembelajaran Al-Quran-Hadis, hasil belajar afektif tingkat *responding* ini misalnya kesediaan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang diajarkan, mendiskusikannya dengan sesama teman, membaca materi yang ditugaskan, kesukarelaan membaca buku yang tidak ditugaskan, dan sebagainya.

**c. *Valuing***

*Valuing* artinya memberikan penilaian atau menghargai. Menghargai artinya “memberikan nilai pada suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Penilaian atau penghargaan ini berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Bagaimana bentuk hasil belajar tingkat *valuing* ini dalam pembelajaran Al-Quran-Hadis? Sebagai guru,

Anda pasti menginginkan peserta didik Anda setelah mempelajari suatu nilai atau perilaku tertentu kemudian mau melaksanakannya. Misalnya ketika anak diajarkan bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah dan mendapat pahala, kemudian anak didik tersebut mau melakukannya setiap hari. Kemampuan seperti ini adalah merupakan contoh dari hasil belajar tingkat *valuing*.

d. **Organization**

(mengatur atau mengorganisasikan) artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Level ini berkaitan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda-beda, menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai itu, dan mulai membentuk suatu sistem nilai yang konsisten secara internal. Jadi memberikan penekanan pada: membandingkan, menghubungkan dan mensintesakan nilai-nilai. Hasil belajar afektif jenjang organisasi ini bertalian dengan konseptualisasi suatu nilai, misalnya: mengakui tanggung jawab tiap individu untuk memperbaiki hubungan-hubungan manusia, atau dengan organisasi suatu sistem nilai, misalnya: merencanakan suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal keamanan ekonomi maupun pelayanan sosial. Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak misalnya, anak diajari hidup itu harus jujur, amanah, adil, dan sebagainya. Di sisi lain anak didik melihat apa yang terjadi di lingkungan masyarakatnya banyak diwarnai dengan ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak amanah, dan sebagainya. Dalam keadaan yang demikian terjadi pergolakan dalam diri anak didik. Namun, anak akan mampu mengatasi masalah tersebut karena ia telah memiliki kemampuan *organization* ini, yakni mempertemukan berbagai sistem nilai sehingga ia punya pegangan yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh suatu keadaan.

- e. *Characterization by a value or value complex* (karakterisasi dengan satu nilai atau nilai kompleks), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini, proses internalisasi nilai telah menduduki tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan mempengaruhi emosinya. Individu yang memiliki kemampuan afektif pada tingkatan yang kelima ini berarti ia telah memiliki *philosophy of life* yang mapan. Jadi, individu tersebut telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik “pola hidup”, tingkah lakunya menetap, dan konsisten. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis misalnya, anak didik diajari tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Maka nilai-nilai menjaga dan melestarikan lingkungan ini benar-benar telah menjadi komitmen dirinya.

### **3. Hasil Belajar Psikomotor dalam Pembelajaran PAI**

Hasil belajar psikomotor (*psychomotor domain*) adalah hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan motorik dan kemampuan bertindak individu (Nana Sudjana, 2002: 30). Hasil belajar psikomotor menunjuk pada gerakan-gerakan jasmaniah yang dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan (Oemar Hamalik, 2005: 82). Belajar keterampilan motorik menuntut kemampuan untuk merangkaikan sejumlah gerak-gerak jasmani sampai menjadi satu keseluruhan. Walaupun belajar keterampilan motorik mengutamakan gerakan-gerakan persendian dalam tubuh, namun diperlukan pengamatan melalui alat indera dan secara kognitif yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman.

Biasanya suatu keterampilan motorik terdiri atas sejumlah sub komponen yang merupakan sub keterampilan atau keterampilan bagian. Misalnya pada pembelajaran Fiqh, dalam keterampilan shalat dapat dibedakan atas sub

keterampilan: pengaturan gerakan tangan ketika takbiratul ikhram, i'tidal, ruku, sujud, pengaturan gerakan kaki, badan dan kepala. Sub komponen ini harus dikuasai karena merupakan inti dalam gerakan shalat. Dalam keterampilan membaca Al-Quran, dapat dibedakan atas sub komponen: keterampilan mengucapkan huruf sesuai dengan *makharijul huruf* dengan tepat, mengucapkan kata (kalimah) sesuai dengan hukum bacaannya harus benar-benar dikuasai, karena itu merupakan satu kesatuan. Kadang-kadang sub keterampilan itu dilatih tersendiri, kemudian dihubungkan satu sama lain, dan kadang-kadang sub keterampilan itu dilatih sambil melatih keseluruhan keterampilan.

Seperti halnya hasil belajar kognitif dan afektif, hasil belajar psikomotor ini juga berjenjang-jenjang, yaitu ada enam tingkatan keterampilan sebagai berikut:

- a. Gerak refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). Arti: gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak, respons terhadap stimulus tanpa sadar. Misalnya: melompat, menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, menggenggam, berucap, dan lain-lain.

Contoh kegiatan belajar pada PAI:

- meniru gerakan orang sholat
- meniru qori waktu membaca al-Qur'an

- b. Keterampilan pada gerakan dasar (*basic fundamental movements*).

Arti: gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat

Diperhalus melalui praktik gerakan ini terpolakan dan dapat ditebak

Contoh kegiatan belajar pada PAI:

- contoh gerakan tak berpindah: berdiri tegak saat shalat, membungkuk seperti ruku, mengangkat tangan seperti takbiratul ihram.
- contoh gerakan berpindah: berlari kecil waktu sa'i dan berjalan memutar saat tawaf.
- Contoh gerakan manipulasi: menyembelih hewan qurban, menggantung rambut sa'at tahalul

c. Kemampuan perseptual (*Perceptual abilities*)

Arti : Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual

Contoh kegiatan belajar PAI:

- Melempar batu tepat sasaran saat lempar jumrah
- Menulis kaligrafi
- Melantunkan al-Qur'an dengan suara merdu

d. Gerakan Kemampuan fisik (*Physical abilities*)

Arti: gerak lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan belajar

Contoh kegiatan belajar PAI:

- Menahan nafas lama saat melantunkan al-Qur'an
- Shalat tarawih dengan jumlah raka'at yang banyak atau durasi yang lama, seperti shalat tarawih dan shalat tashbih

e. Gerakan terampil (*Skilled movements*)

Arti: dapat mengontrol berbagai tingkat gerak, terampil, tangkas, cekatan melakukan gerakan yang sulit dan rumit (kompleks)

Contoh kegiatan belajar PAI:

- Melantunkan al-Qur'an dengan variasi qira'ah
- Menulis kaligrafi diatas kain kanfah, kaca atau media lain

f. Gerakan indah dan kreatif (*Non-discursive communication*)

Arti: mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan

- gerakan estetik: gerakan-gerakan terampil yang efisien dan indah
- gerakan kreatif: gerakan-gerakan pada tingkat tertinggi untuk mengkomunikasikan peran

Contoh kegiatan belajar PAI:

- Kerja seni yang bermutu (membuat arsitektur masjid indah, kaligrafi level professional)

- Dakwah dengan seni wayang, drama dan musik

Hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya.

Mata pelajaran PAI di sekolah umum (SD/SMP/SMA/SMK) mencakup lima aspek, yaitu aspek Al-Quran/hadits, aspek keimanan, aspek akhlak, aspek fiqih/ibadah dan aspek tarikh (sejarah Islam). Sedang dalam mata pelajaran PAI di madrasah (MI/MTs/MA) masing-masing aspek tersebut menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, yaitu bidang studi Al-Quran-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqih-Ibadah dan Sejarah Islam (Tarikh). Apabila kita cermati dalam kurikulum PAI baik untuk sekolah umum maupun untuk madrasah, tidak semua aspek-aspek PAI tersebut memuat kemampuan/hasil belajar psikomotor. Aspek tarikh dan keimanan/akidah adalah aspek PAI yang hampir tidak ada muatan hasil belajar psikomotor. Aspek akhlak dan Al-Quran-hadist ada muatannya dan yang paling banyak memuat hasil belajar psikomotor di antara kelima aspek PAI tersebut adalah aspek Fiqih/ibadah.

### **Pertanyaan dan Tugas**

1. Sebutkan dan jelaskan beberapa komponen kurikulum!
2. Jelaskan prinsip-prinsip atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi kurikulum PAI!
3. Jelaskan langkah-langkah mengembangkan komponen tujuan kurikulum!
4. Jelaskan langkah-langkah mengembangkan komponen materi kurikulum!
5. Jelaskan langkah-langkah mengembangkan komponen strategi kurikulum!
6. Jelaskan langkah-langkah mengembangkan komponen evaluasi kurikulum!

## **BAB IV**

### **DESAIN, ORGANISASI, DAN JENIS KURIKULUM**

Bab ini memaparkan beberapa pokok bahasan penting lainnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu: desain kurikulum, organisasi kurikulum, dan jenis kurikulum. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep tiga pokok bahasan tersebut dan mampu mengembangkan serta menerapkannya secara operasional dalam praktik di dunia pendidikan dan pembelajaran.

#### **A. Desain Kurikulum**

Kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Kurikulum memuat pengetahuan ilmiah, termasuk kegiatan dan pengalaman belajar, yang disusun sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Merancang atau mendesain sebuah kurikulum bertitik tolak dari pertimbangan tertentu dan melalui sebuah konsep yang sering disebut dengan istilah *curriculum design*. Desain kurikulum merupakan proses perencanaan atau perancangan kurikulum yang mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan. Desain kurikulum dapat dipahami sebagai pola atau *framework* yang digunakan untuk menyeleksi, merencanakan, dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman pendidikan yang akan diajarkan di sekolah (Hendyat Soetopo, 1986).

Desain kurikulum sangat menentukan hasil-hasil pendidikan yang hendak dicapai. Desain kurikulum berkaitan erat dengan tujuan dasar (*basic goals*) sekolah, sehingga semua pelaksanaan proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Desain kurikulum dipandang penting, sebab berkaitan dengan elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kurikulum dan hubungan elemen-elemen tersebut dalam proses pengembangan kurikulum. Desain kurikulum juga membantu untuk menentukan seleksi organisasi yang diselenggarakan sekolah, di

samping menentukan peranan guru, siswa dan pihak lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2000), desain kurikulum paling tidak memiliki tiga pola:

1. *Subject centered design*, yakni desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar.
2. *Learner centered design*, yakni desain kurikulum yang berpusat pada siswa.
3. *Problems centered design*, yakni desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat.

Meskipun bertitik tolak dari hal yang sama, dalam suatu pola desain terdapat beberapa variasi desain kurikulum. Dalam *subject centered design* dikenal ada istilah *the subject design*, *the diciplines design* dan *the board fields design*. Pada *problems centered design* dikenal ada istilah *the areas of living design* dan *the core design*.

### **1. Subject Centered Design**

*Subject centered design* merupakan bentuk desain yang paling populer dan banyak digunakan. Pada desain model ini, kurikulum dipusatkan pada isi yang akan diajarkan. Kurikulum disusun atas sejumlah mata pelajaran dan diajarkan terpisah. Karena pemisahan pengajaran model desain ini juga dikenal dengan istilah *separated subject curriculum*.

Model desain kurikulum seperti ini memiliki kelebihan seperti mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi dan disempurnakan. Pengajarnya tidak perlu dipersiapkan secara khusus karena cukup dengan hanya menguasai bahan yang akan diajarkan. Tetapi desain ini juga memiliki kekurangan antara lain, karena pengetahuan disampaikan secara terpisah, maka hal ini bertentangan dengan filosofi bahwa pengetahuan itu pada dasarnya terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Peserta didik menjadi pasif karena tumpuan desain ini lebih berpusat pada bahan ajar semata-mata. Karena desain ini lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lampau,

maka pengajaran lebih bersifat verbalistik dan kurang realistik. Atas dasar itu, maka pengkritik desain model ini menyarankan perbaikan ke arah yang lebih terintegrasi, praktis dan bermakna serta memberikan peran yang lebih aktif kepada siswa.

Model *subject centered design* ini dapat dirinci menjadi model-model kurikulum sebagai berikut:

**a. *The Subject design***

*Subject design curriculum* merupakan bentuk desain yang paling murni dari *subject centered design*. Materi disajikan secara terpisah dalam bentuk mata pelajaran. Model desain seperti ini sesungguhnya telah ada sejak lama. Orang Yunani dan Romawi mengembangkan desain ini dengan membentuk *trivium* yang meliputi gramatika, logika dan retorika. Mereka juga mengembangkan *quadrivium* yang terdiri dari matematika, geometri, astronomi dan musik.

Desain kurikulum model ini memiliki kelemahan, di antaranya:

- 1) Kurikulum memberikan pengetahuan yang terpisah-pisah.
- 2) Isi kurikulum diambil dari tradisi masa lampau sehingga tercerabut dengan realitas saat ini.
- 3) Kurikulum kurang memperhatikan minat, kebutuhan dan pengalaman para peserta didik.
- 4) Isi kurikulum disusun berdasarkan sistematika ilmu sering menimbulkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakannya.
- 5) Kurikulum lebih mengutamakan isi dan kurang memperhatikan metodologi.

Meskipun ada kelemahan-kelemahan, bentuk desain kurikulum seperti ini juga penting diapresiasi beberapa kelebihanannya:

- 1) Penyusunan kurikulum ini cukup mudah karena materi pelajaran diambil dari ilmu yang sudah disusun secara sistematis-logis.
- 2) Karena model kurikulum sudah dikenal secara luas dan lama, maka lebih memudahkan penggunaannya.
- 3) Bentuk ini memudahkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, sebab pada perguruan tinggi umumnya digunakan bentuk kurikulum ini.
- 4) Bentuk kurikulum ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien.
- 5) Bentuk ini sangat ampuh sebagai alat untuk melestarikan dan mewariskan warisan budaya masa lalu. (Sukmadinata, 2000: 114 -115).

**b. *The disciplines design***

Bentuk kurikulum ini merupakan pengembangan dari *subject design* yang masih menekankan pada isi atau materi kurikulum. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Pada *subject design* belum ada kriteria yang tegas mengenai apa yang disebut *subject* atau ilmu. Sedangkan pada *disciplines design* kriteria itu sudah cukup tegas, di mana dibedakan suatu pengetahuan dengan ilmu atau *subject* dan bukan batang tubuh keilmuannya.

Perbedaan lainnya adalah dalam tingkat penguasaan, *disciplines design* tidak seperti *subject design* yang menekankan pada penguasaan fakta-fakta dan informasi, tetapi pada pemahaman. Siswa dikondisikan untuk memahami logika atau struktur dasar sebuah disiplin, memahami konsep-konsep, ide-ide, prinsip-prinsip penting, dan juga didorong untuk memahami metodologi. Proses belajar model kurikulum ini tidak lagi menggunakan pendekatan ekspositori yang menyebabkan siswa lebih pasif, tetapi menggunakan pendekatan *inquiry* dan *discovery*.

### c. *The board fields design*

Model kurikulum ini tidak memisahkan antara mata pelajaran yang ada. Oleh karena itu, jika menginginkan konsep integritas ilmu maka pendekatan ini dapat dipertimbangkan penerapannya. Tujuan pengembangan kurikulum model *the boards fields design* adalah menyiapkan siswa yang dewasa untuk hidup dalam dunia informasi yang bersifat khusus, dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh. Bentuk kurikulum ini banyak digunakan pada kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ada dua kelebihan penggunaan kurikulum model ini. *Pertama*, karena dasarnya bahan yang terpisah-pisah, walaupun sudah terjadi penyatuan beberapa mata pelajaran, tapi masih memungkinkan bagi penyusunan warisan-warisan budaya secara sistematis dan teratur. *Kedua*, karena mengintegrasikan beberapa mata pelajaran memungkinkan siswa melihat hubungan antara berbagai hal.

Kelemahan yang terdapat dalam model kurikulum ini adalah guru akan kesulitan memahami konsekuensi yang detail mengenai struktur keilmuan yang lebih rumit, yang untuk tingkat dasar mungkin tidak masalah. Guru akan mengalami kesulitan untuk menerangkan pelajaran secara detail. Resiko untuk menggeneralisir akan sangat mudah terjadi karena mengintegrasikan ilmu merupakan persoalan yang sangat rumit. Desain kurikulum model ini juga kurang menekankan proses pencapaian tujuan yang sifatnya afektif dan kognitif tingkat tinggi (Sukmadinata, 2000: 117).

## 2. *Learner Centered Design*

Model desain kurikulum ini merupakan pengembangan dari model *subject centered design*. Model kurikulum ini memberikan tempat utama bagi siswa, sehingga guru hanya

berperan sebagai fasilitator yang menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong, dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Ada beberapa hal yang membedakan antara model *subject centered design* dan *learner centered design*. *Pertama*, learner centered design mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik, bukan dari *content*. *Kedua*, *learner centered design* bersifat *not-preplanned* tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam penyelesaian tugas-tugas pendidikan.

Model kurikulum ini dapat dikembangkan dalam bentuk-bentuk berikut di antaranya adalah model *the activity* atau *experience design*. Model ini mempunyai ciri-ciri khusus. *Pertama*, struktur kurikulum ditentukan oleh *need* dan minat siswa. Guru dalam hal ini harus menemukan minat dan kebutuhan peserta didik, membantu siswa memilih kecenderungan yang penting, sehingga guru perlu memahami secara detail kondisi siswa yang dibimbingnya. *Kedua*, kurikulum tidak dapat disusun secara final dan langsung jadi, tetapi harus dikonfirmasi bersama guru dan siswa. *Ketiga*, desain kurikulum ini menekankan pada prosedur *problem solving*.

Kelebihan desain kurikulum ini di antaranya adalah munculnya partisipasi belajar yang kuat dari siswa karena materi pelajaran dipertimbangkan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Pada model ini pengajaran memperhatikan perbedaan individual. Selanjutnya, model ini memungkinkan siswa memiliki bekal dan mampu bersaing dalam kehidupan .

Kritik juga muncul dalam merespon keberadaan kurikulum model ini. *Pertama*, penekanan pada minat siswa belum tentu cocok untuk siswa dalam menghadapi kehidupan mereka. *Kedua*, karena kurikulum menekankan pada minat siswa, maka kurikulum tidak mempunyai pola dan struktur. *Ketiga*, *activity design curriculum* sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuens bahan. Dasar minat peserta didik tidak

memberikan landasan yang kuat untuk menyusun sekuens, sebab minat amat mudah berubah (Sukmadinata, 2000: 119).

### **3. *Problem Centered Design***

Model desain kurikulum ini bertolak dari filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Berbeda dengan *learner centered* yang mengutamakan siswa secara individual, maka *problem centered design* menekankan manusia dalam kesatuan kelompok yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan yang melandasi perancangan model ini berakar dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk *homo socius* selalu hidup bersama. Karena itu pendekatan pendidikan ini agak mirip dengan filsafat *learning to live together* yang direkomendasikan UNESCO akhir-akhir ini.

Paling tidak kita mengenal dua bentuk pengembangan model kurikulum ini:

#### **a. *The areas of living design***

Model kurikulum ini dikenal sebagai bentuk kurikulum yang menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Model ini juga menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari siswa sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan.

Kelebihan desain kurikulum ini, di antaranya: *pertama*, model ini merupakan *the subject matter design* tetapi dalam bentuk yang terintegrasi. Pemisahan antara subject matter dihilangkan oleh problem-problem kehidupan sosial. *Kedua*, karena kurikulum diorganisasi-kan di sekitar problem-problem siswa dalam kehidupan sosialnya, maka desain ini mendorong penggunaan prosedur belajar pemecahan masalah.

*Ketiga*, model ini juga menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk yang relavan, sehingga siswa melalui kurikulum ini akan memperoleh pengetahuan dan dapat menginternalisasikan maknanya. *Keempat*, desain ini menyajikan bahan ajar dalam bentuk fungsional karena

diarahkan untuk memecahkan masalah. *Kelima*, model ini dapat merangsang kesadaran belajar siswa secara internal.

Di antara kelemahan model ini adalah sangat sulit menentukan lingkup dan sekuens (urutan) dari bidang-bidang kehidupan yang amat esensial. Sebagai lanjutan dari kesulitan pertama, maka akan terjadi kesukaran dalam mengintegrasikan dan mengorganisasikan kurikulum. Desain ini juga mengabaikan warisan budaya, padahal apa yang telah ditemukan di masa lalu penting untuk dipahami dalam memecahkan masalah-masalah masa kini.

Model *the areas living design* memungkinkan hanya memusatkan perhatian pada pemecahan masalah sosial, sehingga cenderung mengindoktrinasi siswa dengan kondisi yang ada sekarang dengan tidak melihat perbandingan alternatif lain. Lalu model ini juga masih mengalami kelangkaan konsep yang jelas mengenai model ini sehingga sulit dalam pelaksanaannya.

#### **b. *The core design***

Istilah *core design* atau *core curriculum* merujuk pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian terpenting dari program pendidikan umum di sekolah. Dalam pelaksanaannya, model ini memerlukan pertimbangan masalah penggunaan waktu yang fleksibel. Dalam batasan tertentu kurikulum model ini banyak memiliki kesamaan dengan *board field design*, karena menggabungkan beberapa disiplin keilmuan (Abdullah, 1999: 34). *The core design* memungkinkan siswa untuk memiliki wawasan yang luas, tidak parsial.

Ada beberapa varian desain kurikulum ini, di antaranya adalah *the separate subject core*, *the correlated core* dan *the fused core*. *The separated subject core* mengandung upaya untuk mengatasi pemisahan antar mata pelajaran dan beberapa mata pelajaran yang dipandang mendasari atau menjadi inti mata pelajaran lainnya sebagai inti. *The correlated core* merupakan pengembangan lebih lanjut

dari model *the separated subject design* dengan jalan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang erat hubungannya.

*The fused core* merupakan pecahan dari *separate subject* yang pengintegrasianya bukan hanya antara dua atau tiga pelajaran tetapi lebih banyak. Sejarah, Geografi, Antropologi, Sosiologi, Ekonomi dipadukan menjadi studi kemasyarakatan. Dalam studi ini dikembangkan tema-tema umum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.

## **B. Organisasi Kurikulum**

Program pendidikan disusun dalam bentuk bidang studi. Suatu bidang studi adalah perpaduan dari beberapa mata pelajaran yang memiliki karakteristik yang sama. Organisasi kurikulum adalah pengorganisasian yang berkaitan dengan berbagai isi kurikulum (bahan ajar) dan pengalaman belajar. Struktur program/isi materi yang tersusun secara sistematis. Organisasi kurikulum menguraikan bagaimana bentuk dan tata urutan materi bidang studi tertentu harus disajikan di depan kelas. Dengan kata lain, bagaimana cara memilih bahan ajar dan cara menyajikan serta mengevaluasinya. Secara garis besar ada tiga bentuk pengorganisasian materi kurikulum yaitu:

### **1. *Separated subject curriculum.***

Organisasi materi kurikulum bentuk ini menyediakan segala bahan pelajaran dalam satu mata pelajaran (*subject*) yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain (B. Suryobroto, 1990: 3). Model ini bidang studi disusun secara terpisah dan diajarkan dengan pembatasan bahan serta waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya mata Pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, masing-masing diajarkan oleh guru bidang studi masing-masing dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Konsekuensinya, anak didik

harus semakin banyak mengambil mata pelajaran. Tyler dan Alexander menyebutkan bahwa organisasi kurikulum seperti ini digunakan dengan pola *school subject*, dan sejak beberapa abad hingga saat ini masih banyak ditemukan di berbagai lembaga pendidikan. Organisasi kurikulum ini terdiri dari macam-macam mata pelajaran. Anak didik harus menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ditentukan secara logis, sistematis dan mendalam (Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, 1986: 78). Dalam konteks kurikulum PAI, misalnya mata pelajaran PAI yang ada di madrasah dapat dikategorikan model *separated curriculum* ini. Karena mata pelajaran Aqidah Akhlaq, Fiqih, Al-Qur'an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam masing-masing berdiri sendiri dan terpisah, demikian juga uraian materinya disajikan secara terpisah pula.

## 2. *Correlated curriculum*.

Kurikulum ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup dalam mata pelajaran tersebut semakin luas. Kalau bidang studi yang sejenis dikelompokkan untuk membahas suatu topik yang relevan. Misalnya kelompok mata pelajaran Biologi, Fisika, Kimia disajikan dalam suatu kelompok bidang studi ilmu pengetahuan alam (IPA). Korelasi tersebut dengan memperhatikan tipe korelasinya, yaitu:

- a. Korelasi *okasional/incidental*, maksudnya korelasi dilaksanakan secara tiba-tiba atau insidental.
- b. Korelasi *etis*, yang bertujuan mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih pendidikan agama misalnya: pada pendidikan agama itu membicarakan tata cara menghormati tamu, orang tua, tetangga, teman sebaya dan lain sebagainya.
- c. Korelasi *sistematis*, yang mana korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru. Misalnya: bercocok tanam

padi dibahas dalam geografi dan ilmu tumbuh-tumbuhan (Abdullah Idi, 1999: 143-144).

### 3. *Integrated curriculum*

Pola *integrated curriculum* adalah pola penyusunan materi kurikulum di mana satu kelompok atau permasalahan dibahas dengan berbagai pokok bahasan, baik dari bidang studi yang sejenis maupun dari bidang studi lain yang relevan (Dakir, 2004: 33). *Integrated curriculum* meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan model pengorganisasian keseluruhan bahan pelajaran seperti ini diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupannya, apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan anak di luar sekolah (Nasution, 1998: 93). Dalam konteks kurikulum PAI, misalnya mata pelajaran PAI yang ada di sekolah umum dapat dipandang sebagai model *integrated curriculum* ini. Contoh lain, berintegrasinya jenis-jenis pendidikan nilai lainnya, seperti pendidikan Budi Pekerti, pendidikan Anti Korupsi ke dalam pendidikan agama.

Dari uraian-uraian tentang pola organisasi bahan kurikulum tersebut, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. *Tujuan bahan pelajaran*, mengajarkan keterampilan untuk masa sekarang dan masa depan, untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah (*problem solving*), untuk mengembangkan nilai-nilai dan untuk memupuk jiwa warga negara yang baik.
- b. *Sasaran bahan pelajaran*, siapakah pelajar itu, apakah latar belakang pendidikan dan pengalamannya, sampai dimanakah tingkat perkembangannya, bagaimana profil kepribadian dan motivasinya.
- c. *Pengorganisasian Bahan*, bagaimana bahan organisasi, apakah berdasarkan topik, konsep, kronologis dan lain-lain (Dakir, 2004: 40-43).

### C. Jenis-jenis Kurikulum

Seperti yang dikemukakan Sukmadinata (2000: 81-96), paling tidak terdapat empat jenis kurikulum yang penting diketahui sebagai dasar melakukan pengembangan kurikulum ke arah lebih baik dengan melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks.

#### 1. Kurikulum Subjek Akademis

Jenis ini adalah jenis tertua karena digunakan sejak sistem sekolah pertama kali diperkenalkan. Kurikulum ini berawal dari konsep pendidikan klasik seperti perrenialisme dan essensialisme yang selalu berorientasi pada nilai-nilai masa lalu, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, melestarikan dan meneruskan warisan budaya masa lalu. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik.

Kurikulum subjek akademis ini lebih mengutamakan isi pendidikan atau subject materi (*subject oriented curriculum*). Belajar adalah upaya menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu yang berkembang. Proses pembelajaran berpusat pada guru. Pada paradigma ini, belajar adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya (*gathering information*). Pelajaran disajikan berdasarkan disiplin per disiplin ilmu. Struktur muatan kurikulum lebih memperhatikan kata-kata kunci mata pelajaran atau mata kuliah dan pokok bahasan.

Karena jenis kurikulum ini lebih mementingkan pengetahuan, maka coraknya lebih bersifat intelektual. Bahkan nama-nama yang tercantum dalam kurikulum hampir sama dengan nama-nama disiplin ilmu yang ada, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman dan seterusnya.

Terdapat ciri-ciri khusus dari jenis kurikulum subjek akademis, apabila dilihat dari tujuan, metode, organisasi dan evaluasi. Tujuan jenis kurikulum ini adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan menguasai berbagai disiplin keilmuan diharapkan siswa memiliki konsep-konsep dan cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, metode yang banyak digunakan pada jenis kurikulum ini adalah metode ekspositori dan inkuiri. Ide-ide disampaikan guru untuk selanjutnya dikembangkan dan dielaborasi siswa.

Pola organisasi pada jenis kurikulum subjek akademis ini di antaranya adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Juga terdapat pola organisasi pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin keilmuan. Jenis kurikulum ini juga menggunakan pola organisasi seperti yang terdapat dalam model pengembangan kurikulum *integrated curriculum* dan *problem solving curriculum*.

Persoalan yang rumit dihadapi para pengembang kurikulum jenis subjek akademis adalah bagaimana memilih materi pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Namun ada beberapa saran yang dapat ditawarkan untuk mengatasi problem ini, yakni; mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan; mengutamakan kebutuhan masyarakat serta memilih dan menentukan aspek-aspek dari disiplin ilmu yang sangat diperlukan masyarakat; menekankan pengetahuan dasar yakni pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar bagi penguasaan disiplin ilmu lainnya.

Teori pendidikan klasik menjadi landasan bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid dan melatih peserta didik menggunakan ide-ide

dan proses “penelitian” melalui metode ekspositori dan inkuiri.

## **2. Kurikulum Humanistik**

Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual (kurikulum subjek akademis).

Jenis kurikulum ini didasarkan pada konsep aliran (teori) pendidikan individual (pendidikan progresif) dari John Dewey dan J. J Rousseau. Jenis ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa (*student centered*). Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Pandangan ini berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual. Arah pendidikan pada jenis kurikulum ini lebih menekankan bagaimana mengajar siswa merasakan dan menyikapi sebuah realitas kehidupan.

Tujuan pengajaran dalam jenis kurikulum ini adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan siswa dari lingkungannya. Agaknya Ivan Illich sangat setuju dengan jenis kurikulum ini dan dia sangat menolak sekolah yang jenis kurikulumnya yang mengalienasi siswa dari lingkungan sosial mereka (Illich, 2000).

Jenis kurikulum humanistik sering diidentikkan dengan model kurikulum yang memiliki ciri-ciri di antaranya memberikan peluang partisipasi siswa, mengintegrasikan beberapa kemampuan siswa dalam buah kesadaran belajar yang lebih tinggi, isi pendidikan relevan dengan kebutuhan

siswa dan kebutuhan masyarakat, jenis kurikulum ini juga memberi tempat utama pada pengembangan pribadi anak. Oleh karena itu, tujuan pendidikannya berupaya mengembangkan pribadi peserta didik. Materi pembelajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksikan terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berdasarkan refleksinya itu, ia dapat memahami dan menggunakannya bagi kehidupan.

Dalam praktik pembelajarannya, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik. Pendidik lebih merupakan ahli dalam metodologi dan membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya masing-masing.

### **3. Kurikulum Rekonstruksi Sosial**

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi

sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (crucial) dan bekerja sama untuk memecahkannya.

Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan jenis kurikulum yang telah dibicarakan sebelumnya. Kurikulum ini memusatkan perhatian pada problem sosial yang dihadapi masyarakat. Dasar pemikiran kurikulum ini lebih dekat dengan aliran *rekonstruksionisme*. Pandangan dasar jenis kurikulum ini adalah bahwa pendidikan bukanlah urusan pribadi tetapi kerja kolektif dan urusan bersama yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat.

Ada beberapa ciri jenis kurikulum ini, antara lain bahwa asumsi dasar arah pengembangan kurikulum ini adalah rekonstruksi sosial sebagai tujuan utama, yaitu menghadapkan siswa pada tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang dihadapi manusia. Jadi perhatian jenis kurikulum ini lebih terfokus pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Pola organisasi jenis kurikulum ini disusun seperti roda sehingga semua komponen dalam kurikulum saling berkait kelindan secara utuh. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial terdiri dari tujuan dan isi kurikulum, metode, dan evaluasi.

Pelaksanaan kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang belum maju tingkat ekonomi dan sosialnya.

#### **4. Kurikulum Teknologis**

Teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum, yaitu model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi. Dalam teknologi pendidikan, yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan praktis-vokasional. Pembelajaran

dilakukan melalui pembelajaran individual, media buku atau pun media elektronik, sehingga pembelajar dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat global menghendaki adanya pola pengembangan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, jenis pengembangan kurikulum ini lebih memperhatikan perkembangan teknologi.

Ada beberapa ciri kurikulum teknologis, di antaranya adalah jenis kurikulum ini tujuannya diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode yang dipertimbangkan dalam kurikulum jenis ini selalu diarahkan agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk merespon perkembangan teknologi. Organisasi bahan ajar jenis kurikulum teknologis dikembangkan dari berbagai disiplin keilmuan dengan mengalami sintesis kreatif. Selanjutnya, evaluasi jenis kurikulum ini dapat dilakukan setiap saat sebagai umpan balik, penyempurnaan satuan pelajaran dan seterusnya.

Pengembangan kurikulum teknologis memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain.
- b. Hasil pengembangan kurikulum yang berbentuk model harus dapat diuji coba ulang dan memberikan hasil yang lebih baik

Inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanannya pada kompetensi (Sukmadinata, 2000: 99). Kurikulum berbasis kompetensi (KBK/KTSP) yang sedang diterapkan sekarang tampaknya bertitik tolak dari jenis kurikulum teknologis ini.

### **Pertanyaan dan Tugas**

1. Uraikan definisi konsep desain kurikulum!
2. Sebutkan dan jelaskan model desain kurikulum yang ada!
3. Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan beberapa model desain kurikulum tersebut !
4. Jelaskan pola organisasi bahan/materi kurikulum serta kelebihan dan kekurangannya serta berikan contoh masing-masing!
5. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis kurikulum yang ada!
6. Sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan beberapa jenis kurikulum tersebut

## **BAB V**

### **KURIKULUM INTI (*CORE CURRICULUM*), KURIKULUM TERSEMBUNYI (*HIDDEN CURRICULUM*) DAN MUATAN LOKAL (MULOK)**

Bab ini memaparkan tentang kurikulum inti (*core curriculum*), kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), dan kurikulum muatan lokal. Ketiga pokok bahasan ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa calon guru dan para guru, sebab hal ini terkait langsung dengan aktivitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, dengan mempelajari bab ini mahasiswa calon guru dan para guru dapat memahami, menerapkan, dan mengembangkannya di sekolah tempat mereka mengabdikan ilmunya.

#### **A. Kurikulum Inti ( *core curriculum* )**

BAB X KURIKULUM Pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ayat (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 37**

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 38**

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kurikulum merupakan alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu, pengenalan tentang arti, asas dan faktor-faktor serta komponen-komponen kurikulum penting dipahami dalam mendesain perencanaan pembelajaran. Kurikulum inti (*core curriculum*) adalah seperangkat pengalaman belajar yang harus diberikan kepada peserta didik, baik berupa kebutuhan individual maupun kebutuhan umum. Program inti (*core program*) berisi masalah yang luas untuk memenuhi kebutuhan individual dan sosial peserta didik (Dakir, 2004: 7), serta kebutuhan universal manusia. Kurikulum inti disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa (Oemar Hamalik, 2007: 137).

Dari definisi di atas dapat dipahami ciri-ciri kurikulum inti itu adalah :

1. Merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan
2. Direncanakan secara terus menerus
3. Didasarkan atas masalah atau problem
4. Bersifat kebutuhan pribadi dan sosial
5. Diperuntukkan bagi semua siswa, jadi termasuk pendidikan umum (Nasution, 1993: 115).

Kurikulum inti adalah seluruh mata pelajaran pokok yang diajarkan di sekolah, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Olah Raga atau Penjaskes. *Core* ini menggunakan bahan dari segala disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang banyak dihadapi, termasuk bahan dari lingkungan. Bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dari program ini. *Core* ini dikembangkan dengan pola organisasi

kurikulum terpadu (*integrated curriculum*) dan diberikan dalam kelas dalam periode yang agak panjang, misalnya dalam dua jam berturut-turut.

Kurikulum inti muncul atas dasar pemikiran bahwa pendidikan memberikan tekanan kepada dua aspek yang berbeda, yaitu :

1. *Adanya reaksi terhadap mata pelajaran teori yang bercerai-berai yang mengakumulasi bahan pengetahuan.*

Mengorganisasi mata pelajaran dalam suatu inti yang menggabungkan banyak bahan pelajaran diharapkan merupakan cara yang dapat memperkaya isi mata pelajaran dengan makna yang lebih luas. Perkembangan ini menimbulkan lahirnya kurikulum inti yang didasarkan pada unifikasi mata pelajaran sebagai inti dari program pendidikan di sekolah.

2. *Perubahan konsep mengenai peranan sosial pendidikan di sekolah.*

Di dalam kehidupan masyarakat yang semakin terbagi-bagi oleh temuan yang timbul dari ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan adanya suatu program pendidikan yang menekankan pada mempertahankan nilai-nilai umum dan perspektif sosial yang dianut bersama.

Dengan demikian, munculnya kurikulum inti memberi tekanan pada keperluan sosial yang berbeda terutama dalam persoalan dan fungsi sosial. Dari tekanan yang kedua ini dapat ditarik suatu konsep bahwa kurikulum inti bersifat *society centered*.

Kurikulum inti yang mengutamakan unifikasi dalam mata pelajaran, tetap mendapat tempat utama dalam praktek pendidikan. Dewasa ini muncul konsep baru dalam kurikulum inti yang didasarkan pada diagnosa masyarakat. Konsep ini memandang sekolah sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi dan integrasi sosial. Analisis ini didasarkan pada gejala semakin menguatnya masalah disintegrasi dalam masyarakat. Ini mengandung makna betapa pentingnya pembinaan kurikulum yang menyangkut persoalan sosial yang terus menerus timbul dalam kehidupan

masyarakat. Akan tetapi, peranan sentral dari nilai-nilai sosial tidak jelas ditanggapi dalam kurikulum inti. Inilah yang menjadi kelemahan organisasi kurikulum inti.

Ada dua sifat yang membedakan kurikulum inti dengan kurikulum lainnya, yaitu :

1. *Kurikulum inti menekankan pada nilai-nilai sosial. Unsur universal dalam suatu kebudayaan memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat.* Inti dari universal itu terdiri atas nilai-nilai asasi atau norma yang mengendalikan aktivitas manusia. Berdasarkan norma atau patokan itu ditetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam masyarakat yang mengalami proses transisi, nilai-nilai itu tampak merosot dan muncul nilai-nilai baru yang berkompetisi dengan nilai-nilai lama. Sehubungan dengan itu, kurikulum inti ini dalam orientasinya harus dengan sengaja dan secara terus menerus bersifat normatif.
2. *Struktur kurikulum inti ditentukan oleh problem sosial dan perikehidupan sosial.* Kurikulum inti ditentukan oleh cara pengelompokan isu sosial. Dalam kurikulum inti, mata pelajaran digunakan untuk merumuskan dan memecahkan persoalan. Umpamanya untuk mempelajari soal-soal penyelenggaraan sumber-sumber alam, prosedurnya menggunakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, unsur yang membedakan dalam kurikulum inti bukan karena membuang batas-batas organisasi mata pelajaran, melainkan karena organisasi itu diganti dengan satu organisasi yang memberikan tekanan utama pada kehidupan sosial.

Menurut kurikulum inti luasnya lapangan kehidupan sosial memberikan ruang gerak bagi perhatian dan keperluan anak. Dengan demikian, kurikulum inti tidak merupakan suatu organisasi kurikulum yang bergantung pada perhatian sebagai prinsip organisasinya, walaupun perhatian itu digunakan sebagai unsur dinamis dalam kehidupan proses pendidikan. Meskipun persoalan

sosial penting dalam menentukan isi kurikulum bukan berarti akan menjamin suatu orientasi nilai dengan sengaja digunakan atau diajarkan. Persoalan lain, yang tampak untuk dijadikan bahan kritik ialah bahwa guru dan siswa amat terbatas kesanggupannya untuk memecahkan persoalan sosial secara langsung. Bila hal ini yang dikehendaki berarti sekolah berfungsi mencetak politikus-politikus masyarakat.

### **B. Kurikulum Tersembunyi (*Hidden Curriculum*)**

Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) adalah kurikulum yang tidak tertulis dan tidak direncanakan dalam kurikulum formal, tapi mempunyai pengaruh bagi proses pembelajaran dan pembentukan kepribadian siswa serta sistem persekolahan (Abdullah Idi, 2007: 49), istilah lain mungkin dapat digunakan adalah *laten curriculum*. Proses penanaman nilai-nilai yang baik seperti disiplin dan lain-lain, melalui perilaku guru selama proses pembelajaran dapat dipandang sebagai *hidden curriculum*. Dengan kata lain, *hidden curriculum* adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas dan di lingkungan sekolah pada saat proses pelaksanaan kurikulum ideal-konseptual menjadi kurikulum aktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri, seperti kebiasaan guru hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa, murid datang ke sekolah disambut para gurunya di gerbang sekolah sembari mengucapkan salam dan bersalaman dapat dipahami sebagai *hidden curriculum*, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum PAI di sekolah dan madrasah, yang mana hal-hal tersebut berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Kegiatan-kegiatan seperti upacara memperingati hari bersejarah nasional dan hari besar keagamaan dengan tausiyah termasuk dapat dipandang sebagai *hidden curriculum*.

### **C. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal**

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya

tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, yang materinya disesuaikan dan diperkaya dengan lingkungan setempat, seperti kerajinan, keterampilan, dan manifestasi kebudayaan daerahnya.

Di dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab X tentang **Kurikulum**, pasal 36 ayat (2) dinyatakan “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pasal ini mensyaratkan adanya muatan lokal. Menurut rumusan Depdikbud --*sekarang Kemendikbud*-- kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu (Lihat Depdikbud, 1992). Sehingga para peserta didik setelah menyelesaikan sekolahnya dapat berinteraksi dan berkreasi secara aktif-produktif dan defensif-akomodatif terhadap perkembangan dan tuntutan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Ketetapan di atas mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi objektif, seperti historis-geografis, sosial-kultural dan sosial-ekonomi, serta potensi dan kebutuhan daerah tersebut.

Bila mengacu pada UU No. 2/1989 (UUSPN lama), tujuan kurikulum muatan lokal adalah supaya anak didik memiliki bekal pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka. Dengan demikian, kurikulum muatan lokal hendaknya diarahkan untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didik supaya lebih siap menghadapi masa depan. Pelaksanaan Muatan lokal menjadi semakin relevan di era otonomi daerah seperti sekarang ini, bahkan dalam konteks ini mulok harus menjadi perhatian serius.

Kurikulum muatan lokal, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) awalnya dimaksudkan untuk membina peserta didik agar tidak tercerabut dari akar budaya di daerah tempat ia berada. Dalam hal ini, setidaknya peserta didik mengetahui tentang hal-hal penting dan potensi daerahnya, seperti potensi kesenian, sejarah, dan kekayaan alam daerahnya (Djauzak Ahmad, Kompas, 21/3/2000).

Akan tetapi, bila kita kembali pada kurikulum 1994 dulu, muatan lokal diarahkan menjadi suatu keterampilan yang diharapkan dapat diterima peserta didik sebagai pengantar ke jenjang pekerjaan. Oleh karena itu, muatan lokal setidaknya diarahkan pada pendidikan mata pencaharian (PMP). Dengan kata lain, kurikulum muatan lokal harus diarahkan pada keterkaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan dunia kerja dan keterampilan hidup (*life skill*) lainnya, bukan hanya bahasa dan kesenian daerah. Dengan kata lain, muatan lokal hendak memuat nilai-nilai dan potensi lokal yang harus dimuatkan dalam kurikulum dan benar-benar kebutuhan lokal, yaitu membekali peserta didik dengan hal-hal lokal, di mana ia berada. Misalnya, anak-anak petani, setidaknya, harus menguasai masalah pertanian sebagai kemampuan dasarnya. Akan tetapi, pada konteks sekarang, pengembangan muatan lokal menjadi sangat relevan dan fungsional jika dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan budaya lokal (kearifan lokal), demikian juga untuk daerah yang memiliki potensi bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain perlu memuat muatan lokal pelajaran seperti itu. Muatan lokal menjadi penting jika membekali siswa di daerah seperti itu membekali pengetahuan tentang bencana alam tersebut dan upaya menghindari dan menyikapinya.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum muatan lokal tersebut, selain memberikan pelajaran atau keterampilan yang terkait dengan dunia kerja, juga hendaknya menjalin hubungan kerjasama (MoU) dengan pihak-pihak terkait yang akan menggunakan jasa lulusan (Abdullah, dalam Hidayat dan Prasetyo, ed., 2000: 83-84). Dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal dapat

dikemas dalam wadah lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri atau dapat pula dengan cara menjabarkan dan menambah bahan kajian dari GBPP mata pelajaran, dapat berintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan. Untuk dapat mengembangkan muatan lokal dengan baik perlu kiranya tetap menggunakan pendekatan-pendekatan yang berlaku dalam kurikulum nasional, seperti pendekatan tematis, terutama berkaitan dengan bidang-bidang sosial, ekonomi, perkebunan, peradaban, dan sebagainya, yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan lokal merupakan *mata pelajaran*, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

### **Pertanyaan dan Tugas**

1. Jelaskan definisi konsep kurikulum inti (*core curriculum*) dan ciri-cirinya serta berikan contohnya!
2. Jelaskan definisi kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), berikan contoh dan teknik pengembangan!
3. Jelaskan definisi konsep kurikulum muatan lokal (mulok) dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengembangannya, dalam konteks PAI apa bentuk mulok yang relevan untuk dikembangkan!



## **BAB VI**

### **PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**

Bab ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum tahun 2004 dan seluk-beluknya. Setelah mahasiswa calon guru mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami konsep dan filosofi serta seluk-beluk Kurikulum Berbasis Kompetensi secara komprehensif dan dapat menerapkan dan mengembangkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

#### **A. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi**

KBK difahami sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik dalam bentuk penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai-nilai, sikap, dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab (E. Mulyasa, 2003:39).

Penguasaan siswa terhadap beberapa kompetensi yang dimiliki setelah mengikuti program pendidikan tertentu seperti yang dikemukakan Mulyasa di atas, lebih dimaknai sebagai konsekuensi dari pemahaman istilah kompetensi (*competency*). Gordon (1988: 109) mengemukakan beberapa aspek yang dilingkupi oleh istilah kompetensi:

1. Pengetahuan, yang berupa kesadaran dalam bidang kognitif.
2. Pemahaman, sebagai kedalaman kognitif.
3. Kemampuan atau skill, yang berupa kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Nilai, yang merupakan standar perilaku yang telah diyakini dan menyatu dalam diri mereka secara psikologis dan sosial.
5. Sikap, berupa perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
6. Minat yang merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Makna kompetensi jika merujuk pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Selanjutnya, Maskur mengartikan kompetensi dengan sejumlah kemampuan dasar (*basic ability*) yang dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan sesuatu secara efektif. Dalam terminologi pendidikan kompetensi yang dimaksudkan adalah penampilan yang tampak pada kemampuan yang ditunjukkan (*observable*) dan terukur (*measurable*).

Dalam pembelajaran, kompetensi merupakan serangkaian kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki siswa setelah mengalami pendidikan dan latihan sebagai pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dilakukan secara berkesinambungan. Kompetensi bersifat individual, kontekstual, dinamis, dan berkembang secara berkelanjutan sejalan dengan tingkat perkembangan siswa.

KBK merupakan salah satu pendekatan dalam mengimplementasikan berbagai layanan belajar kepada siswa agar mereka berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Suryadin, *Bangka Pos*, Juni 2003). KBK pada dasarnya akan kurang bermakna jika tidak dicermati dengan baik dalam konteks melakukan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Hal ini sangat penting dikemukakan mengingat proses pembelajaran sering diarahkan tanpa mengacu pada penguasaan kompetensi tertentu.

Paling tidak ada beberapa hal yang penting dipahami ketika melakukan proses pembelajaran untuk menuju penguasaan kompetensi:

1. Kegiatan pembelajaran harus menerapkan konsep *student centered* yakni proses pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan belajar mengajar, pengorganisasian kelas, penentuan materi, pemilihan waktu belajar, media belajar dan seterusnya harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Sudah bukan saatnya lagi guru memandang siswa sebagai “botol kosong” yang harus diisi sesuai dengan kemauan guru. Artinya, kegiatan belajar mengajar perlu memperhatikan minat, bakat, kemampuan, cara belajar, motivasi belajar dan latar belakang sosial siswa. Proses pembelajaran mesti mendorong siswa melakukan kegiatan belajar dalam kerangka mengembangkan potensi mereka secara optimal.
2. Proses belajar mengajar harus mempertimbangkan konsep *learning to do*, sehingga kegiatan belajar memberikan pengalaman nyata dalam kehidupan keseharian dan dunia kerja yang terkait dengan penerapan konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Proses belajar mengajar harus mengembangkan kemampuan sosial, sehingga siswa lebih mudah membangun pemahaman apabila mengkomunikasikan gagasannya dengan siswa lain. Siswa akan mungkin mengembangkan pemahaman mereka dengan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Untuk itu, metode diskusi, saling tukar ide (*sharing idea*), bertanya dan menjelaskan merupakan metodologi yang perlu diterapkan. Interaksi belajar juga dapat ditingkatkan melalui belajar kelompok. Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, dan memantapkan atau menyempurnakan gagasan mereka

karena memperoleh tanggapan dari siswa lain dan guru. Kegiatan belajar mengajar perlu mendorong siswa untuk mengkomunikasikan gagasan hasil kreasi dan temuan kepada siswa lain, guru dan pihak lainnya. Kegiatan belajar mengajar yang demikian memungkinkan siswa bersosialisasi dengan menghargai perbedaan pendapat, sikap, kemampuan, prestasi dan terus berlatih untuk bekerjasama. Di sini berarti kegiatan belajar perlu mempertimbangkan konsep *cooperative learning*.

4. Proses pembelajaran perlu juga mengembangkan keingintahuan (*curiosity*) siswa, semangat imajinasi dan fitrah ber-Tuhan. Kemampuan tersebut penting dicermati mengingat secara pribadi potensi di atas selalu dimiliki oleh semua orang (peserta didik), sehingga proses belajar mengajar harus menyentuh wilayah psikologis itu.
5. Proses pembelajaran harus mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (*problem solving*). Kegiatan belajar mengajar hendaknya dipilih dan didesain agar mampu mendorong dan melatih siswa untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan menggunakan kemampuan kognitif dan meta kognitif. Selain itu, kegiatan belajar juga mesti mampu merangsang siswa untuk secara aktif mencari jawaban atau permasalahan dengan menggunakan prosedur ilmiah standar.
6. Pengembangan daya kreatifitas siswa merupakan aspek lain yang juga perlu disentuh oleh proses pembelajaran.
7. Proses pembelajaran mesti mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa perlu mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar perlu memberikan peluang kepada siswa untuk mengakses informasi dari multi media setidaknya dalam penyajian materi dan penggunaan media pembelajaran.

8. Kesadaran sebagai warga negara yang baik adalah dimensi yang tidak bisa diabaikan oleh kegiatan belajar mengajar. Siswa perlu memperoleh wawasan dan kesadaran untuk menjadi warga negara yang kreatif, inovatif, produktif, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar perlu memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial yang mampu membekali siswa agar menjadi warga masyarakat dan warga negara yang bertanggungjawab. Dengan pemberian wawasan seperti ini akan menumbuhkan semangat siswa dan menimbulkan kesadaran siswa akan kemajemukan bangsa, keragaman latar belakang sosial, etnis, budaya, adat istiadat, agama, sumber daya alam dan sumber daya manusia.
9. Proses pembelajaran di sekolah harus mampu menanamkan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*long life learning*).
10. Kegiatan belajar mengajar harus juga menumbuhkan semangat berkompetisi, bekerja sama, dan mengembangkan solidaritas. Kegiatan belajar mengajar perlu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan semangat untuk bersaing secara sehat dan melatih kemandirian.

Prinsip-prinsip di atas penting untuk diapresiasi oleh semua masyarakat pendidikan agar proses pengembangan potensi dan kepribadian siswa dapat dioptimalkan.

### **B. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Seperti yang dikemukakan Mulyasa (2003: 42) karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi; dan pengembangan sistem pembelajaran.

Paling tidak ada lima karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi. *Pertama*, menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kolektif-klasikal. *Kedua*,

berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. *Ketiga*, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. *Keempat*, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. *Kelima*, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Lebih lanjut, menurut Mulyasa (2003) ada enam karakteristik yang lebih detail yang dapat dikemukakan sebagai karakteristik KBK) yakni: sistem belajar dengan modul, memanfaatkan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar dan belajar tuntas.

### **1. Sistem belajar dengan modul.**

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menggunakan model sebagai sistem pembelajarannya. Tujuan utama sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran di sekolah dari segi dana, waktu, fasilitas maupun tenaga. Pembelajaran dengan sistem modul mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Setiap modul harus memberikan informasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik dan bagaimana melakukannya serta sumber belajar apa yang perlu dirujuk.
- b. Modul merupakan sistem pembelajaran individual, sehingga mengupayakan agar melibatkan sebanyak mungkin ragam peserta didik. Dengan demikian, modul harus memungkinkan siswa mengalami kemajuan belajar sesuai dengan kemampuannya, memungkinkan siswa mengukur tingkat kemajuannya dan memfokuskan peserta didik pada tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur.
- c. Penerapan sistem modul harus memungkinkan siswa mencapai tujuan belajarnya secara mandiri dan aktif dan tidak sekedar membaca dan mendengar, tetapi juga

memberikan kesempatan dan kemampuan bagi siswa untuk melakukan *role playing* atau bermain peran.

- d. Materi yang disajikan dalam modul harus memenuhi standar yang logis dan sistematis sehingga memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya kapan saja dan di mana saja.
- e. Setiap modul memiliki mekanisme untuk mengukur kemampuan siswa secara mandiri dan dapat dilakukan kapan saja. Poin ini merupakan standar kelengkapan sebuah modul.

## 2. Menggunakan keseluruhan sumber belajar

Bukan rahasia lagi jika yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pembelajaran karena rendahnya kualitas sumber belajar dan belum diaksesnya sumber belajar secara maksimal. Dalam KBK guru tidak lagi bertindak sebagai sosok yang serba tahu dan menjadi satu-satunya sumber belajar.

Sumber belajar adalah semua yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dan proses belajar mengajar. Ada beragam sumber belajar yang penting dipahami antara lain yaitu: manusia, bahan, lingkungan, alat, aktifitas, dan sumber belajar yang memenuhi syarat edukatif lainnya, seperti sarana informasi elektronik.

Pada hakikatnya tidak ada satu sumber belajarpun yang dapat memenuhi segala macam keperluan aktifitas pembelajaran. Tetapi setidaknya ada beberapa kegunaan dari sumber belajar, antara lain:

- a. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar mengajar yang akan ditempuh.
- b. Merupakan pemandu teknis dan sebagai langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti dalam menguasai pengetahuan secara tuntas.

- c. Memberikan berbagai ilustrasi yang berhubungan dengan aspek-aspek bidang keilmuan yang dipelajari.
- d. Memberikan gambaran berkaitan dengan bidang keilmuan yang sedang dipelajari dengan bidang keilmuan lainnya.
- e. Menginformasikan sejumlah temuan baru yang berhubungan dengan disiplin keilmuan tertentu.
- f. Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul yang merupakan konsekuensi logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya kemampuan pemecahan masalah dalam bidang keilmuan tertentu.

### **3. Pengalaman lapangan**

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) selalu menekankan pada perolehan pengalaman lapangan untuk mendekatkan siswa dengan sesama dan lingkungan mereka nantinya. Pengalaman lapangan memungkinkan siswa memahami kondisi riil lingkungan yang ada di sekitar mereka.

Lingkungan lapangan yang mereka akses dapat dimaksimalkan pengelolaannya dengan membuat sebuah rancangan pembelajaran lapangan yang sistematis dan menyentuh kebutuhan siswa untuk bersosialisasi. Oleh sebab itu, masyarakat dan lingkungan sosial harus dilibatkan dengan intensif.

#### **a. Strategi belajar individual**

Segi lain yang ingin dicapai dari penerapan kurikulum berbasis kompetensi adalah semangat kemandirian dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan demikian, semangat curiositas (rasa ingin tahu) yang tinggi perlu ditanamkan pada siswa, sehingga dengan semangat itu mereka mampu bersikap aktif-kreatif mengakses berbagai sumber dan bahan belajar yang sangat kaya.

Pola pembelajaran dan metodologi yang diterapkan pada siswa dalam proses belajar mengajar harus selalu memberi peluang kreasi agar siswa dapat aktif belajar mandiri.

b. Kemudahan belajar

Orientasi akhir dari penerapan kurikulum berbasis kompetensi adalah siswa mengalami perubahan dalam hasil belajar yang lebih baik dan berkualitas. Untuk itu, kemudahan dalam belajar penting dikondisikan mengingat siswa akan kesulitan belajar jika mereka tidak didukung dengan format dan konsep belajar yang memudahkan mereka. Berbagai media, model *team teaching*, dan penekanan pada penguasaan lapangan adalah tawaran yang perlu diapresiasi dalam menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi.

c. Belajar tuntas

Salah satu tujuan dari proses pembelajaran melalui konsep KBK adalah mengarahkan siswa agar dapat memahami pengetahuan secara utuh dan melakukan belajar tuntas. Beberapa langkah praktis yang penting diperhatikan untuk menuju konsep belajar tuntas, seperti merancang konsep belajar dengan matang, melakukan umpan balik yang baik, memberikan penjelasan tentang pelajaran dengan sistematis serta melakukan evaluasi secara akurat. Proses ini harus dilakukan agar siswa memahami materi dan pelajaran dengan utuh dan sempurna.

#### **4. Asumsi Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Menurut Enco Mulyasa (2003:56), ada tujuh asumsi kurikulum berbasis kompetensi:

- a. Realitas sekolah yang masih kekurangan tenaga guru yang profesional dan berkualitas baik membutuhkan peningkatan kualitas guru agar mampu melakukan tugas-tugas pendidikan yang mampu mencerdaskan siswa.
- b. Kurikulum berbasis kompetensi menyadari semua pihak akan pentingnya memberikan pengetahuan yang benar dan menumbuhkan semangat kemandirian siswa

agar menjadi lebih kreatif. Untuk itu, pengajaran bukan hanya sekedar proses mengajarkan materi semata-mata.

- c. Proses pembelajaran perlu mengarah pada konsep *student centered*, sehingga tidak memandang siswa seperti “botol kosong” belaka.
- d. Guru dengan konsep KBK dimungkinkan mampu mengantarkan siswa menuju perkembangan potensi dan minat mereka secara maksimal, sehingga sesuai dengan keinginan masing-masing secara terdidik.
- e. KBK memberikan kemungkinan pada semua komponen pendidikan untuk memaksimalkan aktifitas pembelajaran sehingga siswa dibawa ke alam realita.
- f. Kurikulum sekolah sudah saatnya diisi dengan berbagai kompetensi tujuan pendidikan yang jelas sesuai kebutuhan dan tuntutan masa depan siswa.
- g. KBK selalu menghendaki agar guru dapat memaksimalkan proses pembelajaran siswa sehingga segenap potensinya terberdayakan.

### **C. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Hal penting yang harus dipahami sebelum beranjak pada pemahaman mengenai arah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, terlebih dahulu harus diingat prinsip-prinsip dalam kurikulum berbasis kompetensi. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi harus dilihat sebagai satu kesatuan konsep yang meliputi perangkat rencana dan manajemen pengajaran yang diarahkan pada penguasaan kompetensi tertentu dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dan penilaian.

Kurikulum berbasis kompetensi secara umum terdiri dari komponen perangkat materi atau kurikulum dan hasil belajar, kegiatan mengajar, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah dan penilaian berbasis kelas. Kompetensi yang ingin dicapai dalam pengembangan KBK adalah pencapaian dan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan

dalam kebiasaan atau tradisi berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus yang memungkinkan siswa menjadi kompeten dalam pengertian memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.

Orientasi KBK adalah menghasilkan dan mengupayakan dampak yang ditimbulkan pada diri siswa melalui pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful*). Konsep KBK harus diorientasikan pada berbagai varian proses yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing.

### **1. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Pengelolaan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaannya. Secara lebih spesifik dan terarah, Mulyasa (2003:70) mengemukakan beberapa prinsip dasar pengembangan KBK, yakni:

- a. Keimanan, nilai dan budi pekerti luhur.
- b. Penguatan integritas nasional
- c. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan non estetika.
- d. Kesamaan memperoleh kesempatan
- e. Adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Pengembangan keterampilan hidup (*life skill*).
- g. Berorientasi *life long education*
- h. Bersifat *student centered*
- i. Menggunakan pendekatan kemitraan dan menyeluruh.

Prinsip-prinsip di atas harus diorganisir sedemikian rupa, sehingga bangunan kurikulum yang diterapkan dapat mengantarkan siswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

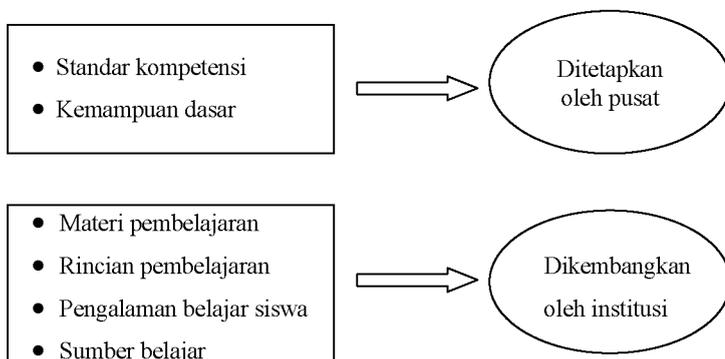
Beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan dalam merumuskan konsep KBK adalah memahami kebijakan nasional sebagai standar minimal yang diperlukan siswa untuk eksis dalam mengantisipasi perkembangan dan kecenderungan di dalam negeri. KBK harus memuat kompetensi standar yang mengacu pada kecenderungan

kebijakan nasional. Kualitas kompetensi hasil belajar siswa perlu dipertegas dengan menetapkan ukuran dalam beberapa indikator. KBK dapat di-implementasikan secara beragam pada tingkat kelas, sekolah, kelompok sekolah dan daerah.

Prinsip pengembangan KBK sangat terkait erat dengan prinsip pengembangan silabus dan seperangkat materi pelajaran yang disajikan. Prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan silabus di antaranya adalah *pertama*, harus bersifat ilmiah agar silabus tersebut dinilai valid. *Kedua*, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa dari sisi cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajiannya. *Ketiga*, sistematis yakni setiap materi tersusun dan saling berkaitan. *Keempat*, relevansi yaitu berhubungan dengan kehidupan siswa. *Kelima*, konsistensi yang berkaitan dengan kemampuan dasar, materi pembelajaran dan pengalaman belajar. *Keenam*, kecukupan yaitu kecukupan materi yang memadai untuk mendukung tercapainya standar kompetensi.

Silabus dalam KBK hendaknya berisikan komponen pokok yang dapat menjawab persoalan berikut: kompetensi apa yang akan dikembangkan pada siswa, bagaimana cara mengembangkannya, dan bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai siswa.

Lebih lanjut dapat dilihat pola berikut sebagai langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi:



## **2. Pendekatan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Pendekatan dalam pengembangan kurikulum mengandung pemahaman penyusunan kurikulum baru dan bisa juga dimaknai sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada.

Pendekatan kompetensi merupakan model pendekatan pengembangan kurikulum yang memfokuskan pada penguasaan kompetensi tertentu berdasarkan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Hampir semua pola pengembangan kurikulum selalu mengarah pada konsep yang lebih baik dari berbagai konsep yang ada.

Kurikulum berbasis kompetensi terkait dengan pendekatan pengembangan pribadi siswa yang mencakup kompetensi intelektual, sosial, dan komunikasi, penguasaan nilai-nilai, dan keterampilan tertentu. KBK juga terkait dengan penguasaan kompetensi yang berhubungan dengan penguasaan pengetahuan yang meliputi kajian dalam bidang-bidang yang beragam seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Olahraga, keterampilan dan kesenian.

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dapat mengacu pada tawaran umum sebagai acuan dalam melakukan pengembangan KBK. Mulyasa (2003: 66-68) mengemukakan, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan dalam mengembangkan kurikulum termasuk KBK, yakni berdasarkan sistem pengelolaan dan pendekatan berdasarkan fokus sasaran yang ingin dicapai.

### **a. Pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan sistem pengelolaan**

Ada dua bentuk sistem pengelolaan pengembangan kurikulum yaitu sistem sentralistik dan sistem desentralistik. Di Indonesia, sejarah pendidikan negeri ini selalu menggunakan pendekatan pengelolaan yang sentralistik. Semua konsep pengajaran ditentukan oleh

pusat yang bersifat nasional, seragam, dan guru-guru di sekolah hanya berfungsi sebagai pelaksana konsep pusat tersebut (*curriculum user*).

Sistem sentralistik dan seragam ini telah menyebabkan hasil pembelajaran dalam bentuk *out put* yang kurang kreatif dan tidak kritis. Hal ini dikarenakan sekolah dan guru-guru tidak diberi peluang untuk melakukan inovasi dalam hal pengembangan kurikulum.

#### **b. Pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan fokus sasaran**

Berdasarkan fokus sasaran, pengembangan kurikulum dibedakan antara pendekatan yang meng-utamakan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan kemampuan standar, penguasaan kompetensi, pembentukan pribadi, dan penguasaan kemampuan memecahkan masalah sosial kemasyarakatan.

Pendekatan penguasaan pengetahuan, kurikulum-nya selalu menekankan pada isi dan materi. Pendekatan kemampuan standar menekankan pada penguasaan kemampuan potensial yang dimiliki peserta didik sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Pendekatan pembentukan kepribadian menekankan pada pengembangan atau pembentukan aspek-aspek kepribadian secara utuh.

Pendekatan pemecahan masalah diarahkan kepada tercapainya masyarakat yang lebih baik. Terakhir, adalah pendekatan kompetensi, yang merupakan model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi semuanya harus diorientasikan pada tujuan akhir bahwa siswa harus terberdayakan dan memiliki kemampuan pribadi, intelektual, sosial-budaya agar dapat hidup secara mandiri.

## **BAB VII**

### **KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)**

Bab ini memaparkan persoalan seputar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau kurikulum tahun 2006, selanjutnya dalam makalah ini ditulis singkat KTSP saja. Beberapa pokok bahasan yang diuraikan meliputi: pengertian dan tujuan, karakteristik KTSP, dasar-dasar pengembangan KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP, implementasi dan pengembangan KTSP. Setelah mempelajari makalah ini peserta diklat dapat memahami konsep KTSP dan menerapkan dan mengembangkannya dalam pembelajaran di sekolah.

#### **A. Pengertian dan Tujuan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan paradigma baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yaitu dengan memberikan otonomi luas kepada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 152). KTSP merupakan suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran dan satuan pendidikan atau sekolah (Martinis Yamin, 2008: 10). Dalam hal ini sekolah dan satuan pendidikan diberikan otonomi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Menurut E. Mulyasa (2008: 21), pada sistem KTSP sekolah memiliki “*full authority and responsibility*”. Kurikulum ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan KTSP ini dilakukan oleh guru, kepala sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan.

KTSP disebut juga Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) karena menggunakan pendekatan kompetensi dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan kelas dan sebagai penyempurnaan Kurikulum 2004 (KBK) itu sendiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/madrasah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik (E. Mulyasa, 2007: 8-9). Secara definitif, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Pendidikan yang telah ditetapkan oleh BSNP. Jadi, KTSP merupakan kurikulum

operasional yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan/sekolah. Pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum. Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan paling lambat tahun 2009/2010 semua sekolah telah melaksanakan KTSP (Masnur Muslich, 2007: 10).

Menurut Masnur Muslich, antara kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kurikulum 2006 yang dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tidak terdapat perbedaan mendasar. KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK dikembangkan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh kompetensi dan kecerdasan dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Dalam arti, melalui penerapan KBK tamatan diharapkan memiliki kompetensi atau kemampuan akademik yang baik, keterampilan untuk menunjang hidup yang memadai, pengembangan moral yang terpuji, pembentukan karakter yang kuat, kebiasaan hidup yang sehat, semangat bekerja sama yang kompak, dan apresiasi estetika yang tinggi terhadap dunia sekitar. Sedangkan KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Jadi, KBK dan KTSP, keduanya sama-sama seperangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Akan tetapi, pada teknis pelaksanaannya, KTSP disusun oleh satuan pendidikan masing-masing, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan, walaupun masih tetap mengacu pada rambu-rambu nasional, yaitu Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh badan independen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam mengembangkan KTSP tersebut di level satuan pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah membuat panduan penyusunan KTSP. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/ MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam

penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Adapun tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, dengan diterapkannya KTSP diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai (Martinis Yamin, 2008: 22). Jadi, pengembangan KTSP bertujuan memandirikan atau memberdayakan sekolah atau madrasah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk merancang kurikulum sendiri dengan mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan, serta memonitor dan mengevaluasi kurikulum yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah tersebut secara otonom untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi.

## **B. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Kurikulum ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan serta sistem penilaian. Menurut E. Mulyasa (2007:29-31) ada beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut

### *1. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah dan Satuan Pendidikan*

KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dan satuan pendidikan juga diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

### *2. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua Yang Tinggi*

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum harus didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta secara optimal. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

### *3. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional*

Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional.

### *4. Tim Kerja Yang Kompak dan Transparan*

Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai berikut :

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan,

potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

2. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dengan demikian, dasar pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Di mana KTSP merupakan paradigma baru dalam pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan (E. Mulyasa, 2007: 20-22).

### **C. Landasan Formal Pengembangan KTSP**

Landasan kurikulum pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan (Martinis Yamin, 2008: 58). Dasar-dasar pengembangan kurikulum tersebut antara lain yaitu:

1. *Falsafah atau pandangan hidup*, yaitu sistem nilai dan berbagai norma yang disetujui, baik oleh individu maupun masyarakat suatu bangsa. Dari falsafah pendidikan akan diperoleh gambaran ideal manusia yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam bangsa, yaitu tujuan pendidikan

nasional yang mendasari tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional.

2. *Kemasyarakatan*, yaitu beranjak dari suatu masyarakat tertentu yang memiliki sistem keyakinan, sistem nilai, sistem kebutuhan, dan sistem permintaan. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan harus berpijak dan relevan dengan masyarakat tempat kurikulum tersebut akan dikembangkan dan dilaksanakan.
3. *Kebudayaan*. Kebudayaan bukan hanya berupa material belaka, melainkan juga berupa sikap mental, cara berpikir, dan kebiasaan hidup. Kebudayaan mencakup berbagai dimensi, diantaranya keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, teknologi, rekreasi, dan bantuan bagi kaum lemah. Semua dimensi tersebut hendaknya dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum.
4. *Pertumbuhan dan perkembangan siswa*, yaitu berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan siswa secara jasmaniah dan ruhaniah, seperti motivasi, minat, hubungan sosial, dan emosional, semuanya tercakup di dalam pola perkembangan dan pertumbuhan siswa.
5. *Psikologi belajar*, yaitu mengetengahkan beberapa teori belajar yang masing-masing menelaah proses mental dan intelektual perbuatan belajar tersebut.
6. *Organisasi kurikulum*, yaitu pola dan struktur kurikulum yang mempunyai tiga bentuk organisasi kurikulum yaitu, kurikulum mata pelajaran terpisah, kurikulum yang mengorelasikan mata pelajaran dalam bentuk bidang studi, dan kurikulum terintegrasi yang mengintegrasikan semua mata pelajaran dalam satu masalah atau proyek.

Secara teknis, pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilandasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
4. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
5. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23.

Uraian singkat mengenai isi dan pasal-pasal yang menjadi landasan dasar pengembangan KTSP di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Di dalam UUSPN ini dijelaskan bahwa, Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan tuntunan dunia kerja. Dalam Undang-Undang Sisdiknas juga dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan olah raga, Keterampilan dan Muatan Lokal (UU RI No. 20 Tahun 2003).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam PP ini dijelaskan bahwa, Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006. Dalam bagian penjelasannya dikemukakan bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 mengatur tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang termasuk dalam Standar Isi (SI) adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengatur Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan KTSP dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Beberapa landasan formal dan normatif dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan KTSP di tingkat satuan pendidikan. Di samping berpedoman pada landasan

formal dan normatif tersebut penyusunan KTSP juga harus mengacu pada acuan operasional berikut ini:

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
5. Tuntutan dunia kerja
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
7. Agama
8. Dinamika perkembangan global
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
11. Kesenjangan gender
12. Karakteristik satuan pendidikan

#### **D. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP**

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP hampir sama dengan KBK, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.*

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk dikembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. *Beragam dan terpadu.*

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi dan jender. Di mana kurikulum itu sendiri harus meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. *Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.*

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk

mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. *Relevan dengan kebutuhan kehidupan.*

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan

5. *Menyeluruh dan berkesinambungan.*

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. *Belajar sepanjang hayat.*

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. *Seimbang antara kepentingan nasional dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto “Bhineka Tunggal Ika” dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Muhaimin, et.al., 2008: 21-23). Kurikulum dikembangkan dengan

memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, KTSP disusun dengan memperhatikan beberapa faktor berikut ini (Masnur Muslich, 2007: 18-20):

1. *Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.*  
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum yang disusun memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
2. *Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.*  
Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
3. *Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.*  
Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.
4. *Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.*  
Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
5. *Tuntutan dunia kerja*  
Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. *Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni*

Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. *Agama*

Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, dan memerhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.

8. *Dinamika perkembangan sosial*

Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.

9. *Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.*

Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa.

10. *Kondisi sosial budaya masyarakat setempat*

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.

11. *Kesetaraan Gender*

Kurikulum harus diarahkan pada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

12. *Karakteristik satuan pendidikan*

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

Prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, dapat menjadi acuan dalam mengembangkan KTSP di sekolah dan madrasah.

### **E. Implementasi dan Pengembangan KTSP**

Implementasi kurikulum adalah proses aktualisasi kurikulum potensial (kurikulum tekstual) menjadi kurikulum aktual oleh guru/staf pengajar di dalam proses belajar mengajar (perkuliahan). Dalam studi kurikulum implementasi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum (Syafurudin Nurdin, 2002: 70-75). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

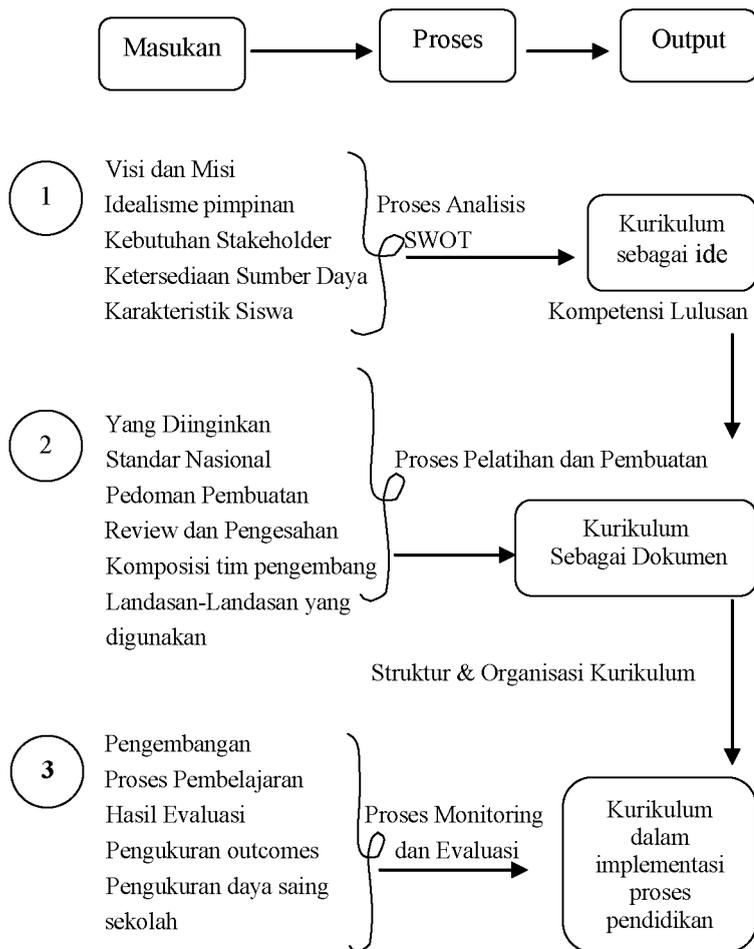
implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Implementasi KTSP berarti penerapan ide, konsep dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan (Kunandar, 2007: 233). Dalam konteks ini, guru harus mengubah paradigma dari *curriculum user* menjadi *curriculum developer*. Dengan kata lain, guru dituntut untuk keluar dari kultur kerja konvensional menjadi kultur kerja kreatif, inovatif, produktif, dinamis, dan progresif.

Sebagai sebuah rencana, kurikulum harus dirancang sesuai dengan berbagai kondisi yang ada. Oleh karena itu, proses perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses berantai yang berkesinambungan antara proses yang satu dengan proses yang lain. Kurikulum yang telah dikembangkan dalam bentuk dokumen atau konsep (*textual curriculum*) tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak di-implementasikan atau diaktualisasikan (*actual curriculum*), dalam artian dilaksanakan atau digunakan di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi kurikulum ini, ada beberapa dimensi penting yang harus dicermati, yaitu materi kurikulum, struktur organisasi materi, peranan atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai. Pada prinsipnya, implementasi kurikulum ini, mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, *subject matter*, strategi mengajar dan kegiatan belajar, serta evaluasi dan *feedback*. Keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasi-nya (Oemar Hamalik, 2007: 190). Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dari kegiatan akademik yang sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai dokumen. Berbagai komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran antara lain: kompetensi guru dalam menguasai materi, penguasaan strategi pembelajaran, dan keterampilan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar merupakan faktor penting dalam upaya merealisasikan atau mengaktualisasikan kurikulum.

Dalam konteks pengembangan dan pelaksanaan KTSP, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu berkaitan dengan sosialisasi KTSP di sekolah, menciptakan suasana yang kondusif, mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, membina disiplin, mengembangkan kemandirian kepala sekolah, mengubah paradigma (pola pikir) guru, dan memberdayakan staf. Implementasi KTSP tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak mampu dikembangkan dan diterapkan secara aktual dalam kegiatan pembelajaran oleh para sumber daya manusianya (SDM) serta dukungan sarana-prasarana yang memadai di sekolah itu. Dengan kata lain, implementasi KTSP sangat dipengaruhi oleh kondisi tenaga kependidikan dan sumber daya lain yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan.

Dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum tersebut pada intinya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : *pertama*, menghasilkan kurikulum sebagai suatu ide, kemudian berlanjut pada bagian kedua yang akan diwujudkan dalam sebuah dokumen perencanaan, dan dari dokumen perencanaan kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Keseluruhan tahapan pembuatan dan pengembangan kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut (Muhaimin, et. al., 2008: 24-25):

**Tabel 2.**  
**Tahapan Pembuatan dan Pengembangan KTSP**

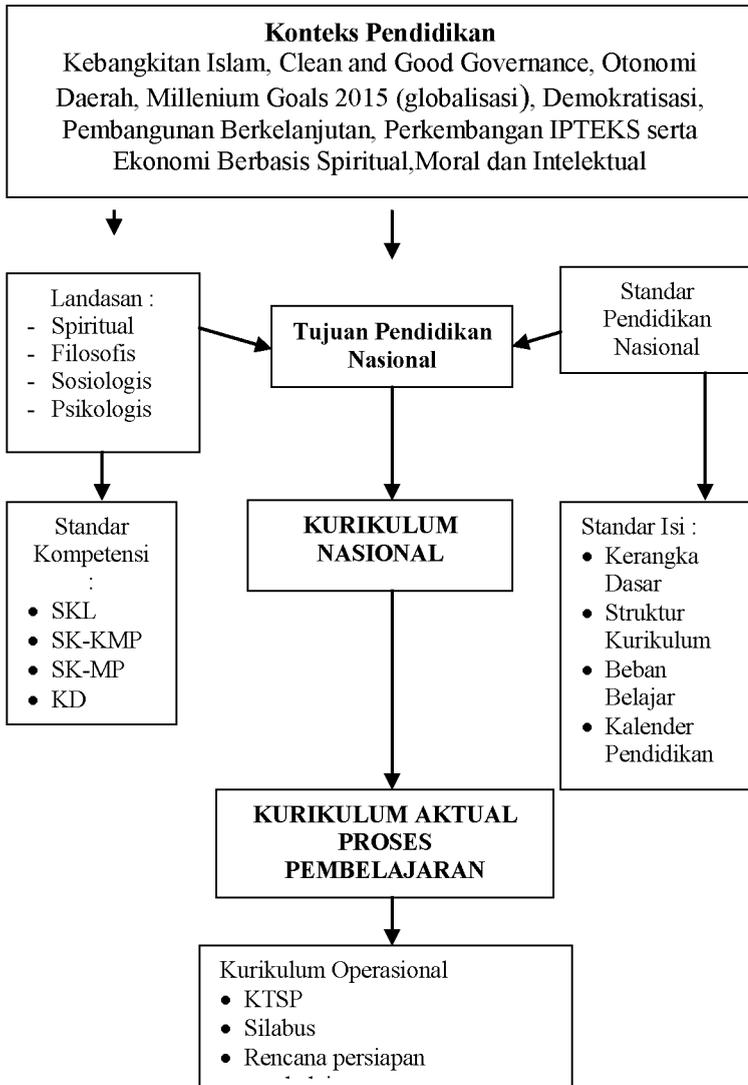


Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen, yang tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum di sekolah dan madrasah melibatkan banyak pihak, yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli

bidang ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, guru dan orang tua murid (Sukmadinata, 2005 :155)

Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Tim pengembang ini ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua siswa dan tokoh masyarakat (E. Mulyasa, 2007 : 21-22).

Coba perhatikan bagan 3 berikut ini :



Dari gambar di atas, tampak bahwa pengembangan kurikulum mencakup beberapa tingkatan (hierarki), yaitu:

1. Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasional

Dalam kaitannya dengan KTSP pengembangan kurikulum tingkat nasional dilakukan dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Pendidikan, yang

pada saat ini mencakup standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI) untuk setiap satuan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada jalur pendidikan sekolah.

5. Pengembangan KTSP di tingkat satuan pendidikan

Pada tahap pengembangan KTSP, kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a. Merumuskan visi dan misi serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. Menganalisis dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI).
- c. Berdasarkan SKL, SI, visi, misi serta tujuan satuan pendidikan, selanjutnya dikembangkan pada bidang studi-bidang studi yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut.
- d. Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga - tenaga kependidikan (guru dan non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dengan berpedoman pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh BSNP.
- e. Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP

6. Pengembangan Silabus

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tingkat ini, antara lain adalah :

- a. Mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tujuan setiap bidang studi.
- b. Mengembangkan kompetensi dasar dan materi standar (pokok) yang diperlukan dalam pembelajaran.
- c. Mendeskripsikan kompetensi dasar serta mengelompokkannya sesuai dengan ruang lingkup dan urutannya.

- d. Mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi serta kriteria pencapaiannya dan mengelompokkannya sesuai dengan ranah pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai dan sikap.
- e. Mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.

#### 7. Pengembangan RPP

Berdasarkan standar kompetensi dan standar isi dalam silabus yang telah diidentifikasi dan diurutkan sesuai dengan tingkat pencapaiannya pada setiap bidang studi, selanjutnya dikembangkan program-program pembelajaran. kegiatan pengembangan kurikulum pada tingkat ini adalah menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau persiapan mengajar.

#### 8. Kurikulum Aktual

Kurikulum aktual adalah interaksi antara peserta didik dengan guru dan lingkungan pembelajaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bagaimanapun bagusnya suatu kurikulum maka aktualisasinya sangat ditentukan oleh profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik (E. Mulyasa, 2007:148-151).

Dalam penyusunan KTSP pada tingkat sekolah/madrasah tertentu dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

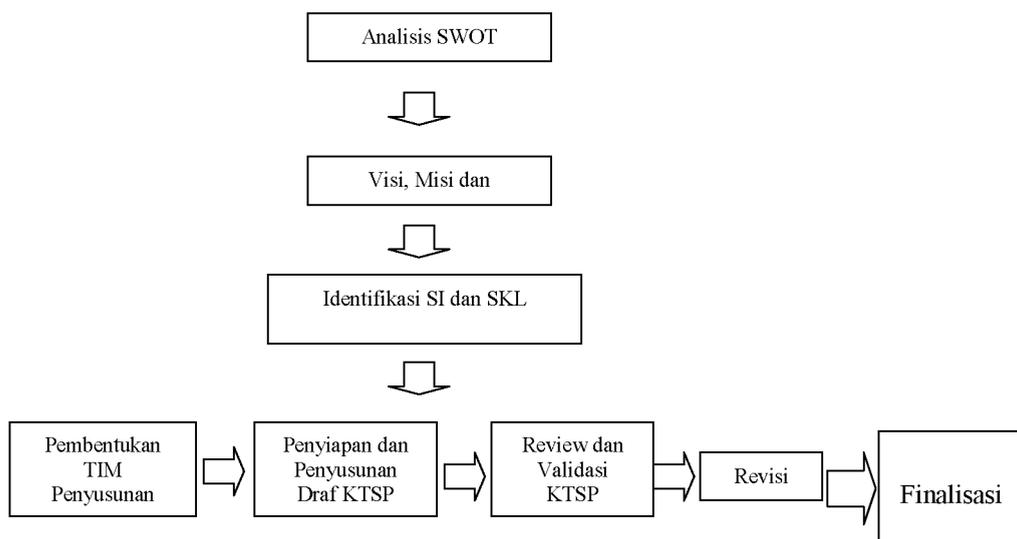
1. Melakukan analisis SWOT (*strenghten*/kekuatan, *weakness*/kelemahan, *opportunity*/peluang, *threat*/ancaman) terhadap konteks kondisi dan kebutuhan pada tingkat satuan pendidikan, visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah, standar isi dan standar kompetensi lulusan. Hal ini dapat dilakukan oleh top manager, komite sekolah/madrasah, para konselor dan konsultan ahli bila diperlukan.

2. Penyiapan draf penyusunan isi KTSP sesuai hasil analisis dan model KTSP yang dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing.
3. Melakukan pembahasan, review dan validasi model dan isi KTSP yang dihasilkan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan khusus atau forum-forum rapat kerja sekolah/madrasah dan konsultan ahli bila diperlukan.
4. Melakukan revisi dari hasil *review* dan validasi KTSP
5. Finalisasi produk KTSP yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang ditetapkan setelah mendapatkan pengesahan dari komite sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk tingkat SMA dan SMK. Sementara dokumen KTSP pada MI, MTs, MA dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapatkan pengesahan dari Komite Madrasah dan diketahui oleh Mapendais Kandepag Kotamadya/Kabupaten untuk MI dan MTs dan Kabid Mapendais Kanwil Kemenenag untuk MA dan MAK (E. Mulyasa, 2007: 35-36). Secara operasional penyusunan KTSP dapat mengacu pada acuan berikut ini:
  - a) Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
  - b) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
  - c) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
  - d)Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
  - e) Tuntutan dunia kerja
  - f) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
  - g) Agama
  - h) Dinamika perkembangan global

- i) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- j) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- k) Kesetaraan gender
- l) Karakteristik satuan pendidikan

Langkah-langkah tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

### Analisis Konteks Penyusunan KTSP



#### Isi KTSP

- Dasar pemikiran, landasan dan profil satuan pendidikan
- Standar kompetensi
- Struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar
- Pengembangan muatan lokal
- Kegiatan pengembangan diri
- Pendidikan kecakapan hidup
- Ketuntasan belajar, sistem penilaian, pindah sekolah/madrasah dan kriteria kelulusan ujian sekolah dan ujian nasional
- Revisi dan pengembangan kurikulum
- Kalender pendidikan
- Silabus dan RPP
- Disahkan oleh kepala sekolah/madrasah
- Diketahui oleh komite sekolah/madrasah dan dinas pendidikan kota/kabupaten/provinsi Mapenda kandepag kotamadya/ kabupaten untuk MI dan MTs, dan Kabid Mapenda Kanwil Depag untuk MA.

Dalam garis besarnya implementasi KTSP mencakup tiga kegiatan pokok yaitu :

1. *Pengembangan program*

Pengembangan KTSP mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial serta program bimbingan dan konseling.

2. *Pelaksanaan pembelajaran*

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan prilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan prilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu : Pre test, Proses dan Post test.

3. *Evaluasi*

Evaluasi hasil belajar dalam implementasi KTSP dilakukan dengan penilaian berbasis kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir saruan pendidikan dan sertifikasi, *bench marking*, dan penilaian program (Kunandar, 2007: 233).

Dari uraian beberapa sub pokok bahasan yang dikemukakan dapat ditegaskan bahwa mengenai langkah-langkah pengembangan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan konsep, penerapannya, serta evaluasinya maka pengembangan KTSP merupakan suatu kegiatan yang tidak sekali jadi, dalam arti ia harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, baik dalam aspek perencanaan, implementasi maupun evaluasinya. Kegiatan ini membutuhkan guru profesional, yaitu guru yang memiliki kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi sosial,

dan kompetensi kepribadian. Semua kompetensi itu harus terinternalisasi dan terintegrasi dalam diri pendidik.

#### **F. Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

**Apa itu silabus?** Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus menjawab tiga pertanyaan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu apa kompetensi yang harus dikuasai siswa, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana cara mengetahui pencapaiannya. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

**Apa landasan penyusunan silabus?** Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat (2), sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan **silabusnya** berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Silabus adalah penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai serta pokok-pokok uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem pengujian atau penilaian. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana

pembelajaran untuk mengajarkan suatu standar kompetensi maupun kompetensi dasar tertentu.

Seiring dengan maraknya isu otonomi pendidikan sesungguhnya memberikan angin segar bagi para pengelola sekolah untuk lebih kreatif dan menunjukkan sikap inovatif dalam melakukan berbagai program pengembangan, termasuk pengembangan silabus.

**Siapa yang menyusun silabus?** Silabus disusun oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu. Proses penyusunan silabus dapat saja disusun bersama oleh satu tim guru mata pelajaran, dalam satu kegiatan guru, misalnya dalam kegiatan MGMP. Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan mengikutsertakan para pakar pendidikan, ahli kurikulum, unsur pengambil kebijakan, dan bahkan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri (*stakeholder*). Ada beberapa prosedur yang dapat diikuti untuk melakukan pengembangan silabus yang bercorak KBK.

1. Tahap perencanaan, yang menghendaki tim pengembangan silabus melakukan pengumpulan informasi dan data, mengidentifikasi sumber belajar, serta menentukan nara sumber yang dapat dimintai saran dalam proses pengembangan silabus.
2. Tahap pelaksanaan, yang terdiri dari langkah-langkah: merumuskan kompetensi dan tujuan pembelajaran serta menentukan materi pembelajaran yang memuat kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator hasil belajar, menentukan metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran, menentukan alat penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi KBK.
3. Tahap revisi, yakni menguji draft silabus yang telah dirumuskan melalui analisis yang komprehensif dan melibatkan penilaian para ahli (Marno, 2011).

Menurut Mc Ashan (1981:57) ada enam cara yang dapat ditempuh untuk melakukan analisis kompetensi sebagai dasar membuat rumusan silabus kurikulum berbasis kompetensi.

*Pertama*, analisis tugas yang berfungsi untuk menggambarkan indikator-indikator kompetensi. *Kedua*, pola analisis yang jelas untuk mengembangkan keterampilan baru yang perlu dicapai. *Ketiga*, penelitian yang menjadi dasar analisis. *Keempat*, pertimbangan ahli sangat diperhitungkan dalam melakukan pengembangan silabus. *Kelima*, analisis kompetensi berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap penting. *Keenam*, analisis kompetensi berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap sejumlah orang yang melakukan peran tertentu.

Selanjutnya berdasarkan silabus yang telah disusun, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Perencanaan merupakan langkah yang sangat penting sebelum pelaksanaan kegiatan. Kegiatan belajar mengajar (KBM) membutuhkan perencanaan yang matang agar berjalan secara efektif. Perencanaan KBM dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau beberapa istilah lain seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran. RPP memuat seluruh KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, langkah pembelajaran, waktu, media dan sumber belajar serta penilaian untuk setiap KD.

Rencana pelaksanaan pembelajaran harus dibuat agar kegiatan pembelajaran berjalan sistematis dan mencapai tujuan pembelajaran, tanpa rencana pelaksanaan pembelajaran kegiatan pembelajaran di kelas biasanya tidak terarah. Oleh karena itu, peserta harus mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang disusunnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus mengimplementasikan PAIKEM atau PAIKEM Gembrot.

**Contoh Format RPP**

**Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Mata Pelajaran : .....

Kelas/Semester : .....

Pertemuan Ke- : .....

Alokasi Waktu : .....

Standar Kompetensi : .....

Kompetensi Dasar : .....

Indikator : .....

I. Tujuan Pembelajaran : .....

II. Materi Ajar : .....

III. Metode Pembelajaran : .....

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan pertama

1. Kegiatan Awal : .....

2. Kegiatan Inti : .....

3. Kegiatan Akhir : .....

Pertemuan kedua

## **Pertanyaan dan Tugas**

1. Jelaskan definisi, tujuan dan karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
2. Jelaskan dasar-dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP!
3. Jelaskan definisi urutan/ turunan proses pengembangan KTSP secara rinci !
4. Jelaskan apa itu silabus dan uraikan langkah-langkah pengembangannya!



## **BAB VIII**

### **KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

Ada tiga hal pokok yang akan diuraikan dalam bab ini, yaitu: hubungan kurikulum dan sistem pembelajaran, peranan guru dalam penerapan kurikulum, dan pengembangan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa calon guru diharapkan dapat memahami dan menerapkan serta mengembangkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik kurikulum secara tekstual-konseptual maupun kurikulum secara aktual-kontekstual. Untuk penjelasan yang lebih detil tentang pokok-pokok bahasan tersebut akan diuraikan pada uraian berikut ini.

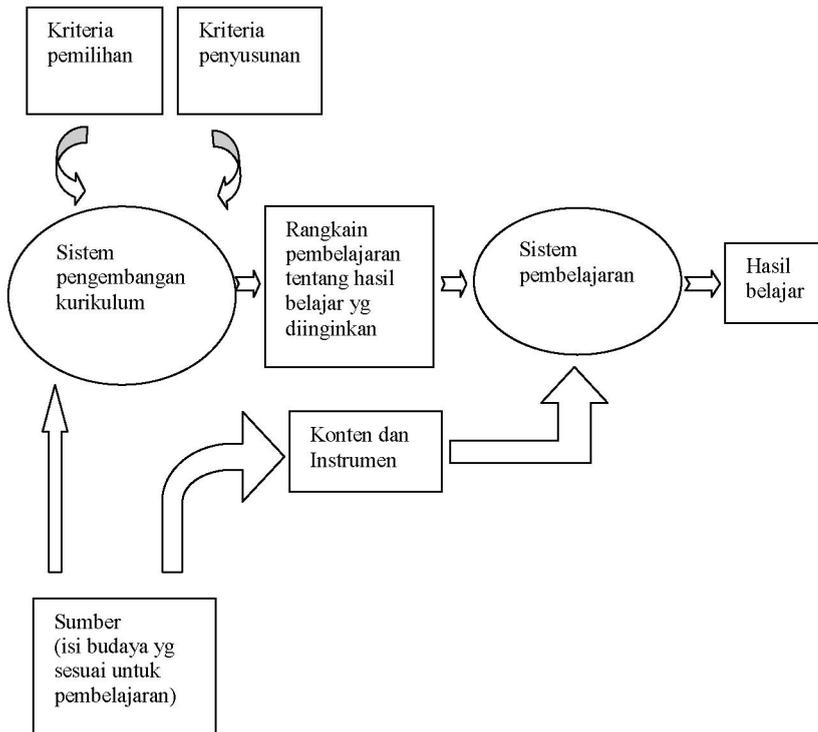
#### **A. Hubungan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran**

Kurikulum merupakan *in-put* dari sistem pengembangan kurikulum. Sedangkan *out-put* pengembangan kurikulum adalah sistem pembelajaran (Subandijah, 1993: 20). Istilah sistem hampir dapat ditemukan dalam semua bidang kehidupan dan disiplin ilmu. Dalam kaitannya dengan sistem pembelajaran, perlu dikemukakan pengertian beberapa istilah yang terkait dengan sistem untuk memudahkan pemahaman tentang sistem perencanaan pembelajaran. Sistem adalah gabungan dari komponen-komponen yang terorganisasi sebagai satu kesatuan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen adalah semua variabel (unsur-unsur yang mempengaruhi proses tercapainya tujuan yang ditetapkan). Proses adalah penerapan suatu cara atau metode dan sarana untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan (Muhaimin, 2001:159).

Dalam konteks pembelajaran, sistem dapat didefinisikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri atas bagian-bagian berkaitan untuk bekerjasama dalam mencapai hasil atau tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, sistem mempunyai sejumlah komponen, setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi antara komponen satu dengan lainnya saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya sistem pembelajaran terdiri atas tiga komponen atau bagian, yaitu: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk berbagai tingkat satuan waktu, yaitu: satuan waktu harian, catur wulan atau semester, atau bahkan tahunan. Perencanaan pembelajaran dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu pembelajaran secara nyata. Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi perencanaan untuk menghasilkan rencana pembelajaran atau unit pembelajaran dalam program pembelajaran itu. Dalam hal ini ada sejumlah bagian kurikulum yang mungkin sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan, yang dipilih dan diorganisasikan untuk kegiatan pembelajaran. Perencanaan program pembelajaran pada dasarnya memiliki kebebasan yang terbatas, sebab di dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kaidah dan aturan perencanaan pembelajaran (Subandijah, 1993:22).

Agar diperoleh pemahaman yang konkrit hubungan antara kurikulum dan sistem pembelajaran dapat dilihat melalui bagan berikut ini:



Sumber: Arno A. Bellack & Herbert Klinbard, *Curriculum and Evaluation*, Vol. I. Mr. Curthan Publishing Cooperation, 1977 dalam Subandijah, 1993:21.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pada kriteria penyusunan dan pemilihan aspek-aspek yang terkait dalam komponen kurikulum kemudian dilakukan kegiatan pengembangan kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penerapan kurikulum yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dalam pengembangan tersebut juga harus dipertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar agar nantinya memiliki nilai relevansi dengan kondisi masyarakat sekitar. Sistem pengembangan kurikulum tersebut diharapkan dapat melahirkan rangkaian pokok-pokok pembelajaran, yang kemudian mengkrystal ke dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran inilah yang merupakan aplikasi hasil pengembangan kurikulum. Dalam penerapannya sistem

pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi keluasaan dan kedalaman isi bahan pembelajaran, instrumen pendukung, perilaku dan kualitas pengajar dan sebagainya. Kesemuanya akan membentuk hasil belajar peserta didik, berhasil atau gagal (Subandijah, 1993: 20-21).

Jadi, antara kurikulum dan sistem pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Kurikulum yang terdiri atas beberapa komponennya itu merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran, sebab kurikulum merupakan bagian dari sistem pembelajaran. Penerapan kurikulum tidak akan efektif dan efisien jika tidak didukung oleh sistem pembelajaran yang kondusif dan produktif.

## **B. Peranan Guru dalam Implementasi Kurikulum**

Untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, calon guru harus memiliki empat standar kompetensi guru, yaitu (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Kompetensi pedagogis adalah kompetensi yang terkait dengan penguasaan guru tentang teori belajar mengajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, termasuk di dalamnya penguasaan terhadap hal-hal yang terkait dengan kurikulum. Seorang guru harus mampu mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran di kelas.

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, strategi yang tertuang dalam (*curriculum document*) diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran (*actual curriculum*). Implementasi kurikulum adalah proses aktualisasi kurikulum potensial (kurikulum ideal-konseptual) menjadi kurikulum aktual (kurikulum nyata) dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah oleh guru atau tenaga pengajar. Penerapan dan pengembangan kurikulum di tingkat sekolah sangat tergantung pada peranan dan profesionalitas seorang guru atau tenaga pengajar. Dengan kata lain, kurikulum tergantung pada “*who is behind the gun*” atau dalam istilah lain “*Not the song but the singer*”. Sebaik apa pun kurikulum pendidikan dirancang jika tidak diimbangi dengan

peningkatan kualitas profesi dan kompetensi guru sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum (*curriculum developer*) di lapangan, sulit pula kiranya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kualitas pendidikan sangat tergantung dengan kualitas tenaga pendidiknya. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk memahami perubahan dan penyempurnaan kurikulum serta melakukan pengembangan kurikulum (GBPP) pada mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan pada *level* pembelajaran di kelas atau sekolah. Sebab kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah sangat tergantung pada kemampuan guru menerapkan dan mengembangkan kurikulum yang telah tersusun. Selanjutnya, kualitas proses dan hasil pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru mendesain proses pembelajaran itu, membuat persiapan dan perencanaan program pembelajaran serta melaksanakannya dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 bahwa guru profesional meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.<sup>11</sup>

Dalam konteks penerapan kurikulum di kelas atau sekolah, setiap guru ataupun dosen pasti terlibat dalam masalah penerapan kurikulum itu. Kurikulum yang disusun dan ditentukan oleh

---

<sup>11</sup> Profesionalisme adalah pekerjaan/kegiatan yg dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yg memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi (UU No 14 th 2005 tentang guru dan dosen). Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi meliputi: pengetahuan, sikap, dan keterampilan professional, baik yang bersifat akademik-paedagogik (Materi pelajaran dan konsep serta metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan), pribadi, maupun sosial. Kompetensi kepribadian ialah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancarkan dalam perilaku sehari-hari. Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia (PP Nomor 19 thn 2005 ayat 3 pasal 28).

lembaga Pusat Pengembang Kurikulum (Puskur), Balitbang Depdiknas yang masih berupa barang cetakan atau buku pedoman tidak akan banyak berarti jika guru tidak dapat mengembangkannya dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Oleh karena itu, implementasi kurikulum (*actual curriculum*) dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah, kurikulum tersebut harus dikembangkan lebih lanjut oleh para guru. Agar hal itu dapat terwujud para guru harus memahami kurikulum tersebut agar dapat menerapkannya dalam bentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Sebab kurikulum yang bersifat buku pedoman dari pusat pengembang kurikulum belum dapat disampaikan di kelas, jika tidak dilakukan interpretasi, inovasi dan improvisasi oleh guru.

Berkaitan dengan upaya guru menerapkan kurikulum tersebut, S. Nasution (1995:2-3) mengemukakan beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh seorang guru.

*Pertama*, buku pedoman kurikulum itu harus dianalisis lebih lanjut dalam bentuk sejumlah topik, sub topik serta bahan yang lebih spesifik. Dalam hal ini harus jelas tujuan dan materi yang akan diajarkan. Hal ini biasanya tertuang dalam pedoman instruksional.

*Kedua*, seorang guru harus membuat rencana atau persiapan pembelajaran dalam jam pelajaran tertentu agar bahan pelajaran dapat disajikan kepada siswa di kelas secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik jika guru tidak memiliki persiapan yang baik pula. Tanpa persiapan guru tidak tahu ke mana siswa harus dibimbing, tujuan apa yang harus dicapai, perubahan perilaku apa yang harus dibangkitkan, sudah sampai di mana tujuan pelajaran telah tercapai, kesulitan apa yang dihadapi, kelemahan apa yang harus diperbaiki demi peningkatan kualitas, tugas apa yang harus dilakukan siswa untuk pelajaran berikutnya.

Guru secara individual melaksanakan proses perencanaan pembelajaran secara terus menerus dan pelaksanaannya sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini gurulah yang membuat pilihan terakhir tentang kegiatan belajar dan

isi instrumental yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kesesuaian sumber belajar, dan tuntutan pelaksanaan proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini, keputusan pembelajaran harus didasarkan pada harapan hasil yang telah dirumuskan oleh kurikulum dan dimasukkan dalam bidang studi dan unit pembelajaran (Subandijah, 1993: 22).

Dalam konteks pembelajaran, setidaknya ada beberapa fungsi kurikulum. *Pertama*, bagi para guru kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi peserta didik dan menjadi pedoman bagi guru untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. *Kedua*, bagi proses pembelajaran kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran itu sendiri (Soetopo, dkk., 1986:18). Dengan demikian, kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dan menentukan arah pengembangan tujuan dan kualitas suatu lembaga pendidikan.

### **C. Pengembangan Kurikulum dalam Kegiatan Pembelajaran**

Untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, guru atau calon guru harus memiliki empat standar kompetensi, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang terkait dengan penguasaan guru tentang teori belajar dan pembelajaran serta prinsip-prinsip pembelajaran, termasuk di dalamnya penguasaan terhadap hal-hal yang terkait dengan kurikulum dan pengembangannya.

Pengembangan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran adalah pengembangan kurikulum atas dasar mata pelajaran (*subject-based development*). Menurut Soetopo dan Soemanto (1986:57), ada beberapa langkah harus dilakukan dan dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas atau sekolah, yaitu: (1) berawal dari perubahan atau usaha untuk meningkatkan kualitas belajar pada suatu bidang studi tertentu; (2) Fokusnya terletak pada peningkatan bagian tertentu dari kurikulum; (3) pengembangan dimulai atas

dasar isi (*content*) dan tujuan-tujuan yang khusus; (4) lebih menekankan tahap-tahap persiapan (*planning*) dan diseminasi jenis materi kurikulum yang baru. Dengan kata lain, pengembangannya lebih mengikuti pola heuristik daripada pola tradisional. Misalnya pembaharuan di dalam bidang Matematika diawali dengan riset, dilanjutkan dengan pengembangan dan akhirnya difusi; (5) sering diidentifikasi dengan pengembangan materi pembelajaran (6) diawali dengan modernisasi bahan pembelajaran dan penilaian ulang pendekatan pembelajarannya.

Pengembangan program tiap bidang studi dilaksanakan dengan menempuh langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: (1) merumuskan tujuan kurikuler (bidang studi) pada jenjang pendidikan tertentu; (2) dengan berdasarkan tujuan kurikuler, selanjutnya merumuskan tujuan instruksional pokok dan sub pokok bahasan dari suatu bidang studi; (3) berdasarkan tujuan instruksional tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penetapan pokok bahasan dan sub pokok bahasan; (4) berdasarkan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan pokok dan sub pokok bahasan, kemudian dapatlah disusun garis-garis pokok pengajaran (GBPP) yang berisikan tujuan dan bahan pembelajaran yang telah disusun perkelas, persemester, percaturwulan dengan disertai keterangan jumlah jam dan sumber bahan belajar yang dapat digunakan (5) setelah GBPP setiap bidang studi selesai disusun, maka dibuatlah pedoman khusus untuk melaksanakan pembelajaran masing-masing bidang studi yang berisi tentang uraian pendekatan dan metode, alat dan media pembelajaran yang akan diperlukan dan cara menilai hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran (Soetopo dan Soemanto, 1986:57).

Dengan selesainya disusun struktur program GBPP dan pedoman dan pelaksanaannya, maka pengembangan lebih lanjut dari kurikulum tersebut dilaksanakan pada setiap sekolah dalam bentuk pengembangan program pengajaran di kelas.

Untuk pengembangan program-program pembelajaran, isi GBPP setiap bidang studi tersebut perlu diolah lagi untuk menentukan satuan bahan pembelajaran yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik. Suatu satuan program pembelajaran

dapat berupa suatu pokok bahasan, bagian atau sub pokok bahasan atau gabungan antara dua atau lebih pokok bahasan. Yang penting adalah setiap satuan program pembelajaran hendaklah menggambarkan satuan konsep atau pengertian dari suatu masalah, yang dapat diselesaikan dalam waktu antara 2 sampai 4 atau 8 jam pelajaran. Setiap satuan bahasan tersebut harus dikembangkan dalam bentuk program pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dalam hubungannya dengan pengembangan program ini, Soetopo dan Soemanto (1986:71) menjelaskan bahwa tugas guru adalah sebagai berikut: (1) menetapkan satuan-satuan bahasan dari bahan pembelajaran yang telah tercantum dalam GBPP, dan waktu (jumlah jam) yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap satuan bahasan tersebut; (2) mengembangkan program pembelajaran untuk masing-masing satuan bahasan yang nantinya akan dilaksanakan di kelas.

Pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas berkaitan dengan perencanaan dan persiapan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu pelaksanaan kurikulum yang tertuang dalam buku pedoman. Aktivitas pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas ini, sebagaimana telah dikemukakan, sangat tergantung pada peranan dan profesionalisme seorang guru. Sebaik apapun kurikulum yang dirancang, jika guru yang menerapkannya tidak profesional di bidangnya dan tidak mampu mengembangkannya, maka kurikulum tersebut tidak akan banyak berarti dalam pelaksanaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik (Degeng, 1989). Istilah pembelajaran lebih tepat digunakan, karena ia menggambarkan upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. Di samping itu, ungkapan pembelajaran memiliki makna yang lebih dalam untuk mengungkapkan hakikat desain pembelajaran dalam membelajarkan peserta didik (Muhaimin, 2001:183).

Konsep pembelajaran mengandung beberapa implikasi, yaitu (1) perlu diupayakan agar dapat terjadi proses yang interaktif antara peserta didik dan sumber belajar yang direncanakan; (2) ditinjau

dari sudut peserta didik, proses itu mengandung makna bahwa terjadi proses interaksi internal antara seluruh potensi individu dengan sumber dan bahan belajar; (3) ditinjau dari sudut pemberi rangsangan, proses itu mengandung pemilihan, penetapan dan pengembangan metode pembelajaran yang memberikan kemungkinan paling baik bagi terjadinya proses pembelajaran (Muhaimin, 2001:184).

Ada beberapa hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran tersebut, antara lain:

### *1. Guru Harus Memahami tentang Jalan Pembelajaran*

Jalan pembelajaran adalah cara yang ditempuh atau dilalui oleh seorang guru dalam mengatur dan menyusun urutan-urutan dari beberapa bahan pelajaran yang akan disampaikan di kelas, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu (Yusuf dan Anwar, 1995:16). Istilah ini mungkin lebih populer dengan sistem pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus melakukan analisis dan pendekatan sistem pembelajaran yang meliputi berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Berkaitan dengan bentuk jalan pembelajaran tersebut, Yusuf dan Anwar (1995:16) mengemukakan tiga bentuk jalan pembelajaran. Tiga bentuk jalan pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

#### *a. Jalan Pengajaran Progresif*

Jalan pengajaran progressif atau disebut juga jalan pengajaran suksesif, yaitu jalan pengajaran di mana bahan dari suatu mata pelajaran tertentu disampaikan secara maju berkelanjutan (*continous progress*) dengan tanpa mengadakan pengulangan secara disengaja, akan dapat terjadi secara sambil lalu atau secara okasional. Misalnya dalam mata pelajaran Fiqh, penyajiannya dapat dimulai dengan materi pembelajaran tentang shalat, kemudian dilanjutkan dengan materi tentang zakat,

setelah itu berpindah kepada materi pembelajaran tentang puasa, dan pada akhirnya sampai kepada materi pembelajaran tentang haji. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam pelajaran agama Islam, pembelajarannya dapat dimulai dari masalah keimanan, syari'ah dan kemudian berpindah kepada pelajaran akhlaq.

b. Jalan Pembelajaran Regresif

Jalan pembelajaran regresif merupakan kebalikan dari jalan pembelajaran progresif, yaitu jalan pembelajaran “mundur”. Dengan kata lain, jalan pembelajaran regresif, yaitu menyajikan bahan pelajaran dengan memulai hal-hal yang telah diketahui oleh peserta didik, sebagai dasar untuk pelajaran berikutnya. Misalnya, dalam mata pelajaran Sejarah Islam. Maka mempelajari sejarah perkembangan Islam modern (kontemporer), dapat dipelajari dengan menelusuri sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa, yaitu dimulai dari sejarah Islam masa Turki Usmani, sejarah Islam masa Abbasiyah, kemudian sejarah Islam masa Khalifah Rasyidin hingga sejarah Islam semasa Nabi Muhammad SAW, yang telah lebih dahulu dipelajari peserta didik.

c. Jalan Pembelajaran Konsentris

Konsentris (konsentrasi) adalah pemusatan perhatian pada suatu titik. Jalan pembelajaran konsentris berarti menyampaikan bahan pelajaran dengan berpusat pada satu topik pelajaran tertentu untuk dibicarakan atau disampaikan seluruhnya dalam tiap-tiap tahun, atau dalam lingkup kecil adalah tiap pertemuan jam pelajaran, pada masing-masing jenjang pendidikan sekolah. Misalnya jalan pembelajaran untuk mengajarkan materi pelajaran tauhid (keimanan), dapat disampaikan atau diberikan mulai dari kelas satu tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat akhir perguruan tinggi (PT). Akan

tetapi, perluasan dan perincian pembahasan materinya disesuaikan dengan tingkat sekolahnya masing-masing.

2. *Guru Harus Melakukan Survei dan Analisis terhadap Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Proses Pembelajaran*

Berkaitan dengan hal ini, Muhaimin (2001: 236-251) mengemukakan bahwa langkah pertama dalam desain pengembangan pembelajaran adalah melakukan analisis-analisis terhadap beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi dan proses pembelajaran berikut ini:

a. Analisis tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran secara umum diklasifikasi menjadi dua jenis yang sejalan dengan strategi pengorganisasian pembelajaran makro dan mikro, yaitu tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan umum pembelajaran merupakan pernyataan umum tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Tujuan umum mengacu pada keseluruhan isi bidang studi, yaitu pada struktur orientasi bidang studi. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran umum mempengaruhi strategi pengorganisasian pembelajaran secara makro. Sedangkan tujuan khusus pembelajaran adalah pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. Tujuan khusus mengacu pada konstruk tertentu (misalnya fakta, konsep, prosedur, atau prinsip) dari suatu bidang studi. Karena itu, tujuan pembelajaran khusus akan banyak mempengaruhi strategi pengorganisasian mikro. Tujuan khusus berguna untuk memdeskripsikan strategi pengorganisasian pembelajaran tingkat mikro. Dengan kata lain, tujuan khusus identik dengan tujuan belajar yang hendak dicapai.

b. Analisis karakteristik bidang studi, yang mencakup tipe isi bidang studi dan struktur isi bidang studi. Tipe isi bidang studi ini meliputi: konsep, fakta, prinsip, dan prosedur. Sedangkan masalah struktur bidang studi berkaitan dengan hubungan antar isi bidang studi.

Analisis ini bertujuan untuk mendapat masukan untuk menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran.

- c. Analisis sumber belajar, yang bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber belajar yang tersedia dan dapat dipakai untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik. Sumber belajar yang dimaksud mencakup semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik agar terjadi perilaku belajar, baik yang berupa bahan, alat maupun orang.
- d. Analisis karakteristik peserta didik, hal ini berkaitan dengan aspek-aspek psikologis atau kualitas personal peserta didik. Aspek-aspek tersebut bisa berupa bakat, tingkat intelegensi, motivasi belajar atau kemampuan awal (hasil belajar yang telah dimiliki). Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas perorangan peserta didik yang dapat dijadikan petunjuk dalam mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran.
- e. Untuk selanjutnya menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran.
- f. Menetapkan strategi pengorganisasian, isi pembelajaran dan strategi penyampaian isi pembelajaran kepada peserta didik.

### 3. *Guru Harus Membuat Rencana Persiapan Pembelajaran (Lesson Plan)*

Kegiatan belajar dari peserta didik dapat terjadi dengan direncanakan (*by designed*) dan dapat pula terjadi tanpa direncanakan. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu rekayasa yang diupayakan untuk membantu peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya. Dalam konteks proses belajar di sekolah, pembelajaran tidak dapat terjadi dengan sendirinya, sebab peserta didik harus belajar berinteraksi dengan lingkungannya seperti yang terjadi dalam proses belajar di masyarakat (*social learning*). Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat dengan tujuan (*goal based*).

Oleh karena itu, segala kegiatan interaksi, metode, dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dengan selalu mengacu pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki (Muhaimin, 2001: 184).

Dalam menyusun perencanaan program pembelajaran tentang suatu satuan bahasan tertentu kepada peserta didik, para guru dihadapkan pada sejumlah pertanyaan berikut: (1) tujuan apa yang ingin dicapai?; (2) materi-materi pelajaran apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu?; (3) metode/alat mana yang akan digunakan untuk mendukung efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan?; (4) terakhir bagaimana prosedur meng-evaluasi proses dan hasil pembelajaran itu? (Soetopo dan Soemanto, 1986:147). Dalam konteks ini, seorang guru memang harus memiliki kualitas disiplin ilmu yang dimiliki secara memadai dan kompetensi keguruan yang profesional.

Untuk mewujudkan beberapa pertanyaan tersebut secara operasional perlu ditempuh langkah-langkah berikut ini:

- a. Merumuskan tujuan-tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dengan merujuk pada satuan bahasan pelajaran yang akan disampaikan. Rumusan tujuan instruksional khusus tersebut adalah rumusan tujuan yang bersifat operasional dan terukur tentang kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan (kompetensi) yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang diajarkan.
- b. Mengembangkan alat evaluasi untuk mengembangk-kan tes yang fungsinya untuk menilai sampai di mana peserta didik telah memiliki dan menguasai kemampuan-kemampuan atau keterampilan- keterampilan yang telah dirumuskan dalam tujuan-tujuan tersebut. Hal ini berdasarkan atas prinsip pembelajaran yang berorientasi pada tujuan (*out put oriented*).
- c. Menetapkan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan instruksional

khusus yang telah dirumuskan. Langkah ini berkaitan dengan penentuan pokok-pokok materi pelajaran dan perinciannya yang dibelajarkan kepada peserta didik.

- d. Menetapkan prosedur kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh peserta didik. Dalam hal ini adalah menetapkan jenis-jenis metode pembelajaran dan urutan proses pembelajaran yang akan ditempuh.
- e. Melaksanakan program, yang dalam pelaksanaannya sedapat mungkin berpedoman pada prosedur atau perencanaan yang telah disusun (Soetopo dan Soemanto, 1986: 57).

Jika proses pembelajaran lebih mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas, maka berdasarkan hasil penelitian pada tingkat SD, SLTP maupun perguruan tinggi (PT) ternyata hasil belajar atau mutu pembelajaran lebih tinggi bila rencana pembelajarannya disusun lebih terstruktur dan sistematis. Pelajaran dikatakan berstruktur bila lebih dahulu ditentukan secara jelas dan terinci tujuan (biasanya berupa TIK, indikator dan hasil belajar), strategi pembelajaran (PBM), bahan pembelajaran dan evaluasinya (sering berupa tes objektif dan essay) (S. Nasution, 1995:12). Guru yang melaksanakan proses pembelajaran tanpa melakukan persiapan dan perencanaan akan kebingungan menentukan arah dan strategi pembelajaran. Hal ini merupakan langkah awal menuju kegagalan seorang guru dalam melaksanakan dan mengemban tugas serta tanggung jawab profesinya.

Ahmad Tafsir (1992:14) mengemukakan ada sembilan prinsip yang harus dipahami dan diterapkan dalam membuat rencana pembelajaran (*lesson plan*). Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) memahami tujuan pendidikan, (2) menguasai bahan pembelajaran, (3) memahami teori-teori pendidikan dan pembelajaran, (4) memahami prinsip-prinsip mengajar, (5) memahami metode-metode mengajar, (6) memahami teori-teori belajar, (7) memahami beberapa model pembelajaran yang penting, (8) memahami prinsip-prinsip evaluasi, dan (9) memahami langkah-langkah membuat

*lesson plan*. Uraian dan pembahasan yang lebih mendalam tentang sembilan prinsip tersebut dapat dibaca dalam buku Ahmad Tafsir (1992) berjudul *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*. Kesembilan prinsip tersebut sekarang terangkum dalam salah satu kompetensi pendidik yaitu kompetensi paedagogik.

Sebagai seorang guru profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas profesinya tentu harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah di atas dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mewujudkan proses dan hasil pembelajaran yang benar-benar berkualitas dan bermakna.

### **Pertanyaan dan Tugas**

1. Jelaskan hubungan kurikulum dan sistem pembelajaran secara rinci, sistematis dan skematis!
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan guru dalam mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum pada proses pembelajaran di tingkat kelas atau sekolah!
3. Dalam studi pengembangan kurikulum terdapat ungkapan "*Who is behind the gun*" atau "*Not the song but the singer*", jelaskan maksud ungkapan tersebut!

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk, *Pengembangan Kurikulum*, Pustaka Setia Bandung, 1997.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Thoumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- Al-Khouly, Muhammad Ali, *Qomus Tarbiyah Inggris-Arab*, Darul 'Ilm Al-maliyin, Beirut, Lebanon, TT.
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Beuchamp, George A., *Curriculum Theory*, The KAGG Pers, Illinois, 1975.
- Beanne J.A, et. Al., *Curriculum Planning and Development*, Massachussetts, 1986.
- David Kratwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram Massia, *Taxonomy of Education Objectives*, David McKay Company Inc., New York, 1974.
- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Drost, J, *Pengembangan Karier Seorang Pengajar*, Artikel, Kompas, 26 Januari 2000.

- Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Rosda Karya, Bandung, 2007. Jakarta.
- Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Al-Husna, Jakarta, 1989.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Operasionalnya*, Trigunda Karya, Bandung, 1993.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990
- , *Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ragan, B. william *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Suciati, dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, Universitas Terbuka, Depdiknas, Jakarta, 2007.
- Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 1990.

- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- UU RI. No. 2 tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, Sinar Grafika, Jakarta 1993.
- UU RI. No. 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Webster, *Webster's New Word Dictionary Of American Language*, College, The World Publishing Company, 1964.
- Ali, Salman “*Lima Aliran Filsafat Pendidikan Populer Masa Kini dan Filsafat Pendidikan Islam Menurut Al-Qur'an*”, dalam *Ringkasan Hasil Penelitian IAIN 1983/1984 (Pendidikan Islam di Indonesia)*, Dirjen Binbaga Islam, Depag. RI., Jakarta, 1986.
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Abu Ahmadi dan Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ali, Muhammad, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Tinjauan Mengenai Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1986.
- Drost, J, *Pengembangan Karier Seorang Pengajar*, Artikel, Kompas, 26 Januari 2000.
- C. Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Hasim, Abdul, "Pendidikan Berwawasan Multikultural", artikel dalam *Media Indonesia*, Rabu 2 mei 2001.
- Ishak, Baego, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Yayasan Al-Ahkam, Ujung Pandang, 1998.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*,. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1993.
- Salam, Burhanuddin, *Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, Rineka Cipta, 1997.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Syam, Mohammad Noor, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. II, 1994.
- Winkel, W. S., *Psikologi Pengajaran*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Basyiruddin Usman, *Metode pembelajaran PAI*, Ciputat Press, Jakarta, 2005.
- C. Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- David Kratwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram Massia, *Taxonomy of Education Objectives*, David McKay Company Inc., New York, 1974.

- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Junaidi, *Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI*, Direktorat PAIS, Kemenag RI, Jakarta, 2011
- Marno, *Modul Pengembangan Bahan Ajar PAI pada Sekolah*, Direktorat PAIS, Kemenag RI, Jakarta, 2011
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990
- , *Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ragan, B. William, *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- , *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Model*, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990
- , *Pengmbangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ragan, B. William, *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Yusuf, Tayar et. al., *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ishak, Boego, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktek*, Yayasan Al-Ahkam, Ujung Pandang, 1998.
- Phenix, Philip H., *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For General Education*, McGaw-hill Book Company, New York, 1998.
- Ragan, B. william *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. 1993. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung
- Sudjana, Nana. *Pembinaan dan pengembangan Kurikulum di sekolah*, Sinar Baru, Bandung, 1996.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- , *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Model*, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990.
- , *Pengmbangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ragan, B. William, *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.

- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Yusuf, Tayar et. al., *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ishak, Boego, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktek*
- Phenix, Philip H., *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For General Education*, McGaw-hill Book Company, New York, 1998.
- Ragan, B. william *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. 1993. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung
- Sudjana, Nana. *Pembinaan dan pengembangan Kurikulum di sekolah*. 1996. Sinar Baru Algesindo : Bandung
- UU. RI No. 20 TH 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Tim Pustaka Yustia, *Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)*, (Jakarta : Pustaka Yustia, 2008).
- Syafruddin Nurdin, M.Pd, *Guru dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002).
- Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi, 2007).
- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Suatu Panduan Praktis)*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2008).
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

- Muhaimin, Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Masnur Muslich, *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dasar pemahaman dan pengembangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).
- Musnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
- Musnur Muslich, *Dasar dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
- Martinis Yamin, *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008).
- Suparlan, *Modul Kurikulum dan Pengembangan Materi Pembelajaran*, Universitas Tamajakarsa, Jakarta, 2008.
- Alberty, Harold, *Reorganizing the High School Curriculum*, D. Appleton Century Company, New York, 1946.
- Ali, Muhammad, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Sinar Baru, Bandung, cet. II, 1992
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Beuchamp, George A., *Curriculum Theory*, The KAGG Pers, Illinois, 1975.
- Beanne J.A, et.al., *Curriculum Planning and Development*, Massachussetts, 1986.
- David Kratwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram Massia, *Taxonomy of Education Objectives*, David McKay Company Inc., New York, 1974.
- David Nunan, *The Learner-Centered Curriculum*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

- Muhaimin, et. al., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Nasution, S., *Asas-Asas Pengembangan Kurikulum*, Jemmars, Bandung, 1990
- , *Pengembangan Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Phenix, Philip H., *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For General Education*, McGaw-hill Book Company, New York, 1998.
- Ragan, B. william *Modern Elementary Curriculum*, The Dryden Press, New York, 1955.
- Segal, Jeane, *Raising Your Emotional Intellegence*, Terj. Kaifa, Bandung, 2000.
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudjana, Nana. *Pembinaan dan pengembangan Kurikulum di sekolah*. 1996. Sinar Baru Algesindo: Bandung
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, 1997.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- UU. RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, Citra Umbara, Bandung, 2003
- Yusuf, Tayar et. al., *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Hamalik, Oemar. *Perencanaan pengajaran berdasarkan pendekatan sistem*. 2003. PT. Bumi Aksara
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. 1993. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.



## CURRICULUM VITAE



**Dr. Muhamad Fauzi, S.Ag.,M.Ag.** dilahirkan di kampung halamannya, Balunijuk (Bangka), 12 Juni 1974. Riwayat pendidikan formal penulis sebagai berikut: Pendidikan Dasar ditempuh di SDN No. 36 Balunijuk (Bangka) tamat tahun 1987, kemudian melanjutkan ke MTs Swasta Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) Baturusa (Bangka) tamat tahun 1990, selanjutnya meneruskan ke MAN Pangkal Pinang tamat tahun 1993. Setelah menamatkan sekolah dasar dan menengah keagamaan di Bangka, beliau melanjutkan studi tingkat Sarjana (S1) di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Raden Fatah Palembang dan tamat tahun 1998. Setelah menyelesaikan program sarjana (S1) beliau sempat mengikuti Program Pra Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang 1998 lebih kurang enam bulan, dan pada tahun 1999 meneruskan studi program magister (S2) Jurusan Pendidikan Islam dengan konsentrasi tesis Kurikulum PAI SMA di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tamat tahun 2001, sekarang sedang Studi S3 PAI di Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang

Di samping itu, suami dari Meriana Pane, S.Ag dan ayah dari Mulia F. Azizah, Annisa Sofia Zahara, dan Muhammad Fadhel Irsyad ini, memiliki sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan, antara lain: (1) *Menggagas Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum* (artikel dalam Harian Pagi Sumatera Ekspres, 24 Mei 2001); (2) *Masalah Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas* (Artikel dalam Harian Sumatera Ekspres, 5 Mei 2003); (3) *Pendidikan Sekolah yang Dinamis dan Memberdayakan* (Artikel dalam Harian Sumatera Ekspres, 30 Juni 2003); (4) *Pendidikan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan Nasional: Tinjauan Kritis Filosofis*, dalam Jurnal Ta'dib Vol. IV No. 02 tahun 2001 Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang; (5) *Nilai-Nilai Pendidikan Universal Dalam Al-Qur'an: Telaah Filosofis Q.S Luqman: 12-19* (Artikel dalam Jurnal Istinbath No. 1 Th. I /Juni 2001 Kopertais Wil. VII Sumbagsel); (6) *Tantangan dan Prospek Pendidikan Islam di Indonesia* (Dalam Jurnal Istinbath No. 2 th. I /Desember 2001 Kopertais Wil. VII Sumbagsel); (7) *Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Tinjauan Kritis Kurikulum PAI SMU 1994* (Dalam Jurnal Intizar Vol. 9 No. 1 Juni 2002, Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang); (8) *Mempertimbangkan Pendidikan Agama Islam Pluralis*, (Dalam Jurnal

Concencia, No. IV, Juni 2003) PPs IAIN Raden Fatah Palembang; (9) *Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Di Madrasah Aliyah al Fatah Palembang*, (Hasil penelitian Anggaran DIPA Lemlit 2005 IAIN Raden Fatah Palembang. (10) *Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Binaan IAIN Raden Fatah di Kabupaten Muara Enim*, (Hasil penelitian Anggaran DIPA P2M 2005 IAIN Raden Fatah Palembang).(11) *Ekspektasi Mahasiswa dan Dosen terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran di IAIN Raden Fatah Palembang* (Hasil penelitian Anggaran DIPA Lemlit 2008 IAIN Raden Fatah Palembang). (12) *Profesionalisme Guru PAI Madrasah Aliyah di Kota Palembang* (Hasil penelitian Anggaran DIPA Lemlit 2009 IAIN Raden Fatah Palembang).

Sejak tahun 2001 beliau sudah mengabdikan menjadi tenaga pengajar di almamaternya sampai sekarang. Pada tahun 2003 beliau diangkat sebagai PNS di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, dan terhitung mulai 1 Oktober 2006 beliau diangkat menjadi Dosen Tetap di lembaga yang sama.

Daftar Singkatan :

- BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan
- IPA : Ilmu Pengetahuan Alam
- IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial
- KBK : Kurikulum Berbasis Kompetensi
- KD : Kompetensi Dasar
- KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal
- KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- MBS : Manajemen Berbasis Sekolah
- RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- SK : Standar Kompetensi
- SI : Standar Isi
- SKL : Standar Kompetensi Lulusan
- SNP : Standar Nasional Pendidikan
- TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- UN : Ujian Nasional